

Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas berkat dan rahmat-Nya Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Menteri Pendidikan Nasional atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Presiden Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

Di dalam laporan ini disajikan target dan capaian kinerja Kemdiknas dalam tahun 2010 yang meliputi kinerja atas pencapaian 67 sasaran strategis, sembilan program Kementerian dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya lima misi Kemdiknas yaitu: (1) meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan; (2) meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan; (3) meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan; (4) meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan; dan (5) meningkatkan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan.

Dengan dukungan alokasi anggaran pendidikan yang setiap tahun secara bertahap terus ditingkatkan oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), secara bertahap pula telah dilaksanakan berbagai program pembangunan pendidikan nasional guna merealisasikan target pembangunan pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010, serta Rencana Strategis Kemdiknas 2010 - 2014. Untuk masing-masing program dan kegiatan telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sehingga evaluasi terhadap capaian kinerja menjadi jelas, terukur, dan akuntabel.

Melalui kerja keras serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, secara umum Kementerian Pendidikan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan pada masing-masing program pembangunan pendidikan dengan cukup baik. Patut dimaklumi bahwa selama tahun 2010 Kemdiknas melaksanakan delapan program, dimana program pendidikan menengah masih menjadi satu dengan program pendidikan dasar dan menengah serta program pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra masih menjadi satu dengan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemdiknas. Kinerja yang telah dicapai Kementerian dapat dilihat dari tingkat ketercapaian IKU, dimana sebanyak 49 IKU telah melebihi target, 41 IKU mencapai target, dan 41 IKU belum dapat mencapai target, serta 7 IKU belum terukur, karena belum dilaksanakan pada tahun 2010. Contoh kinerja yang melampaui target antara lain capaian APM SD/SDLB/paket A sebesar 85.31% dari 82.94 yang ditargetkan, APK SMP/SMPLB/Paket B sebesar 72.46% dari 71.98% yang ditargetkan, APK PT dan PTA usia 19-23th sebesar 23.88 dari 22.8% yang ditargetkan dan

persentase kab/kota yang menerapkan pengarusutamaan gender bidang pendidikan sebesar 15.69% dari 14% yang ditargetkan. Selain capaian-capaian kinerja tersebut diatas, Kemdiknas juga berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja antara Menteri Pendidikan Nasional dengan Presiden Republik Indonesia, yang telah berhasil merealisasikan sembilan rencana aksi sebagaimana dalam kontrak kinerja yang diperjanjikan, dengan persentase capaian sebanyak 25% untuk pencapaian yang melebihi 100% dan sebanyak 75% untuk pencapaian 76-100%, dan capaian kinerja 100 hari bidang pendidikan serta capaian kinerja reformasi birokrasi Kemdiknas.

Dalam upaya percepatan pencapaian berbagai target pembangunan pendidikan nasional sebagaimana telah ditetapkan, Kemdiknas telah menempuh berbagai langkah terobosan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang terbukti cukup efektif dalam mendorong kinerja seluruh jajaran Kemdiknas.

Di pihak lain, Kemdiknas menyadari bahwa tantangan pembangunan pendidikan masih cukup banyak, dan memerlukan kerja yang lebih keras pada tahun – tahun mendatang. Dengan dukungan dari semua pihak diharapkan tantangan dan masalah yang masih harus ditangani sebagaimana ditargetkan, pada saatnya akan dapat terselesaikan dengan baik.

Melalui laporan ini, Kemdiknas berharap dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja pembangunan bidang pendidikan pada tahun 2010. Selain itu, laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pendidikan nasional pada tahun-tahun mendatang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita. Amin.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan buku ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun bentuk kontribusi lainnya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Maret 2011

Menteri Pendidikan Nasional,

Mohammad Nuh

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR KODE PEJABAT PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
IKHTISAR EKSEKUTIF	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA KEMDIKNAS.....	7
A. PERENCANAAN KINERJA.....	7
B. PERJANJIAN KINERJA.....	25
C. KONTRAK KINERJA MENTERI DENGAN PRESIDEN.....	32
D. REFORMASI BIROKRASI INTERNAL.....	40
E. RENCAN CAPAIAN PROGRAM KERJA 100 HARI KEMDIKNAS.....	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KEMDIKNAS.....	45
A. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN.....	45
1. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL.....	45
2. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENDIDIKAN DASAR.....	48
3. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH.....	52
4. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI.....	54
5. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN.....	59
6. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENELITIAN DANPENGEMBANGAN.....	62
7. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA.....	67
8. CAPAIAN KINERJA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMDIKNAS.....	69
9. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMDIKNAS.....	74
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	76
C. CAPAIAN KONTRAK KINERJA MENTERI DENGAN PRESIDEN.....	87
D. CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI KEMDIKNAS TAHUN 2010.....	104
E. CAPAIAN PROGRAM KERJA 100 HARI KEMDIKNAS.....	107
F. PROSES PEMULIHAN PEMBELAJARAN DI DAERAH BENCANA DAN LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS.....	109
BAB IV PENUTUP.....	121

Daftar Tabel

Nomor	Judul	Halaman
2.1.	Makna Insan Indonesia Cerdas Dan Kompetitif.....	8
2.2.	Misi Kemdiknas.....	9
2.3.	Tujuan Strategis.....	10
2.4.	Sasaran strategis untuk T1.....	10
2.5.	Sasaran strategis untuk T2.....	10
2.6.	Sasaran strategis untuk T3.....	11
2.7.	Sasaran strategis untuk T4.....	11
2.8.	Sasaran strategis untuk T5.....	12
2.9.	Sasaran strategis untuk T6.....	12
2.10.	Sasaran strategis untuk T7.....	12
2.11.	Sasaran strategis untuk tujuan strategis gabungan.....	13
2.12.	Program Kemdiknas.....	13
2.13.	Program PAUDNI.....	18
2.14.	Program DIKDAS.....	19
2.15.	Program DIKMEN.....	20
2.16.	Program DIKTI.....	21
2.17.	Program BSDMP dan PMP.....	22
2.18.	Program Balitbang.....	23
2.19.	Program Badan Pembinaan Bahasa dan Sastra.....	23
2.20.	Program Setjen.....	24
2.21.	Program Itjen.....	24
2.22.	Penetapan kinerja Kemdiknas.....	24
2.23.	Kontrak Kinerja Menteri Dengan Presiden.....	33
2.24.	Rencana Program Kerja 100 Hari Kemdiknas.....	33
3.1.	Capaian IKU Program PAUDNI.....	46
3.2.	Capaian IKU Program Pendidikan Dasar.....	48
3.3.	Capaian IKU Program Pendidikan Menengah.....	52
3.4.	Capaian IKU Program Pendidikan Tinggi.....	54
3.5.	Capaian IKU Program BSDMP dan PMP.....	60
3.6.	Capaian IKU Program Balitbang.....	63
3.7.	Realisasi IKU 6.3 Balitbang 2010.....	65
3.8.	Capaian IKU Program pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra.....	67
3.9.	Capaian IKU Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Kemdiknas.....	69
3.10.	Capaian IKU Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemdiknas.....	74
3.11.	Urutan peringkat pos pengeluaran Juni-Desember 2010 pada realisasi daya serap DIPA Kemdiknas.....	86
3.12.	Capaian 9 rencana aksi kontrak kinerja.....	87
3.13.	Capaian kontrak kinerja.....	88
3.19.	Capaian Program 100 hari Kemdiknas.....	108
3.20.	Kegiatan selama masa tanggap darurat 11-15 November 2010.....	109
3.21.	Program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.....	111
3.22.	Rencana aksi penanganan alam di Wasior.....	111
3.23.	Tanggap darurat di Wasior.....	112

3.24.	Revisi DIPA Tahun 2009 untuk pemberian Dana Subsidi Gempa Sumatera Barat.....	117
3.5.	Alokasi Pasca Gempa.....	118

Daftar Grafik

Nomor	Judul	Halaman
3.1.	Persentase pembagian Pos Pengeluaran pada DIPA 2010	77
3.2.	Realisasi Daya Serap DIPA Kementerian Pendidikan Nasional Bulan Januari 2010.....	78
3.3	Realisasi Daya Serap DIPA Kementerian Pendidikan Nasional Bulan Februari 2010.....	78
3.4	Realisasi Daya Serap DIPA Kementerian Pendidikan Nasional Bulan Maret 2010.....	79
3.5	Realisasi Daya Serap DIPA Kementerian Pendidikan Nasional Bulan April 2010	79
3.6	Realisasi Daya Serap DIPA Kementerian Pendidikan Nasional Bulan Mei 2010.....	80
3.7	Realisasi Daya Serap DIPA Kementerian Pendidikan Nasional Bulan Juni 2010.....	80
3.8	Realisasi Daya Serap DIPA Kementerian Pendidikan Nasional Bulan Juli 2010.....	81
3.9	Realisasi Daya Serap DIPA Kementerian Pendidikan Nasional Bulan Agustus 2010.....	81
3.10	Realisasi Daya Serap DIPA Kementerian Pendidikan Nasional Bulan September 2010.....	82
3.11	Realisasi Daya Serap DIPA Kementerian Pendidikan Nasional Bulan Oktober 2010.....	82
3.12	Realisasi Daya Serap DIPA Kementerian Pendidikan Nasional Bulan November 2010	83
3.13	Realisasi Daya Serap DIPA Kementerian Pendidikan Nasional Bulan Desember 2010	83
3.14	Persentase daya serap DIPA Kemdiknas pada pos pengeluaran belanja pegawai dari bulan Januari – Desember 2010.....	84
3.15	Persentase daya serap DIPA Kemdiknas pada pos pengeluaran belanja barang dari bulan Januari - Desember 2010.....	84
3.16	Persentase daya serap DIPA Kemdiknas pada pos pengeluaran belanja modal dari bulan Januari - Desember 2010.....	85
3.17	Persentase daya serap DIPA Kemdiknas pada pos pengeluaran belanja bansos dari bulan Januari-Desember 2010.....	85
3.18	Persentase Capaian Kontrak Kinerja	87

Daftar Gambar

Nomor	Judul	Halaman
1.1.	Struktur organisasi Kemdiknas.....	2
1.2.	Pembangunan pendidikan komprehensif.....	3
2.1.	Konsep Reformasi Birokrasi Kemdiknas	40
2.2.	Reformasi layanan Kemdiknas.....	41

DAFTAR KODE PEJABAT DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN



Prof. Dr. Muhammad Nuh
Menteri Pendidikan Nasional



Prof. Dr. Fasli Jalal
Wakil Menteri Pendidikan Nasional

Sekretariat Jenderal



1.0 Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, M.S.
Sekretaris Jenderal



1.1 Dr. R. Agus Sartono, MBA
Kepala Biro Perencanaan dan
Kerjasama Luar Negeri



1.3 Drs. Subagyo, M.Si., Ak.
Kepala Biro Keuangan



**1.5 Dr. Andi P. Moenta, SH.,
MH, DFM**
Kepala Biro Hukum dan
Organisasi



1.7 Agus Dharma, S.H., Ph.D.
Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai



**1.9 Ir. Lilik Gani H. A., M.Sc.,
Ph.D**
Kepala Pusat Teknologi Informasi
dan Komunikasi Pendidikan



**1.11 dr. Widaninggar
Widjajanti, M.Ed.**
Kepala Pusat Pengembangan
Kualitas Jasmani



1.2 Hindun Basri Purba, S.H., M.Si.
Kepala Biro Umum



1.4 Drs. Mashuri Maschab, S.U.
Kepala Biro Kepegawaian



1.6 Drs. M. Muhadjir, M.A.
Kepala Pusat Informasi dan Humas



1.8 Dr. Sugianto
Kepala Pusat Perbukuan



1.10 Dr. H. Dendy Sugono
Kepala Pusat Bahasa

Inspektorat Jenderal



2.0 Dr. Wukir Ragil, SH., M.Ed.
Plt. Inspektur Jenderal



2.1 Dr. Abdul Apip, M.Pd.
Sekretaris Inspektorat Jenderal



2.3 Jauhari Sembiring, S.H., M.Si.
Inspektur II



2.5 Dr. Amin Priatna, M.Si.
Inspektur IV



2.2 Suharyanto, S.H., M.M.
Inspektur I



2.4 Marhusa Pandjaitan, S.H. M.A.
Inspektur III



2.6 Drs. Yanto Sugianto
Inspektur Investigasi

Badan Penelitian dan Pengembangan



3.0 Prof. Dr. H. Mansyur Ramly
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan



3.1 Dr. Burhanuddin Tola, M.A.
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan



3.3 Drs. Ade Cahyana, M.Sc.
Kepala Pusat Statistik Pendidikan



3.5 Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar
Kepala Pusat Penilaian Pendidikan



3.2 Ir. Hendarman, M.Sc., Ph.D.
Kepala Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan



3.4 Dra. Diah Harianti, M.Psi.
Kepala Pusat Kurikulum

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi



4.0 Prof. Dr. Djoko Santoso
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi



4.1 Ir. Harris Iskandar, Ph.D
Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi



4.3 Prof. Ir. Suryo Hapsoro Tri Utomo, Ph.D
Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat



4.5 Prof. Dr. Supriadi Rustad, Msi.
Direktur Kelembagaan dan Kerjasama



4.2 Dr. Illah Sailah, MS.
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan



4.4 Prof. Dr. Achmad Jazidie, M.Eng.
Direktur Kelembagaan

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah



5.0 Prof. Suyanto, Ph.D.
Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah



5.1 Dr. Bambang Indriyanto, M.Sc.
Sekretaris Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar



5.3 Didik Suhardi, SH., M.Si.
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama



5.5 Dr. Joko Sutrisno
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan



5.2 Drs. Mudjito AK, M.Si.
Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar



5.4 Dr. Sungkowo Mudjiamano
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas



5.6 drg. H. Eko Djatmiko Sukarso, M.M., M.Kom.
Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa

Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal



6.0 Hamid Muhammad, Ph.D.
Direktur Jenderal Pendidikan
Nonformal dan Informal



6.1 Dr. Gutama
Sekretaris Ditjen PNFI



6.2 Dr. Sudjarwo Singowidjojo, M.Sc.
Direktur Pendidikan Anak Usia Dini



6.3 Dr. Triyadi
Direktur Pendidikan Kesetaraan



6.4 R. Ella Yulaelawati Rumindasari, M.A., Ph.D
Direktur Pendidikan Masyarakat



6.5 Dr. Wartanto, M.M.
Direktur Pembinaan Kursus dan
Kelembagaan

Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan



7.0 Prof. Dr. Baedhowi
Plt. Direktur Jenderal Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan



7.1 Ir. Giri Suryatmana
Sekretaris Ditjen PMPTK



7.2 Drs. H. Ahmad Dasuki, M.M.
Direktur Profesi Pendidik



7.3 Surya Dharma, M.P.A., Ph.D.
Direktur Tenaga Kependidikan



7.4 Erman Syamsudin, S.H., M.Pd.
Direktur Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Nonformal



7.5 Sumarna Surapranata, Ph.D.
Direktur Pembinaan Pendidikan
dan Pelatihan

Staf Ahli Menteri



Herwindo Hariwibowo, Ph.D.
Staf Ahli Menteri Bidang Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Pendidikan



Dra. Harina Yuhetty, M.Pd.
Staf Ahli Menteri Bidang Mutu Pendidikan



Dr. Wukir Ragil, SH., M.Ed.
Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan
Sosial

Daftar Singkatan

APK	Angka Parsitipasi Kasar
APM	Angka Parsitipasi Murni
APS	Angka Putus Sekolah
BHP	Badan Hukum Pendidikan
Bindiklat	Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan
BIPA	Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing
BMN	Barang Milik Negara
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
BPPNFI	Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal
BSNP	Badan Standar Nasional Pendidikan
D-2	Diploma 2
D-3	Diploma 3
D-4	Diploma 4
DAK	Dana Alokasi Khusus
Daring	Dalam Jaringan
Dikdas	Pendidikan Dasar
DP2M	Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Diklat	Pendidikan dan Pelatihan
Dikmen	Pendidikan Menengah
Dikti	Pendidikan Tinggi
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPT	Dewan Pendidikan Tinggi
DUDI	Dunia Usaha – Dunia Industri
EFA	<i>Education For All</i>
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
FDI	Fasilitator Desa Intensif
GNP-PBA	Gerakan Nasional Percepatan – Pemberantasan Buta Aksara
HaKI	Hak Kekayaan Intelektual
HAM	Hak Asasi Manusia
HAN	Hari Anak Nasional
IAO	<i>International Astronomy Olympiad</i>
IBO	<i>International Biology Olympiad</i>
ICDE	<i>International Council of Distance Education</i>
ICHO	<i>International Chemistry Olympiad</i>
ICPC	<i>International Collegiate Programming Contest</i>
ICT	<i>Information and Communication Technology</i>
IJSO	<i>International Junior Science Olympiad</i>
IKK	Indikator Kinerja Kegiatan
IKU	Indikator Kinerja Utama
IMO	<i>International Mathematics Olympiad</i>
IMSO	<i>International Mathematics And Science Olympiad</i>
INAP	<i>Indonesia National Assessment Program</i>
INEPO	<i>International Environmental Project Olympiad</i>
IOI	<i>International Olympiad In Informatics</i>
IPhO	<i>International Physics Olympiad</i>
ISO	<i>International Standard Organization</i>
Juklak	Petunjuk Pelaksanaan
Juknis	Petunjuk Teknis
KBK	Kurikulum Berbasis Kompetensi
KBU	Kelompok Belajar Usaha
Kemdiknas	Kementerian Pendidikan Nasional
Kemenag	Kementerian Agama
KKG	Kelompok Kerja Guru
kKKS	Kelompok Kerja Kepala Sekolah
KKN	Kuliah Kerja Nyata
KKPS	Kelompok Kerja Pengawas Sekolah
KLK	Kelas Layanan Khusus
KNIU	Komite Nasional Indonesia Untuk UNESCO

KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPP	Kursus Para-Profesi
KPPS	Kelompok Kerja Pengawas Sekolah
KRCI	Kontes Robot Cerdas Indonesia
KRI	Kontes Robot Indonesia
KTSP	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara
LKBH	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum
LPMP	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
LPPT	Lembaga Penelitian Dan Pengujian Terpadu
LPTK	Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
LPTM	Lembaga Pengembangan/Pelatihan Terpadu Masyarakat
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	Madrasah Aliyah
MAK	Madrasah Aliyah Kejuruan
Mapel	Mata Pelajaran
MBS	Manajemen Berbasis Sekolah
MenPAN RB	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
MGMP	Musyawarah Guru Mata Pelajaran
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MKKS	Musyawarah Kerja Kepala Sekolah
MKPS	Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah
MDGs	Millenium Development Goals
MTs	Madrasah Tsanawiyah
MTU	<i>Mobile Training Unit</i>
NIGN	Nomor Induk Guru Nasional
NISN	Nomor Induk Siswa Nasional
NPSN	Nomor Pokok Sekolah Nasional
NILEM	Nomor Induk Lembaga
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
OECD	<i>Organization For Economic Cooperation and Development</i>
OSN	Olimpiade Sains Nasional
O2SN	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
P2PNFI	Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal Dan Informal
P3AI	Pusat Pengembangan Pendidikan Dan Aktivitas Instruksional
P4TK	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PAUDNI	Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal
PKBG	Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender dan Anak
PKBM	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PKG	Pemantapan Kerja Guru
PKH	Pendidikan Kecakapan Hidup
PKK	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
PLB	Pendidikan Luar Biasa
PLK	Pendidikan Layanan Khusus
PLS	Pendidikan Luar Sekolah
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
POMNas	Pekan Olahraga Mahasiswa Tingkat Nasional
POP	Pekan Olahraga Pelajar
Porseni	Pekan Olahraga Dan Seni
PPKP	Program Peningkatan Kinerja Pembelajaran
PPPG	Pusat Pengembangan dan Penataran Guru
PSB	Pusat Sumber Belajar
PSBG	Pendidikan Sekolah Berwawasan Gender Dan Anak
PSW	Pusat Studi Wanita
PT	Perguruan Tinggi
PTA	Perguruan Tinggi Agama
PUA	Pengarusutamaan Anak
PUG	Pengarusutamaan Gender
RA	Raudhatul Athfal
RKB	Ruang Kelas Baru
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RKT	Rencana Kerja Tahunan
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah

RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RSBI	Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional
S-1	Strata 1/Sarjana
S-2	Strata 2/Pascasarjana
S-3	Strata 3/Pascasarjana
SABMN	Sistem Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	Sistem Akuntansi Instansi
SAP	Standar Akuntansi Pemerintah
SBI	Sekolah Bertaraf Internasional
SD	Sekolah Dasar
SDLB	Sekolah Dasar Luar Biasa
SDM	Sumber Daya Manusia
SEA SPF	<i>South East Asia School Principal Forum</i>
SEAMEO	<i>South East Asia Ministers Of Education Organization</i>
SEAMOLEC	<i>Southeast Asian Ministers Of Education Organization For Regional Open Learning Center</i>
SI	Standar Isi
SID	Sistem Integrasi Data
SIM	Sistem Informasi Manajemen: Sistem Informasi Untuk Mendukung Proses Manajemen (Pengambilan Keputusan Yang Terkait Dengan Perencanaan, Pelaksanaan Rencana, Dan Pengawasan) Berbasis ICT
SKB	Sanggar Kegiatan Belajar
SKL	Standar Kompetensi Lulusan
SLB	Sekolah Luar Biasa
SM	Sekolah Menengah
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMALB	Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMP-LB	Sekolah Menengah Pertama - Luar Biasa
SNP	Standar Nasional Pendidikan
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SPI	Sistem Pengendalian Intern
SPM	Standar Pelayanan Minimal
SPO	Standar Prosedur Operasional
SYC	<i>Sunbust Youth Camp</i>
TBM	Taman Bacaan Masyarakat
THES	<i>Times Higher Education Supplement</i>
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TIMSS	<i>Trends In International Mathematics and Science Study</i>
TK	Taman Kanak-Kanak
TLD	Tenaga Lapangan Dikmas (Pendidikan Masyarakat)
TOEIC	<i>Test of English For International Communication</i>
TPSDP	<i>Technological and Professional Development Project</i>
TUK	Tempat Uji Kompetensi
TVE	Televisi Edukasi
UKBI	Ujian Kemahiran Bahasa Indonesia
UKS	Usaha Kesehatan Sekolah
UN	Ujian Nasional
UNESCO	<i>United Nations Educational, Scientific And Cultural Organization</i>
UNICEF	<i>United Nations Children's Fund</i>
UPBJJ	Unit Pendidikan Belajar Jarak Jauh
UPT	Unit Pelaksana Teknis
USB	Unit Sekolah Baru
WRI-UNESCO	Wakil RI Untuk UNESCO
WSC	<i>World Skill Competition</i>
WTO	<i>World Trade Organization</i>



PERMENDIKNAS
NO 44/2010

Peta Jalan (Roadmap) Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemdiknas Tahun 2010

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) Tahun 2010 adalah Laporan Kinerja tahun pertama Renstra Kemdiknas tahun 2010-2014 yang berisi pertanggungjawaban Kemdiknas dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya.

Kinerja Kemdiknas diukur melalui pencapaian Penetapan Kinerja yang telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Pendidikan Tahun 2010 - 2014, Rencana Strategis (Renstra) Kemdiknas Tahun 2010 - 2014, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Bidang Pendidikan Nasional tahun 2010.

Renstra menetapkan 5 (lima) misi Kementerian tahun 2010-2014 yang dikemas dalam "Misi 5K", yaitu:

-
- M1 Meningkatkan **Ketersediaan** Layanan Pendidikan;
 - M2 Meningkatkan **Keterjangkauan** Layanan Pendidikan;
 - M3 Meningkatkan **Kualitas/Mutu dan Relevansi** Layanan Pendidikan;
 - M4 Meningkatkan **Kesetaraan** dalam Memperoleh Layanan Pendidikan;
 - M5 Meningkatkan **Kepastian/Keterjaminan** Memperoleh Layanan Pendidikan.
-

Untuk mengukur pencapaian lima misi tersebut, Renstra menetapkan tujuh tujuan strategis, 67 sasaran strategis dan sembilan program pembangunan pendidikan nasional beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijabarkan melalui target dan pencapaiannya setiap tahun, seperti yang dipaparkan pada akhir Bab II.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah ukuran kinerja yang harus dicapai pada setiap eselon II yang berbentuk keluaran (*output*) untuk mencapai hasil (*outcome*) yang ditetapkan pada setiap unit kerja eselon I dan/atau Kementerian. Ukuran keberhasilan kinerja Kementerian dinilai melalui pencapaian sembilan program utama. Namun begitu selama tahun 2010 Kemdiknas masih melaksanakan delapan program, dimana program pendidikan menengah masih menjadi satu dengan program pendidikan dasar dan menengah, program pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra masih menjadi satu dengan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemdiknas. Keluaran program adalah produk antara yang harus dipenuhi untuk menciptakan capaian hasil yang bersifat akhir. Sebagai misal, keluaran program yang berbentuk unit sekolah baru adalah keluaran antara yang diperlukan untuk memperoleh capaian hasil angka partisipasi pendidikan (APK/APM) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2010 dan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014 merupakan target capaian pembangunan di bidang pendidikan nasional yang harus dipertanggungjawabkan oleh Menteri. Uraian lebih terinci mengenai target dan capaian keberhasilannya dapat dilihat pada Bab III.

Untuk dimaklumi selama tahun 2010 Kemdiknas melaksanakan delapan Program, dimana program Pendidikan Menengah masih menjadi satu dengan Program Pendidikan dasar dan Menengah serta Program pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra masih

menjadi satu dengan Program dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemdiknas .

Hingga akhir tahun 2010, dari seluruh IKU yang digunakan untuk mendukung ketercapaian tujuan dan sasaran strategis, Kemdiknas telah berhasil mencapai target, 49 IKU telah melebihi target, 41 IKU mencapai target dan 41 IKU belum dapat mencapai target serta 7 IKU belum Terukur.

Berikut uraian secara terinci pencapaian IKU tersebut:

1. IKU program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

Dari 12 IKU yang digunakan dalam program pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal untuk mendukung pencapaian tujuan T1 dan T2, di bawah ini diuraikan IKU-IKU yang capaian realisasinya mencapai, melebihi dan belum mencapai target yang ditetapkan.

a) IKU yang mencapai target

- Persentase PTK PAUD-NI yang mengikuti peningkatan kompetensi, capaian IKU ini sebesar 11.75% dari target 11.75% yang ditetapkan dengan persentase capaian **100%**.

b) IKU yang melebihi target

- Persentase PTK PAUD-NI memperoleh penghargaan dan perlindungan, capaian IKU ini sebesar 10% dari target 1.36% yang ditetapkan dengan persentase capaian **735%**;
- Persentase lulusan lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi, capaian IKU ini sebesar 3.45% dari target 2% yang ditetapkan dengan persentase capaian **172.50%**;
- Persentase Kab/Kota yang menerapkan pengarusutamaan gender bidang pendidikan, capaian IKU ini sebesar 15.69% dari target 14% yang ditetapkan dengan persentase capaian **112.07%**;
- Persentase Kab/Kota yang telah menyelenggarakan parenting education, capaian IKU ini sebesar 8.3% dari target 0% yang ditetapkan dengan persentase capaian **8.35%**
- Persentase Penduduk Buta Aksara Usia > 15 Tahun, capaian IKU ini sebesar 4.79% dari target 5.0% yang ditetapkan dengan persentase capaian **104.38%**

c) IKU yang belum mencapai target

- APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS), capaian IKU ini sebesar 21.4% dari target 29.6% yang ditetapkan dengan persentase capaian **72.30%**
- Lembaga PAUD yang berakreditasi, capaian IKU ini sebesar 0.17% dari target 0.5% yang ditetapkan dengan persentase capaian **34.00%**

- Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Program PAUD-NI, capaian IKU ini sebesar 0% dari target 40% yang ditetapkan dengan persentase capaian 0%
- Persentase Anak Lulus SMP Tidak Melanjutkan, Putus dan atau Lulus Sekolah Menengah Tidak Melanjutkan Mendapatkan Layanan Pendidikan Keterampilan Berbasis Kecakapan Hidup, capaian IKU ini sebesar 11.42% dari target 12% yang ditetapkan dengan persentase capaian 95.17%
- % Kabupaten/ Kota Yang Telah Memiliki Minimal 10 TBM, capaian IKU ini sebesar 25% dari target 34% yang ditetapkan dengan persentase capaian 73.53%
- Persentase PKBM Berakreditasi, capaian IKU ini sebesar 0% dari target 40% yang ditetapkan dengan persentase capaian 0%

2. IKU Program Pendidikan Dasar

Dari 30 IKU yang digunakan dalam program pendidikan dasar untuk mendukung pencapaian tujuan T2, di bawah ini diuraikan IKU-IKU yang capaian realisasinya mencapai, melebihi dan belum mencapai target yang ditetapkan.

a) IKU yang mencapai target

- Persentase SD menerapkan e-pembelajaran, capaian IKU ini sebesar 16% dari target 16% yang ditetapkan dengan persentase capaian 100%;
- Persentase SD memiliki fasilitas internet, capaian IKU ini sebesar 10% dari target 10% yang ditetapkan dengan persentase capaian 100%;
- Persentase SMP menerapkan e-pembelajaran, capaian IKU ini sebesar 20% dari target 20% yang ditetapkan dengan persentase capaian 100%;
- Persentase SMP memiliki fasilitas internet, capaian IKU ini sebesar 20% dari target 20% yang ditetapkan dengan persentase capaian 100%;
- Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima tunjangan, capaian IKU ini sebesar 100% dari target 100% yang ditetapkan dengan persentase capaian 100%;
- Persentase SD yang memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM, capaian IKU ini sebesar 3% dari target 3% yang ditetapkan dengan persentase capaian 100%;
- Persentase SMP yang memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM, capaian IKU ini sebesar 3% dari target 3% yang ditetapkan dengan persentase capaian 100%;
- Rasio guru terhadap terhadap siswa SMP, capaian IKU ini sebesar 1:34 dari target 1:34 yang ditetapkan dengan persentase capaian 100%;
- Persentase SD/SDLB memenuhi SPM, capaian IKU ini sebesar 60% dari target 60% yang ditetapkan dengan persentase capaian 100%;

- Persentase SMP/SMPLB memenuhi SPM, capaian IKU ini sebesar 55% dari target 55% yang ditetapkan dengan persentase capaian 100%;
- Persentase kab/kota yang memiliki tenaga kependidikan sesuai SPM, capaian IKU ini sebesar 25% dari target 25% yang ditetapkan dengan persentase capaian 100%.

b) IKU yang melebihi target

- APK SMP/SMPLB/ Paket B, capaian IKU ini sebesar 72.46% dari target 71.98% yang ditetapkan dengan persentase capaian 100.67%;
- APM SD/SDLB/Paket A, capaian IKU ini sebesar 85.31% dari target 82.94% yang ditetapkan dengan persentase capaian 102.86%
- Persentase Peserta Didik SD/SDLB Putus Sekolah, capaian IKU ini sebesar 1.65% dari target 1.5% yang ditetapkan dengan persentase capaian 110%
- Persentase Peserta Didik SMP/SMPLB Putus Sekolah, capaian IKU ini sebesar 2.49% dari target 1.8% yang ditetapkan dengan persentase capaian 138.33%
- Persentase Lulusan SMP/SMPLB yang Melanjutkan ke Sekolah Menengah, capaian IKU ini sebesar 97.01% dari target 88% yang ditetapkan dengan persentase capaian 110.24%
- Persentase SD/SDLB Berakreditasi, capaian IKU ini sebesar 75.8% dari target 45% yang ditetapkan dengan persentase capaian 168.44%
- Persentase SMP/SMPLB Berakreditasi, capaian IKU ini sebesar 70.9% dari target 21.3% yang ditetapkan dengan persentase capaian 332.86%
- Persentase SD/SDLB Berakreditasi Minimal B, capaian IKU ini sebesar 53.61% dari target 28% yang ditetapkan dengan persentase capaian 191.46%
- Persentase Kabupaten/Kota memiliki minimal satu SMP RSBI/SBI, capaian IKU ini sebesar 72.64% dari target 33% yang ditetapkan dengan persentase capaian 220.12%
- Rasio guru terhadap siswa SD 1:33, capaian IKU ini sebesar 1:33 dari target 1:33 yang ditetapkan;

c) IKU yang belum mencapai target

- APM SMP/SMPLB/Paket B, capaian IKU ini sebesar 54.98% dari target 55.97% yang ditetapkan dengan persentase capaian 98.23%
- Persentase Lulusan SD/SDLB yang Melanjutkan Pendidikan, capaian IKU ini sebesar 76% dari target 91% yang ditetapkan dengan persentase capaian 83.52%
- Persentase Kabupaten/Kota memiliki minimal satu SD RSBI/SBI, capaian IKU ini sebesar 37.36% dari target 39.4% yang ditetapkan dengan persentase capaian 94.82%

- Nilai total tertimbang dari kompetensi internasional tingkat pendidikan dasar, capaian IKU ini sebesar 12 dari target 160 yang ditetapkan dengan persentase capaian **7.50%**
- Persentase guru SD/SDLB Dalam Jabatan Berkualifikasi Akademik S-1/D-4, capaian IKU ini sebesar 35% dari target 34% yang ditetapkan dengan persentase capaian **97.22%**
- Persentase guru SMP/SMPLB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4, capaian IKU ini sebesar 76% dari target 77% yang ditetapkan dengan persentase capaian **98.70%**;
- Rasio kesetaraan gender SD/SDLB, capaian IKU ini sebesar 97.03% dari target 97.2% yang ditetapkan dengan persentase capaian **99.83%**;

d) IKU yang belum diketahui pencapaiannya

- Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B
- Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima tunjangan

3. IKU Program Pendidikan Menengah

Dari 24 IKU yang digunakan dalam program pendidikan menengah untuk mendukung pencapaian tujuan T3, di bawah ini diuraikan IKU-IKU yang capaian realisasinya mencapai, melebihi dan belum mencapai target yang ditetapkan.

a) IKU yang mencapai target

- Rasio guru terhadap siswa SM, capaian IKU ini sebesar 1:28 dari target 1:28 yang ditetapkan dengan persentase capaian **100%**;
- Persentase kab/kota yang memiliki rasio pengawas:SM minimal 1:15, capaian IKU ini sebesar 85% dari target 85% yang ditetapkan dengan persentase capaian **100%**;
- Jumlah SMA/SMLB bersertifikat ISO 9001/2008, capaian IKU ini sebesar 316 dari target 316 yang ditetapkan dengan persentase capaian **100%**
- Persentase SMA/SMALB yang memiliki laboratorium multimedia, capaian IKU ini sebesar 70% dari target 70% yang ditetapkan dengan persentase capaian **100%**
- Persentase kab/kota memiliki 1 SMK berbasis keunggulan lokal, capaian IKU ini sebesar 49% dari target 49% yang ditetapkan dengan persentase capaian **100%**

b) IKU yang melebihi target

- APK SMA/SMLB/SMK/ Paket C, capaian IKU ini sebesar 65% dari target 61.8% yang ditetapkan dengan persentase capaian **105.17%**

- Persentase SMA/SMLB Berakreditasi, capaian IKU ini sebesar 82.8% dari target 70.7% yang ditetapkan dengan persentase capaian **117.11%**
- Persentase SMA/SMLB Berakreditasi Minimal B, capaian IKU ini sebesar 41.2% dari target 23.4% yang ditetapkan dengan persentase capaian **176.07%**
- Persentase kab/kota memiliki minimal 1 SMA berbasis keunggulan local, capaian IKU ini sebesar 20% dari target 12% yang ditetapkan dengan persentase capaian **166.67%**
- Persentase SMK Berakreditasi Minimal B, capaian IKU ini sebesar 36% dari target 22% yang ditetapkan dengan persentase capaian **163.64%**
- Persentase Kab/Kota Memiliki Minimal 1 SMA SBI/RSBI, capaian IKU ini sebesar 42.25% dari target 28.4% yang ditetapkan dengan persentase capaian **148.77%**
- Persentase Kab/Kota Memiliki Minimal 1 SMK RSBI/SBI, capaian IKU ini sebesar 66.45% dari target 62% yang ditetapkan dengan persentase capaian **107.18%**
- Persentase sekolah menengah dengan rasio guru terhadap siswa antara 1:20 sampai dengan 1:32, capaian IKU ini sebesar 50.4% dari target 46% yang ditetapkan dengan persentase capaian **109.57%**;
- Persentase Guru SMA/SMLB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4, capaian IKU ini sebesar 93.20% dari target 77.1% yang ditetapkan dengan persentase capaian **120.88%**;
- **Persentase guru SMK berkualifikasi akademik S-1/D-4**, capaian IKU ini sebesar 89.71% dari target 87.6% yang ditetapkan dengan persentase capaian **102.40%**;
- persentase SMA/SMALB yang memiliki lab. Computer, capaian IKU ini sebesar 60.2% dari target 24.5% yang ditetapkan dengan persentase capaian **236.08%**
- Persentase SMK yang memiliki e-perpustakaan, capaian IKU ini sebesar 32% dari target 20% yang ditetapkan dengan persentase capaian **160%**
- Persentase SMK Berkemitraan Dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri, capaian IKU ini sebesar 48% dari target 23.4% yang ditetapkan dengan persentase capaian **205.13%**
- Nilai total tertimbang medali dari kompetensi internasional tingkat pendidikan menengah, capaian IKU ini sebesar 31% dari target 22% yang ditetapkan dengan persentase capaian **150%**

c) IKU yang belum mencapai target

- Persentase SMK Berakreditasi, capaian IKU ini sebesar 63.09% dari target 70.7% yang ditetapkan dengan persentase capaian **89.24%**
- Persentase SMK Bersertifikat ISO 9001:2000/ 9001:2008, capaian IKU ini sebesar 8% dari target 25.6% yang ditetapkan dengan persentase capaian **31.25%**

- Persentase SMA/SMALB yang memiliki perpustakaan, capaian IKU ini sebesar 6.5% dari target 10% yang ditetapkan dengan persentase capaian **65%**
- persentase peserta didik paket C dari putus sekolah SMA/SMK/MA, capaian IKU ini sebesar 1.90% dari target 1.93% yang ditetapkan dengan persentase capaian **98.43%**
- Rasio kesetaraan gender SMA/SMK/SMLB, capaian IKU ini sebesar 23.4% dari target 77% yang ditetapkan dengan persentase capaian **30.39%**

4. IKU Program Pendidikan Tinggi

Dari 16 IKU yang digunakan dalam program pendidikan tinggi untuk mendukung pencapaian tujuan T4, di bawah ini diuraikan IKU-IKU yang capaian realisasinya mencapai, melebihi dan belum mencapai target yang ditetapkan.

a) IKU yang mencapai target

- Persentase Dosen Berkualifikasi S-3, capaian IKU ini sebesar 9.5% dari target 9.5% yang ditetapkan dengan persentase capaian **100%**

b) IKU yang melebihi target

- APK PT dan PTA Usia 19-23 Thn *], capaian IKU ini sebesar 23.88% dari target 22.8% yang ditetapkan dengan persentase capaian **104.74%**
- APK prodi sains natural dan teknologi (usia 19-23 tahun), capaian IKU ini sebesar 5.74% dari target 4.1% yang ditetapkan dengan persentase capaian **140%**
- Rasio Kesetaraan gender PT, capaian IKU ini sebesar 108.9% dari target 111.8% yang ditetapkan dengan persentase capaian **102.66%**
- Jumlah Perguruan Tinggi Masuk TOP 500 Dunia dengan persentase capaian, capaian IKU ini sebesar 4 dari target 3 yang ditetapkan dengan persentase capaian **133.33%**
- Persentase Dosen Dengan Publikasi Nasional, capaian IKU ini sebesar 17.2% dari target 0.15% yang ditetapkan dengan persentase capaian **11466.67%**
- Jumlah HAKI Yang Dihasilkan, capaian IKU ini sebesar 76 dari 75 target yang ditetapkan dengan persentase capaian **101.33%**
- Persentase Dosen Dengan Publikasi Internasional, capaian IKU ini sebesar 0.75% dari target 0.4% yang ditetapkan dengan persentase capaian **187.5%**

c) IKU yang belum mencapai target

- Persentase Prodi Terakreditasi, capaian IKU ini sebesar 72% dari target 82% yang ditetapkan dengan persentase capaian **87.80%**
- Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B, capaian IKU ini sebesar 62% dari target 67.8% yang ditetapkan dengan persentase capaian **91.45%**

- Jumlah PT Otonom, capaian IKU ini sebesar 20 dari target 50 yang ditetapkan dengan persentase capaian **40.0%**
- Jumlah PT Beropini WTP, capaian IKU ini sebesar 6 dari target 7 yang ditetapkan dengan persentase capaian **85.71%**
- Persentase Dosen Berkualifikasi S-2, capaian IKU ini sebesar 62% dari target 62.5% yang ditetapkan dengan persentase capaian **99.20%**
- Persentase Dosen Bersertifikat, capaian IKU ini sebesar 21.9% dari target 23% yang ditetapkan dengan persentase capaian **95.22%**
- Rasio Mahasiswa Vokasi : Total Mahasiswa Vokasi dan S-1, capaian IKU ini sebesar 18.7% dari target 19% yang ditetapkan dengan persentase capaian **98.42%**
- Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa, capaian IKU ini sebesar 7.30% dari target 10% yang ditetapkan dengan persentase capaian **73%**

5. IKU Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Dari 10 IKU yang digunakan dalam program pengembangan SDM pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan untuk mendukung pencapaian tujuan T1, T2, T3 dan T4 di bawah ini diuraikan IKU-IKU yang capaian realisasinya mencapai, melebihi dan belum mencapai target yang ditetapkan.

a) IKU yang mencapai target

- Persentase Pengawas Sekolah mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan Profesionalisme Berkelanjutan, capaian IKU ini sebesar 100% dari target 100% yang ditetapkan dengan persentase capaian **100%**

b) IKU yang melebihi target

- Persentase Kepala Sekolah mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan Profesionalisme Berkelanjutan, capaian IKU ini sebesar 15.6% dari target 10% yang ditetapkan dengan persentase capaian **156%**;
- Jumlah kumulatif pegawai Kemdiknas yang mengikuti diklat, capaian IKU ini sebesar 3680 orang dari target 10%/3430 orang yang ditetapkan dengan persentase capaian **107.2%**;
- Persentase satuan Pendidikan menengah yang telah dilakukan penjaminan mutu pendidikan, capaian IKU ini sebesar 30.80% dari target 20% yang ditetapkan dengan persentase capaian **154%**

c) IKU yang belum mencapai target

- Persentase Guru Bersertifikat Pendidik, capaian IKU ini sebesar 28.50% dari target 33.6% yang ditetapkan dengan persentase capaian **84.82%**
- Persentase guru mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme berkelanjutan, capaian IKU ini sebesar 15.6% dari target 34.0% yang ditetapkan dengan persentase capaian **45.88%**

- Persentase satuan Pendidikan dasar yang telah dilakukan penjaminan mutu pendidikan, capaian IKU ini sebesar 7.9% dari target 20% yang ditetapkan dengan persentase capaian **39.50%**

d) IKU yang di programkan tahun 2011

- Persentase satuan Pendidikan anak usia dini yang telah dilakukan penjaminan mutu pendidikan
- Persentase pendidik yang telah disupervisi kinerjanya sesuai persyaratan standar pendidik
- Persentase satuan Pendidikan tinggi yang telah dilakukan penjaminan mutu pendidikan

6. IKU Program Penelitian dan Pengembangan

Dari 17 IKU yang digunakan dalam program penelitian dan pengembangan untuk mendukung pencapaian tujuan T1, T2, T3, T4 dan T5 di bawah ini diuraikan IKU-IKU yang capaian realisasinya mencapai, melebihi dan belum mencapai target yang ditetapkan.

a) IKU yang mencapai target

- Persentase prodi dan Institusi PT diakreditasi, capaian IKU ini sebesar 20% dari target 20% yang ditetapkan dengan persentase capaian **100%**
- Jumlah peraturan turunan SNP yang dikembangkan dan disempurnakan, capaian IKU ini sebesar 7 dari target 7 yang ditetapkan dengan persentase capaian **100%**
- Persentase provinsi dan kab/kota yang mengembangkan kurikulum pada tingkat daerah, capaian IKU ini sebesar 97% dari target 97% yang ditetapkan dengan persentase capaian **100%**;
- Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum secara mandiri, capaian IKU ini sebesar 36% dari target 36% yang ditetapkan dengan persentase capaian **100%**;
- Jumlah rekomendasi kebijakan pendidikan berbasis penelitian, capaian IKU ini sebesar 15 dari target 15 yang ditetapkan dengan persentase capaian **100%**
- Jumlah daerah yang bergabung dalam jaringan kerjasama penelitian, capaian IKU ini sebesar 2 dari target 2 yang ditetapkan dengan persentase capaian **100%**
- Jumlah judul hasil penelitian yang diterbitkan dan didesiminasikan, capaian IKU ini sebesar 5 dari target 5 yang ditetapkan dengan persentase capaian **100%**
- Persentase mata pelajaran pendidikan dasar dan menengah yang hak cipta buku teksnya telah dibeli (N Total = 885 Jilid Mapel), capaian IKU ini sebesar 72.4% dari target 72.4% yang ditetapkan dengan persentase capaian **100%**

- Jumlah PTK yang dinilai kompetensinya sesuai dengan SNP, capaian IKU ini sebesar 4000 dari target 4000 yang ditetapkan dengan persentase capaian **100%**
- Jumlah soal yang disusun untuk bank soal untuk berbagai kepentingan penilaian pendidikan, capaian IKU ini sebesar 84.300 dari target 84.300 yang ditetapkan dengan persentase capaian **100%**
- Jumlah model penilaian pendidikan, capaian IKU ini sebesar 67 dari target 67 yang ditetapkan dengan persentase capaian **100%**

b) IKU yang melebihi target

- Jumlah peraturan perundang-undangan, capaian IKU ini sebesar 8 dari target 5 yang ditetapkan dengan persentase capaian **160%**
- Jumlah model kurikulum dan pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran aktif dan menghasilkan lulusan kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa, capaian IKU ini sebesar 82 dari target 40 yang ditetapkan dengan persentase capaian **205%**
- Persentase sekolah/madrasah diakreditasi (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, SLB), capaian IKU ini sebesar 71.60% dari target 51% yang ditetapkan dengan persentase capaian **140,39%**

c) IKU yang belum mencapai target

- Persentase program/satuan PNF di akreditasi (PAUD, Paket A, B, C, Paket C Kejuruan, LPK, PKBM), capaian IKU ini sebesar 0.35% dari target 0.52% yang ditetapkan dengan persentase capaian **67.31%**
- Jumlah informasi dan publikasi kelitbangan, capaian IKU ini sebesar 3% dari target 4% yang ditetapkan dengan persentase capaian **75%**
- Jumlah Peserta didik yang dinilai kompetensinya sesuai dengan SNP, capaian IKU ini sebesar 12.042.031 dari target 12.212.234 yang ditetapkan dengan persentase capaian **98.32%**

7. IKU Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra

Dari 6 IKU yang digunakan dalam program pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra untuk mendukung pencapaian tujuan T6 di bawah ini diuraikan IKU-IKU yang capaian realisasinya mencapai, melebihi dan belum mencapai target yang ditetapkan.

a) IKU yang mencapai target

- Jumlah Majalah Bahasa dan Sastra Nasional Diterbitkan Secara Berkala, capaian IKU ini sebesar 1 (satu) dari target 1 (satu) yang ditetapkan dengan persentase capaian **100%**

- Jumlah Negara Memiliki Pusat Pembelajaran Bahasa Indonesia, capaian IKU ini sebesar 35 dari target 35 yang ditetapkan dengan persentase capaian 100%
- Jumlah pengembangan pusat pembelajaran BIPA di luar negeri, capaian IKU ini sebesar 8 dari target 8 yang ditetapkan dengan persentase capaian 100%

b) IKU yang melebihi target

- Persentase Bahasa Daerah Terpetakan (N Total = 746), capaian IKU ini sebesar 67% dari target 59% yang ditetapkan dengan persentase capaian 112.8%

c) IKU yang belum mencapai target

- Persentase Kabupaten/Kota Yang Terbina Dalam Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Luar Ruang Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan, capaian IKU ini sebesar 1% dari target 6% yang ditetapkan dengan persentase capaian 16.6%.

d) IKU yang belum dilaksanakan

- Persentase Guru Bahasa Indonesia Memiliki Kemahiran Berbahasa Indonesia Sesuai Standar Nasional, IKU ini baru direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2011.

8. IKU Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Dari 19 IKU yang digunakan dalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk mendukung pencapaian tujuan T7 di bawah ini diuraikan IKU-IKU yang capaian realisasinya mencapai, melebihi dan belum mencapai target yang ditetapkan.

a) IKU yang mencapai target

- Persentase Satker Tertib Pengelolaan SAK dan SIMAK BMN, capaian IKU ini sebesar 80% dari target 80% yang ditetapkan dengan persentase capaian 100%;
- Laporan Keuangan Unit-Unit Utama Terintegrasi /Terkonsolidasi Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan, capaian IKU ini sebesar 100% dari target 100% yang ditetapkan dengan persentase capaian 100%;
- Persentase Satker UPT Pusat di Daerah Yang Menerapkan Standar ISO 9001-2008, capaian IKU ini sebesar 20% dari target 20% yang ditetapkan dengan persentase capaian 100%;
- Persentase Satker di Lingkungan Unit Utama Yang Menerapkan Standar ISO 9001-2008, capaian IKU ini sebesar 100% dari target 100% yang ditetapkan dengan persentase capaian 100%;

- Persentase Unit Utama Yang Menerapkan Manajemen Berbasis Kinerja, capaian IKU ini sebesar 50% dari target 50% yang ditetapkan dengan persentase capaian 100%;
- Persentase Kerja Sama Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Pendidikan Yang Ditindaklanjuti, capaian IKU ini sebesar 90% dari target 90% yang ditetapkan dengan persentase capaian 100%.
- Jumlah Naskah Data Statistik dan Pendayagunaan Data, capaian IKU ini sebesar 33% dari target 33% yang ditetapkan dengan persentase capaian 100%;
- Persentase Penyelenggaraan Pendataan Pendidikan, capaian IKU ini sebesar 15% dari 15% target yang ditetapkan dengan persentase capaian 100%.

b) IKU yang melebihi target

- Tingkat Penerapan E-Administrasi di Lingkungan Kementerian (Persen), capaian IKU ini sebesar 77.18% dari target 65% yang ditetapkan dengan persentase capaian 118.74%;
- Persentase Satuan Pendidikan Formal dan Unit Kerja Terkoneksi ke Sistem Pembelajaran Daring (Online), capaian IKU ini sebesar 26.96% dari target 12% yang ditetapkan dengan persentase capaian 224.67%;
- Persentase Anggaran Yang Tidak Diblokir, capaian IKU ini sebesar 97.25% dari target 90% yang ditetapkan dengan persentase capaian 108.06%.
- Persentase Masyarakat (Peserta Didik, Orang Tua, Tenaga Pendidik, Satuan Pendidikan, Dunia Industri, Media dan Publik, Pendidikan Daerah, Rekanan dan Pelajar dan Mahasiswa Asing) Yang Memahami Tentang Kebijakan Pendidikan, capaian IKU ini sebesar 79.69% dari target 72% yang ditetapkan dengan persentase capaian 106.5%.

c) IKU yang belum mencapai target

- Persentase Satuan Kerja Yang Tingkat Kehadiran Pegawainya Tidak Kurang Dari 98%, capaian IKU ini sebesar 88.40% dari target 95% yang ditetapkan dengan persentase capaian 93.05%;
- Persentase realisasi Program dan kegiatan Kementerian, capaian IKU ini sebesar 89.29% dari target 95% yang ditetapkan dengan persentase capaian 93.98%;
- Persentase Realisasi Anggaran Kementerian, capaian IKU ini sebesar 92.60% dari target 95% yang ditetapkan dengan persentase capaian 97.47%;
- Persentase Satker/Unit Kerja Kementerian Terkoneksi Secara Daring (Online), capaian IKU ini sebesar 80.03% dari target 95% yang ditetapkan dengan persentase capaian 84.24%.

- Persentase Unit Kerja Pusat dan SKPD Yang Tergabung Dalam Jaringan Pendataan, capaian IKU ini sebesar 39.9% dari target 40% yang ditetapkan dengan persentase capaian **99.97%**
- Skor LAKIP Kementerian, capaian IKU ini sebesar 73.5 dari target 72.66 yang ditetapkan dengan persentase capaian **95.6%**.

d) IKU yang belum dilaksanakan

- Sistem Remunerasi Berbasis Kinerja Diterapkan di Lingkungan Kementerian, IKU ini baru direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2012.

9. IKU Program Pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Dari 4 IKU yang digunakan dalam program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur untuk mendukung pencapaian tujuan T7 di bawah ini diuraikan IKU-IKU yang capaian realisasinya mencapai, melebihi dan belum mencapai target yang ditetapkan.

a) IKU yang melebihi target

- Persentase Unit Yang Diaudit Manajemen Berbasis Kinerjanya, capaian IKU ini sebesar 61.15% dari target 73.3% yang ditetapkan dengan persentase capaian **203.83%**.
- Persentase Satker dengan Temuan Audit Berkonsekuensi Penyetoran ke Kas Negara >500 juta, capaian IKU ini sebesar 3.38% dari target 18% yang ditetapkan dengan persentase capaian **18.78%**; Namun demikian apabila dikaji lebih mendalam dari makna IKU tersebut maka sesungguhnya yang terjadi adalah peningkatan akuntabilitas dari auditan.

b) IKU yang belum mencapai target

- Persentase Satker di Lingkungan Kemdiknas Memiliki SPI, capaian IKU ini sebesar 25.34% dari target 45% yang ditetapkan dengan persentase capaian **56.31%**;
- Persentase Penyelesaian Temuan Audit, capaian IKU ini sebesar 47.05% dari target 73.3% yang ditetapkan dengan persentase capaian **64.19%**;

Selain pencapaian target-target IKU sembilan program pendidikan di atas, Kementerian Pendidikan Nasional juga telah berhasil sembilan rencana aksi sebagaimana dalam kontrak kinerja yang diperjanjikan, dengan persentase capaian sebanyak 25% untuk pencapaian yang melebihi 100% dan sebanyak 75% untuk pencapaian 76-100%. Kinerja lain yang telah dicapai selama tahun 2010 adalah dalam bidang reformasi birokrasi. Capaian kinerja Kementerian dalam reformasi birokrasi sampai tahun 2010 adalah telah dilaksanakannya 7 [tujuh] agenda reformasi birokrasi. Ketujuh agenda tersebut adalah 1) Penguatan organisasi; 2) Penataan dan Penguatan SDM; 3) Pembenahan tatalaksana dan pengembangan sistem; 4) Layanan satuan pendidikan; 5) layanan peserta didik; 6) Layanan pendidik dan tenaga kependidikan; dan 7) Layanan substansi pendidikan.

Terhadap IKU-IKU yang mengalami kegagalan dalam pencapaian target, perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab kegagalan dan permasalahan yang dihadapi dan ke depan dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar target-target tersebut dapat tercapai. Dengan tercapainya target IKU diharapkan dapat mendukung tercapainya 5 (lima) misi dan visi **“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional Untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif”** pada tahun 2014.

BAB I PENDAHULUAN

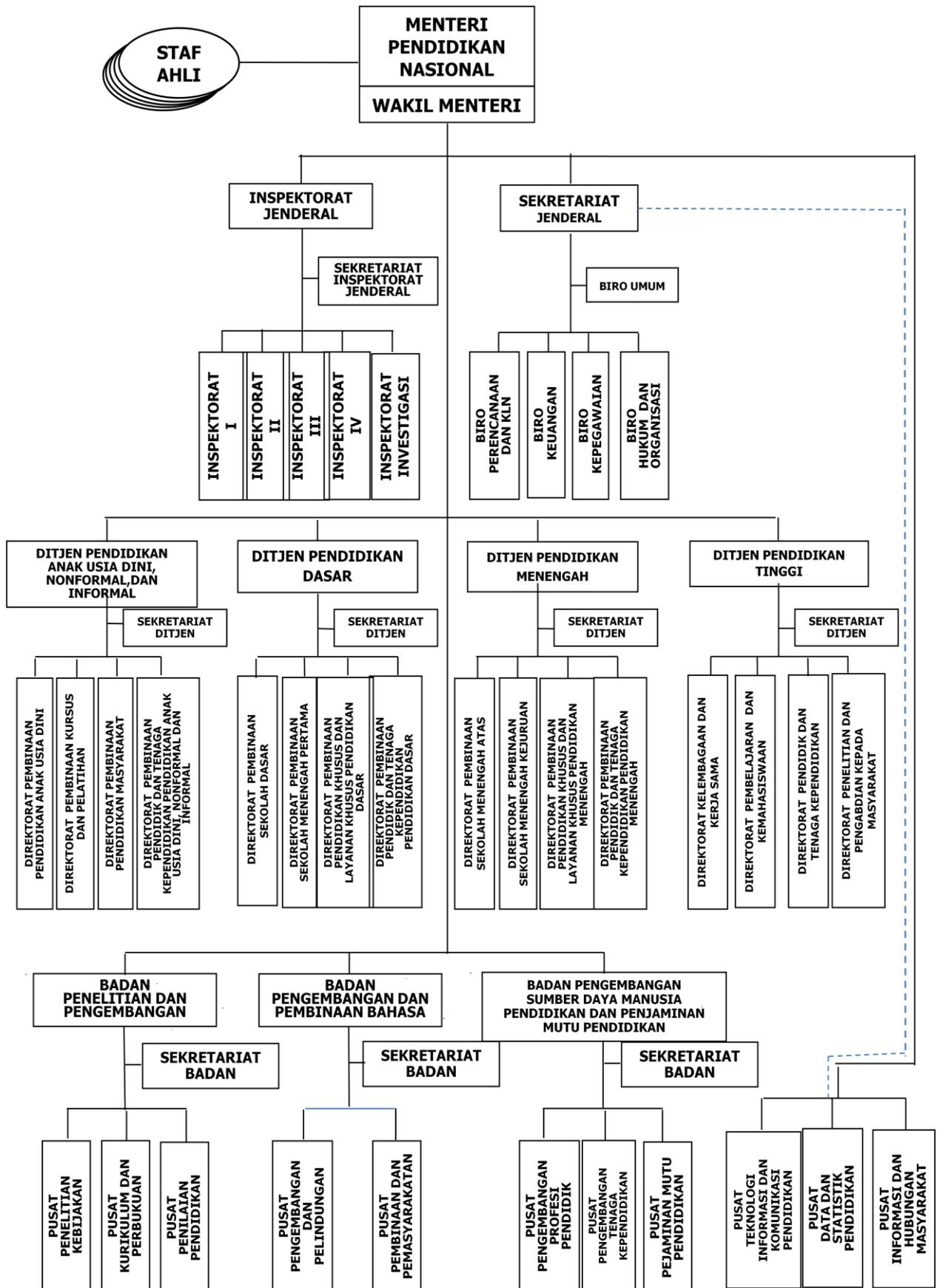
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia pasal 31, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pendidikan merupakan hak asasi manusia setiap warga negara, untuk itu setiap warga negara berhak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan pemerintah wajib menyediakan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dan Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Kementerian Pendidikan Nasional mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan nasional
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian Pendidikan Nasional
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan Nasional di daerah; dan
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional

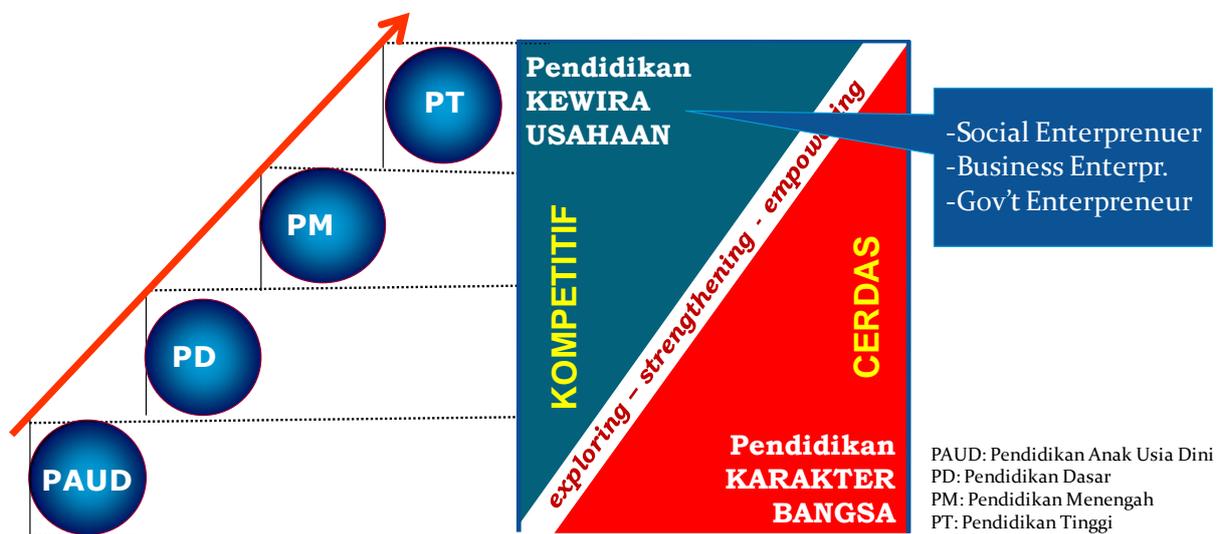
Sejalan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas, Kemdiknas telah menyusun organisasi tata kerja seperti diatur pada Permendiknas Nomor 36 tahun 2010 yang meliputi:

1. Wakil Menteri
2. Sekretariat Jenderal
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
6. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
7. Inspektorat Jenderal
8. Badan Penelitian dan Pengembangan
9. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
10. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
11. Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi
12. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
13. Pusat Data dan Statistik Pendidikan
14. Staf Ahli Bidang Hukum
15. Staf Ahli Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan
16. Staf Ahli Bidang Kerjasama Internasional
17. Staf Ahli Bidang Organisasi dan Manajemen; dan
18. Staf Ahli Bidang Budaya dan Psikologi pendidikan.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kemdiknas

Mengacu pada UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) telah menyusun Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025. Kemdiknas menjabarkan RPPNJP menjadi empat tema pembangunan pendidikan, yaitu tema pembangunan I (2005-2009) dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan modernisasi; tema pembangunan II (2010-2015) dengan fokus pada penguatan pelayanan; tema pembangunan III (2015-2020) dengan fokus pada penguatan daya saing regional; dan tema pembangunan IV (2020-2025) dengan fokus pada penguatan daya saing internasional. Dengan adanya pergeseran orientasi dari berdasarkan sisi pasokan (*supply oriented*) bergeser menjadi berdasarkan kebutuhan (*demand oriented*), Kemdiknas telah merencanakan pembangunan pendidikan secara komprehensif dengan cara memberikan layanan kebutuhan siswa, pendidik, tenaga kependidikan dan orang tua. Ilustrasi pembangunan pendidikan secara komprehensif dapat dilihat pada gambar 1.2 di bawah ini.



Gambar 1.2 Pembangunan Pendidikan Komprehensif
(Sumber: Renstra Kemdiknas 2010-2014)

Rencana Pembangunan Pendidikan I (2005-2009) dengan fokus peningkatan kapasitas dan modernisasi telah selesai dilaksanakan Kementerian Pendidikan Nasional sampai pada akhir tahun 2009. Banyak capaian yang dihasilkan sampai dengan tahun 2009 seperti peningkatan APK PAUD sampai dengan 53.70%, APM SD/MI/SDLB/Paket A sebesar 95.23%, APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B sebesar 98.11%, APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C sebesar 69.60%, APK PT/PTA termasuk UT sebesar 18.36% dan lain-lain. Meskipun telah banyak capaian yang dihasilkan dari 3 (tiga) kebijakan pendidikan nasional: perluasan dan pemerataan akses pendidikan; peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan; dan penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan, tetapi masih banyak tantangan-tantangan, dalam bidang pendidikan yang harus dihadapi maupun diselesaikan di masa datang, seperti memenuhi komitmen global untuk pencapaian sasaran-sasaran *Millenium Development Goals (MDGs)*, *Education For All (EFA)* dan *Education for Sustainable Development (EfSD)*.



Salah satu contoh bentuk pendidikan berkarakter

Guna melanjutkan pembangunan pendidikan yang belum tercapai pada rencana pembangunan pendidikan I (2005-2009) dan juga untuk merealisasikan rencana pembangunan II yang berfokus pada penguatan pelayanan, Kemdiknas telah menyusun rencana strategis 2010-2014. Layanan pendidikan yang difokuskan pada: **tersedianya** pendidikan secara merata diseluruh pelosok nusantara; **terjangkaunya** pendidikan oleh seluruh lapisan masyarakat; **berkualitas/bermutu dan relevan** pendidikan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri; **setara** bagi warga negara dalam memperoleh pendidikan berkualitas, menjamin **kepastian** bagi warga negara indonesia mengenyam pendidikan dan meyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

Sejalan dengan pemberian layanan dalam bidang pendidikan, Kemdiknas berupaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi di lingkungan Kemdiknas. Reformasi yang bertujuan untuk menghasilkan suatu sistem yang dapat mendukung tercapainya efisiensi nasional dalam bidang pendidikan. Reformasi yang dilaksanakan Kemdiknas mencakup perubahan atas 3 (tiga) aspek yaitu Penguatan Organisasi, Pembinaan Ketatalaksanaan, dan Penataan dan Penguatan SDM. Reformasi tersebut juga dirancang untuk dapat melaksanakan 5 (lima) misi Kemdiknas yaitu Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan, dengan cara seefisien dan seefektif mungkin.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pendidikan Nasional ini memuat laporan kinerja yang telah dicapai sampai dengan tahun 2010, capaian kinerja yang diukur dengan indikator-indikator kinerja seperti Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk semua program dan kegiatan yang dilaksanakan, sebagaimana dituangkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemdiknas 2010-2014 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Bidang Pendidikan Tahun 2010.

Selain pencapaian tersebut di atas, khusus Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemdiknas tahun 2010 juga melaporkan capaian kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja antara Menteri Pendidikan nasional dan Presiden Republik Indonesia dan Capaian Kinerja 100 hari Bidang Pendidikan serta Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi Kemdiknas.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA KEMDIKNAS

A. PERENCANAAN KINERJA

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) selaku penanggung jawab sistem pendidikan nasional memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan bermutu bagi semua warga negara, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kemdiknas menyusun Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) Tahun 2005-2025, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, khususnya tema pembangunan II (2010-2014) dengan fokus pada penguatan pelayanan. Tema pembangunan dan penetapan tahapan tersebut selanjutnya disesuaikan dengan RPJMN 2010-2014 dan perkembangan kondisi yang akan datang.

RPJMN Tahun 2010-2014 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya perekonomian. Selanjutnya RPJMN Tahun 2010-2014 dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional (Renstra Kemdiknas) Tahun 2010-2014, yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.

1. Rencana Strategis

Renstra Kemdiknas mencakup visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, kebijakan pokok, program jangka menengah, dan indikator kinerja. Renstra Kemdiknas berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun, yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Di dalamnya juga memperhitungkan berbagai potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul dalam rentang waktu tersebut. Selain itu, Renstra juga menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan pendidikan nasional serta mengevaluasi hasilnya.

a. Visi, Misi, dan Tata Nilai Pendidikan Nasional

Kemdiknas memiliki visi yang ingin dicapai pada tahun 2025, yaitu: **Menciptakan Insan Indonesia Cerdas Komprehensif dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna).**

Visi Kemdiknas ini lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yang menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan masyarakat dari keterbelakangan menuju kondisi masyarakat yang modern dan beradab.

Dari sisi hasil, visi Kemdiknas menekankan pada paradigma pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Konsep manusia seutuhnya itu meletakkan manusia sebagai subjek yang memiliki potensi untuk mengaktualisasikan dirinya secara optimal. Potensi yang

dikembangkan mencakup tiga aspek paling elementer. Pertama, aspek afektif, yang tercermin pada kualitas keimanan dan ketakwaan, etika dan estetika, serta akhlak mulia dan budi pekerti luhur. Kedua, aspek kognitif, yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan, serta menguasai teknologi. Ketiga, aspek psikomotorik, yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis dan kecakapan praktis.

Terkait hal itu, maka pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mengembangkan seluruh potensi kecerdasan manusia secara komprehensif. Di dalamnya mencakup pengembangan kecerdasan otak kiri yang lebih dikenal dengan kecerdasan intelektual (kemampuan kognitif), dan kecerdasan otak kanan yang akhir-akhir ini dikenal dengan sebutan kecerdasan spiritual, sosial, emosional, estetis, dan kinestetis.

Pembangunan pendidikan nasional juga diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan bagi peserta didik. Ini merupakan landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah mempunyai kewajiban konstitusional untuk memberikan layanan pendidikan yang dapat dijangkau oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilaksanakan Kementerian Pendidikan Nasional. Upaya ini juga sejalan dengan komitmen *Education For All* (EFA) dari UNESCO.

Tabel 2.1 Makna Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif

Makna Insan Indonesia Cerdas		Makna Insan Indonesia Kompetitif
Cerdas Spriritual	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul 	<ul style="list-style-type: none"> Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan Bersemmangat juang tinggi Mandiri Pantang menyerah Pembangun dan pembina jejaring Bersahabat dengan perubahan Inovasi dan menjadi agen perubahan Produktif Sadar mutu Berorientasi global Pembelajaran sepanjang hayat Menjadi rahmat bagi semesta alam
Cerdas Emosional dan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya. Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang (a) membina dan memupuk hubungan timbal balik; (b) demokratis; (c) empatik dan simpatik; (d) menjunjung tinggi hak asasi manusia; (e) ceria dan percaya diri; (d) menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; (e) berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara 	
Cerdas intelektual	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif dan imajinatif. 	
Cerdas kinestetis	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil, dan trengginas. Aktualisasi insan adiraga. 	

Kemdiknas telah menetapkan visi yang akan dicapai pada tahun 2014, yaitu:

“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif”

Layanan prima pendidikan nasional adalah layanan pendidikan yang memiliki indikator sebagai berikut ini.

- 1) Tersedia secara merata di seluruh pelosok nusantara
- 2) Terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
- 3) Kualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri
- 4) Setara bagi warga negara Indonesia memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial budaya, ekonomi, geografi, gender, dan sebagainya; dan
- 5) Menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

Untuk mewujudkan visi Kementerian Pendidikan Nasional 2014, Misi Kemdiknas 2010-2014 dikemas dalam “Misi 5K” sebagai berikut.

Tabel 2.2 Misi Kemdiknas

KODE	MISI
M1	Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan
M2	Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan
M3	Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan
M4	Meningkatkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan
M5	Meningkatkan Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan

Kemendiknas menyadari bahwa visi dan misi tersebut dapat terwujud apabila didukung dengan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung usaha-usaha pelaksanaan misi dan pencapaian visi. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan. Tata nilai yang dimaksud adalah **amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif, dan berkeadilan**.

Dengan merujuk pada fokus pembangunan pendidikan tahun 2010–2014, dari ke enam tata nilai tersebut dipilih tata nilai yang sesuai dengan fokus pada periode ini dan dirangkum dalam satu kalimat motto Kemendiknas, yaitu: **Melayani Semua Dengan Amanah**.

b. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2010-2014

Untuk merealisasikan visi dan misi Kemdiknas, Kementerian menetapkan 7 (tujuh) tujuan strategis dan 67 sasaran strategis 2010-2014, agar secara lebih jelas dapat menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.

Tujuan strategis Kemdiknas 2010-2014 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi 2014 Kemendiknas dengan memperhatikan rumusan misi Kemdiknas 2010-2014. Dengan demikian, tujuan strategis Kemdiknas 2010-2014 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3 Tujuan Strategis

KODE	TUJUAN STRATEGIS
T1	Tersedia dan terjangkau layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota.
T2	Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota.
T3	Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota.
T4	Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional dan berkesetaraan di semua provinsi.
T5	Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
T6	Terwujudnya Bahasa Indonesia sebagai jati diri dan martabat bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah, serta wahana pengembangan IPTEKS.
T7	Tersedianya sistem tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional.

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2014. Sasaran strategis untuk setiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut.

1) Sasaran Strategis Untuk Mencapai Tujuan Strategis T1

Tabel 2.4 Sasaran Strategis untuk tujuan strategis T1

KODE	SASARAN STRATEGIS
S1.1	Meningkatnya APK PAUD nasional mencapai 45.05%.
S1.2	Meningkatnya kualifikasi untuk pendidik PAUD formal (TK/TKLB) diharapkan 85% berpendidikan minimal S-1/D-4 dan 85% bersertifikat, sedangkan untuk Pendidik PAUD nonformal diharapkan telah dilatih sekurang-kurangnya 55%.
S1.3	Seluruh satuan pendidikan anak usia dini formal menerapkan sistem pembelajaran yang membangun karakter (kejujuran, kepedulian, tanggung jawab dan toleransi) dan menyenangkan bagi anak.

2) Sasaran Strategis Untuk Mencapai Tujuan Strategis T2

Tabel 2.5 Sasaran Strategis untuk tujuan strategis T2

KODE	SASARAN STRATEGIS
S2.1	Meningkatnya APM SD/SDLB/Paket A nasional mencapai 83.57%.
S2.2	Menurunnya APS Kelompok Usia 7-12 Tahun mencapai 0.7%.
S2.3	Meningkatnya APK SMP/SMPLB/Paket B nasional mencapai 76.53%
S2.4	Meningkatnya APM SMP/SMPLB/Paket B/Sederajat mencapai 58.17%.
S2.5	Menurunnya APS Kelompok Usia 13-15 Tahun 1%.
S2.6	Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SD/SDLB dan SMP/SMPLB mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan
S2.7	Menurunnya Angka Putus Sekolah SD maksimal 0,7% dan SMP maksimal 1%, meningkatnya angka melanjutkan SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B sekurang-kurangnya 97%.
S2.8	Angka Melanjutkan Lulusan SMP/MTs/SMPLB/Sederajat 94%.

KODE	SASARAN STRATEGIS
S2.9	Sekurang-kurangnya 85% SD/SDLB dan 90% SMP/SMPLB diakreditasi.
S2.10	Sekurang-kurangnya 90% SD/SDLB dan 100% SMP/SMPLB terakreditasi minimal B.
S2.11	Sekurang-kurangnya 40% SD/SDLB dan 60% SMP/SMPLB melaksanakan e-pembelajaran.
S2.12	Sekurang-kurangnya 85% kabupaten/kota memiliki SD SBI atau RSBI.
S2.13	Sekurang-kurangnya 75% kabupaten/kota memiliki SMP SBI atau RSBI.
S2.14	Sekurang-kurangnya 82% Guru SD/SDLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 80% bersertifikat.
S2.15	Sekurang-kurangnya 98% Guru SMP/SMPLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 90% bersertifikat.
S2.16	Sekurang-kurangnya 60% Kab/Kota Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Peserta Didik SD 1:20 Sampai 1:28 dan SMP 1:20 Sampai 1:32.
S2.17	Meningkatnya tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan meningkatnya angka melanjutkan minimal 95 % dan menurunnya angka putus sekolah maksimal 1 % untuk jenjang pendidikan dasar.
S2.18	Seluruh satuan pendidikan SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs menerapkan pembelajaran yang membangun karakter.

3) Sasaran Strategis Untuk Mencapai Tujuan Strategis T3

Tabel 2.6 Sasaran Strategis untuk tujuan strategis T3

KODE	SASARAN STRATEGIS
S3.1	Meningkatnya APK nasional melampaui 70,7%.
S3.2	Sekurang-kurangnya 95.5% SMA/SMLB berakreditasi, dan 40%-nya berakreditasi minimal B.
S3.3	Sekurang-kurangnya 95.5% SMK berakreditasi, dan 30%-nya berakreditasi minimal B.
S3.4	Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SMA/SMLB dan SMK mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan.
S3.5	Sekurang-kurangnya 70% kabupaten/kota memiliki SMA dan SMK SBI atau RSBI.
S3.6	Sekurang-kurangnya 98% guru SMA/SMLB/SMK berkualifikasi S-1/D-4, dan sekurang-kurangnya 90% bersertifikat.
S3.7	Seluruh SMK bersertifikat ISO 9001:2008.
S3.8	Sekurang-kurangnya 75% SMA/SMLB dan 70% SMK melaksanakan e-pembelajaran.
S3.9	Sekurang-kurangnya 70% Lulusan SMK Bekerja pada Tahun Kelulusan.
S3.10	Seluruh SMK menyediakan layanan pembinaan pengembangan kewirausahaan.
S3.11	Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SMA/SMALB dan SMK mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan.
S3.12	Meningkatnya tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan meningkatnya angka melanjutkan minimal 95 % dan menurunnya angka putus sekolah maksimal 1,69 % untuk jenjang pendidikan menengah.
S3.13	Menurunnya disparitas gender yang ditunjukkan dengan rasio kesetaraan gender menjadi 95%.
S3.14	Seluruh satuan pendidikan SMA/SMLB/MA/MAK menerapkan pembelajaran yang membangun karakter.

4) Sasaran Strategis Untuk Mencapai Tujuan Strategis T4

Tabel 2.7 Sasaran Strategis untuk tujuan strategis T4

KODE	SASARAN STRATEGIS
S4.1	Meningkatnya APK PT dan PTA usia 19-23 tahun mencapai 30%.
S4.2	Sekurang-kurangnya 100% PTN dan 50% PTS memperoleh Sertifikat ISO 9001:2008.
S4.3	Sekurang-kurangnya 100% prodi PT berakreditasi dan 80% berakreditasi minimal B.
S4.4	Sekurang-kurangnya 3 PT masuk peringkat 300 terbaik dunia dan sekurang-kurangnya 11 PT (kumulatif) masuk dalam peringkat 600 terbaik dunia versi THES, sekurang-kurangnya 12 PT masuk dalam 200 terbaik Asia versi THES.
S4.5	Sekurang-kurangnya 94% dosen program S-1 dan program diploma berkualifikasi minimal S-2.
S4.6	Sekurang-kurangnya 15% dosen pasca sarjana (S-2, profesi, spesialis, dan S-3) berkualifikasi S-3.
S4.7	Sekurang-kurangnya 75% dosen PT telah bersertifikat profesi.
S4.8	Meningkatkan persentase dosen dengan publikasi nasional menjadi 50%.
S4.9	Meningkatkan persentase dosen dengan publikasi internasional menjadi 0.8%.

KODE	SASARAN STRATEGIS
S4.10	Menurunnya disparitas gender yang ditunjukkan dengan rasio kesetaraan gender menjadi 104 %.
S4.11	Seluruh Perguruan Tinggi menerapkan pembelajaran yang membangun karakter dan kewirausahaan.

5) Sasaran Strategis Untuk Mencapai Tujuan Strategis T5

Tabel 2.8 Sasaran Strategis untuk tujuan strategis T5

KODE	SASARAN STRATEGIS
S5.1	Sekurang-kurangnya 30% program keahlian lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi, dan 25% lulusan program kecakapan hidup (PKH) bersertifikat kompetensi.
S5.2	Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah mengarusutamakan gender dalam pendidikan.
S5.3	Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah memberikan layanan fasilitasi <i>parenting education</i> .

6) Sasaran Strategis Untuk Mencapai Tujuan Strategis T6

Tabel 2.9 Sasaran Strategis untuk tujuan strategis T6

KODE	SASARAN STRATEGIS
S6.1	Sekurang-kurangnya 80 % bahasa daerah di Indonesia terpetakan.
S6.2	Sekurang-kurangnya 20% guru bahasa Indonesia memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sesuai standar nasional.
S6.3	Sekurang-kurangnya 6 majalah bahasa dan sastra nasional diterbitkan secara berkala.
S6.4	Sekurang-kurangnya 50 negara memiliki pusat pembelajaran Bahasa Indonesia.

7) Sasaran Strategis Untuk Mencapai Tujuan Strategis T7

Tabel 2.10 Sasaran Strategis untuk tujuan strategis T7

KODE	SASARAN STRATEGIS
S7.1	Terwujudnya opini audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012
S7.2	Meningkatnya skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sekurang-kurangnya 79.
S7.3	Seluruh Kementerian/Lembaga mengacu pada Renstra pembangunan pendidikan nasional dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan.
S7.4	Seluruh Kabupaten dan Kota telah melaksanakan SPM Pendidikan Dasar.

Penetapan sasaran ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang berkualitas dan relevan dengan memperhatikan inklusifitas di semua provinsi, kabupaten, dan kota akan memberikan efek resultan yang dinyatakan dalam sasaran-sasaran strategis gabungan sebagai berikut. Sasaran strategis gabungan ini diperlukan terutama untuk mengukur indeks pembangunan manusia.



Guru PAUD memberikan pengajaran

8) Sasaran Strategis Untuk Mencapai Tujuan Strategis Gabungan

Tabel 2.11 Sasaran Strategis untuk tujuan strategis gabungan

KODE	SASARAN STRATEGIS
SG.1	Meningkatnya APK gabungan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi sekurang-kurangnya 86,3%.
SG.2	Rata-rata lama sekolah sekurang-kurangnya 8,25 tahun.
SG.3	Meningkatnya tingkat literasi nasional usia \geq 15 tahun 95,8%.

c. Program dan Kegiatan Pendukung

Dalam pencapaian tujuan strategis dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Renstra Kemdiknas 2010-2014, Kementerian melaksanakan sembilan Program Pembangunan Pendidikan, yaitu:

Tabel 2.12 Program Kemdiknas

KODE	PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
P1	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal Dan Informal	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal Dan Informal
P2	Program Pendidikan Dasar	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
P3	Program Pendidikan Menengah	Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
P4	Program Pendidikan Tinggi	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
P5	Program Pengembangan SDM Pendidikan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Badan Pengembangan SDM Pendidikan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P6	Program Penelitian Dan Pengembangan	Badan Penelitian Dan Pengembangan
P7	Program Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Dan Sastra	Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Dan Sastra
P8	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sekretariat Jenderal
P9	Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Inspektorat Jenderal

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal

Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal merupakan program Kementerian yang teknis pelaksanaannya berada di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal.

Program ini dilaksanakan guna mendukung pencapaian dua tujuan Kementerian, yaitu:

- a. Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD Bermutu dan Berkesetaraan di semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T1)
- b. Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat (T5).

Kementerian melaksanakan program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, dengan menetapkan enam kegiatan pendukung, yang dilaksanakan oleh sekretariat direktorat jenderal, dan empat direktorat dalam Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal dan UPT yang berada dibawah tanggung jawabnya.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal adalah:

- 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Dan Informal
- 2) Layanan Pengkajian, Pengembangan Dan Pengendalian Mutu PAUD-NI
- 3) Penyediaan Layanan PAUD
- 4) Penyediaan Layanan Kursus Dan Pelatihan
- 5) Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat
- 6) Penyediaan Dan Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal

2) Program Pendidikan Dasar

Program Pendidikan Dasar merupakan program Kementerian yang teknis pelaksanaannya berada di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. Tetapi pada tahun 2010 Program Pendidikan Dasar masih berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Program ini dilaksanakan guna mendukung tercapainya tujuan kedua (T2), yaitu terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota.

Kementerian telah menetapkan lima kegiatan yang mendukung Program Pendidikan Dasar, yang dilaksanakan dilakukan oleh sekretariat direktorat jenderal dan empat direktorat dalam Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.

Berikut adalah kegiatan-kegiatan pendukung dalam Program Pendidikan Dasar.

- 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dikdas
- 2) Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD
- 3) Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP
- 4) Peningkatan Akses Dan Mutu PK DAN PLK SDLB/SMPLB
- 5) Penyediaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik Dan Tendik yang Kompeten Untuk Jenjang Pendidikan Dasar.

3) Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Menengah adalah program Kementerian yang teknis pelaksanaannya berada di Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah. Tetapi pada tahun 2010 Program Pendidikan Dasar masih berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan ketiga (T3), yaitu tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota.

Dalam usaha mencapai target setiap Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis dalam program Pendidikan Menengah, Kementerian telah menetapkan 5 (lima) kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh sekretariat direktorat jenderal dan empat direktorat yang ada pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah. Kegiatan-kegiatan yang mendukung Program Pendidikan Menengah adalah:

- 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Menengah
- 2) Penyediaan Dan Peningkatan Pendidikan SMA
- 3) Penyediaan Dan Peningkatan Pendidikan SMK
- 4) Peningkatan Akses Dan Mutu PK DAN PLK SMLB
- 5) Penyediaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik Dan Tendik Yang Kompeten Untuk Jenjang Pendidikan Menengah.

4) Program Pendidikan Tinggi

Program Pendidikan Tinggi merupakan program Kementerian yang teknis pelaksanaannya berada di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan strategis Kementerian keempat (T4), yaitu tersedia dan terjangkau layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional, dan berkesetaraan di semua provinsi.

Dalam usaha mencapai target setiap Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis dalam program Pendidikan Tinggi, Kementerian telah menetapkan Sembilan kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh sekretariat direktorat Jenderal dan empat direktorat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kegiatan-kegiatan yang mendukung Program Pendidikan Tinggi adalah:

- 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- 2) Layanan Tridharma Di Perguruan Tinggi
- 3) Pengembangan Relevansi Dan Efisiensi Pendidikan Tinggi
- 4) Penyediaan Layanan Pembelajaran Dan Kompetensi Mahasiswa
- 5) Pengembangan Mutu Pendidikan Politeknik
- 6) Pengembangan Mutu Prodi Profesi Kesehatan Dan Pendidikan Kesehatan
- 7) Penyediaan Dosen Dan Tenaga Kependidikan Bermutu
- 8) Penyediaan Layanan Kelembagaan Dan Kerjasama
- 9) Pengembangan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

5) Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan program Kementerian yang teknis pelaksanaannya berada di Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan dan UPT yang

berada dibawah tanggungjawabnya. Pada tahun 2010 Program Pengembangan SDM Pendidikan dan PMP pelaksanaannya masih berada di Ditjen PMPTK. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya empat tujuan strategis Kementerian, yaitu:

- a. Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD Bermutu dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T1)
- b. Terjaminnya Layanan Pendidikan Dasar Bermutu dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T2)
- c. Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang Bermutu, Relevan dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T3)
- d. Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat (T5).

Dalam usaha mencapai target setiap Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis dalam program Pendidikan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian telah menetapkan enam kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh sekretariat dan tiga pusat Eselon II pada Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan dan. Kegiatan-kegiatan yang mendukung Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan adalah:

- 1) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya badan pengembangan SDM pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan
- 2) Peningkatan penjaminan mutu pendidikan
- 3) Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan
- 4) Pembinaan dan pengembangan profesi pendidik
- 5) Penjaminan mutu pendidikan
- 6) Pembinaan dan pengembangan profesi tenaga kependidikan.

6) Program Penelitian dan Pengembangan

Program Penelitian dan Pengembangan merupakan satu dari Sembilan program Kementerian yang teknis pelaksanaannya berada di Badan Penelitian dan Pengembangan. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya lima tujuan strategis Kementerian yaitu:

- a. Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD Bermutu dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T1)
- b. Terjaminnya Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan Dasar Bermutu dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T2)
- c. Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang Bermutu, Relevan, dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T3)
- d. Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Tinggi Bermutu, Relevan, Berdaya Saing Internasional dan Berkesetaraan di Semua Provinsi (T4)
- e. Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat (T5).

Kementerian telah menetapkan empat kegiatan pendukung pada program Penelitian dan Pengembangan, yang dilaksanakan oleh sekretariat Badan dan tiga pusat eselon II pada Badan Penelitian dan Pengembangan. Kegiatan-kegiatan yang mendukung Program Penelitian dan Pengembangan adalah:

- 1) Fasilitasi Standar Mutu Dan Pelaksanaan Akreditasi
- 2) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penelitian Dan Pengembangan Kemdiknas
- 3) Penyempurnaan Kurikulum Dan Sistem Pembelajaran
- 4) Penyediaan Informasi untuk Perumusan Kebijakan Nasional Penyediaan Informasi Hasil Penilaian Pendidikan.

7) Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra

Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra merupakan satu dari sembilan program Kementerian yang teknis pelaksanaannya berada di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra. Pada tahun 2010 Program ini pelaksanaannya masih berada di Sekretariat Jenderal. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan strategis Kementerian keenam (T6), yaitu terwujudnya Bahasa Indonesia sebagai jati diri dan martabat bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah, serta wahana pengembangan IPTEKS.

Kementerian telah menetapkan tiga kegiatan pendukung pada program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra yang dilaksanakan oleh Sekretariat Badan dan dua Pusat eselon II dalam Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kegiatan-kegiatan yang mendukung Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra adalah:

- 1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra
- 2) Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
- 3) Pembinaan Bahasa dan Sastra.

8) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemdiknas

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemdiknas merupakan program kementerian yang pelaksanaannya berada di Sekretariat Jenderal. Program ini dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program yang ada di setiap unit utama dan mendukung tercapainya tujuan penguatan tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan (T6).

Dalam usaha mencapai target setiap Sasaran Strategis dan Tujuan dalam program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Kemdiknas, Kementerian telah menetapkan sepuluh kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh masing-masing Biro dan Pusat. Kegiatan-kegiatan yang mendukung program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Kemdiknas adalah:

- 1) Peningkatan Layanan Prima Dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian;
- 2) Peningkatan Layanan Prima Dalam Pengadaan Dan Penataan Bmn Serta Sarana Dan Prasarana Kementerian;
- 3) Peningkatan Pelayanan Prima Dalam Perencanaan, Penganggaran, Dan Kerja Sama Luar Negeri;
- 4) Peningkatan Pelayanan Prima Bidang Pengelolaan Anggaran Dan Akuntabilitas;

- 5) Peningkatan Pengelolaan Dan Pembinaan Kepegawaian Yang Andal;
- 6) Peningkatan Layanan Prima Di Bidang Hukum Dan Organisasi;
- 7) Penyediaan Data Dan Statistik Pendidikan;
- 8) Peningkatan Layanan Prima Di Bidang Informasi Dan Kehumasan;
- 9) Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendayagunaan E-Pembelajaran Dan E-Administrasi;
- 10) Pengembangan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PJJ) di Asia Tenggara.

9) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemdiknas

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemdiknas merupakan program kementerian yang pelaksanaannya berada di Inspektorat Jenderal. Program ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis penguatan tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan (T7).

Dalam usaha mencapai target Sasaran Strategis dan Tujuan Strategis dalam program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemdiknas, Kementerian telah menetapkan enam kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh sekretariat inspektorat dan lima Inspektorat dalam inspektorat jenderal. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemdiknas.

- 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen;
- 2) Penguatan Dan Perluasan Pengawasan Yang Akuntabel Wilayah I;
- 3) Penguatan Dan Perluasan Pengawasan Yang Akuntabel Wilayah II;
- 4) Penguatan Dan Perluasan Pengawasan Yang Akuntabel Wilayah III;
- 5) Penguatan Dan Perluasan Pengawasan Yang Akuntabel Wilayah IV;
- 6) Audit Investigasi.

2. Rencana Kinerja Tahunan

Mengacu pada Renstra Kemdiknas tahun 2010-2014, Kementerian berusaha untuk mencapai tujuh tujuan strategis dan 68 sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap tahunnya. Berikut adalah Rencana Kinerja Tahunan Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010 yang dikelompokkan ke dalam sembilan Program Kementerian.

A. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Tabel 2.13 Program PAUDNI

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)		(2)	(3)
S1.1	Meningkatnya APK PAUD (TK,KB,TPA,SPS) nasional mencapai 45,05%	1 APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)	29,60%
		2 Lembaga PAUD yang berakreditasi	0,5%
		3 Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Program PAUD-NI	40%
		4 Persentase PTK PAUD-NI yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	11,75%
		5 Persentase PTK PAUD-NI Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan	1,36%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(3)
S5.1	Sekurang-kurangnya 30% program keahlian lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi, dan 25% lulusan program kecakapan hidup (PKH) bersertifikat kompetensi	1 Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan Berakreditasi	2,0%
		2 Persentase Anak Lulus SMP Tidak Melanjutkan, Putus dan atau Lulus Sekolah Menengah Tidak Melanjutkan Mendapatkan Layanan Pendidikan Keterampilan Berbasis Kecakapan Hidup	12%
S5.2	Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah mengarusutamakan gender dalam pendidikan	1 Persentase Kab/Kota Yang Menerapkan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	14%
S5.3	Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah memberikan layanan fasilitasi <i>parenting education</i>	1 Persentase Kab/Kota Yang Telah Menyelenggarakan Parenting Education	0%
SG.3	Meningkatnya tingkat literasi nasional usia \geq 15 tahun 95,8%	1 Persentase Penduduk Buta Aksara Usia > 15 Tahun	5,0%
		2 % Kabupaten/Kota Yang Telah Memiliki Minimal 10 TBM	34,0%
		3 Persentase PKBM Berakreditasi	40%

B. Program Pendidikan Dasar

Tabel 2.14 Program DIKDAS

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(3)
S2.1	Meningkatnya APM SD/SDLB/Paket A nasional	1 APM SD/SDLB/Paket A	82,94%
S2.2	Menurunnya APS Kelompok Usia 7-12 Tahun mencapai 0,7%	1 Persentase Peserta Didik SD/SDLB Putus Sekolah	1,5%
S2.3	Meningkatnya APK SMP/SMPLB/Paket B nasional mencapai 76,53%	1 APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	71,98%
S2.4	Meningkatnya APM SMP/SMPLB/Paket B/Sederajat mencapai 58,17%	1 APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	55,97%
S2.5	Menurunnya APS Kelompok Usia 13-15 Tahun 1%	1 Persentase Peserta Didik SMP/SMPLB Putus Sekolah	1,8%
S2.7	Menurunnya Angka Putus Sekolah SD maksimal 0,7% dan SMP maksimal 1%, meningkatnya angka melanjutkan SD/SDLB sekurang-kurangnya 97%	1 Persentase Peserta Didik SD/SDLB Putus Sekolah	1,5%
		2 Persentase Peserta Didik SMP/SMPLB Putus Sekolah	1,8%
		3 Persentase Lulusan SD/SDLB yang Melanjutkan Pendidikan	91%
S2.8	Meningkatnya angka Melanjutkan Lulusan SMP/SMPLB ke sekolah menengah sekurang-kurangnya 94%	1 Persentase Lulusan SMP/SMPLB yang Melanjutkan ke Sekolah Menengah	88%
S2.9	Sekurang-kurangnya 85% SD/SDLB dan 90% SMP/SMPLB diakreditasi	1 Persentase SD/SDLB Berakreditasi	45%
		2 Persentase SMP/SMPLB Berakreditasi	21,3%
S2.10	Sekurang-kurangnya 90% SD/SDLB dan 100% SMP/SMPLB terakreditasi minimal B	1 Persentase SD/SDLB Berakreditasi Minimal B	28%
		2 Persentase SMP/SMPLB Berakreditasi Minimal B	30%
S2.11	Sekurang-kurangnya 40% SD/SDLB dan 60% SMP/SMPLB melaksanakan e-pembelajaran	1 Persentase SD Menerapkan e-Pembelajaran	16%
		2 Persentase SD memiliki fasilitas internet	10%
		3 Persentase SMP Menerapkan e-Pembelajaran	20%
		4 Persentase SMP memiliki fasilitas internet	20%
S2.12	Sekurang-kurangnya 85% kabupaten/kota memiliki SD SBI atau RSBI	1 Persentase Kabupaten/Kota memiliki minimal satu SD RSBI/SBI	39,4%
		2 Nilai total tertimbang dari kompetensi internasional tingkat pendidikan dasar	160
S2.13	Sekurang-kurangnya 75% kabupaten/kota memiliki SMP SBI atau RSBI	1 Persentase Kabupaten/Kota memiliki minimal satu SMP RSBI/SBI	50%
		2 Nilai total tertimbang dari kompetensi internasional tingkat pendidikan dasar	160

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)		(2)	(3)
S2.14	Sekurang-kurangnya 82% Guru SD/SDLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 80% bersertifikat	1 Persentase guru SD/SDLB Dalam Jabatan Berkualifikasi Akademik S-1/D-4	36%
		2 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima tunjangan	100%
S2.15	Sekurang-kurangnya 98% Guru SMP/SMPLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 90% bersertifikat;	1 Persentase guru SMP/SMPLB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4	77%
		2 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima tunjangan	100%
S2.16	Sekurang-kurangnya 60% Kab/Kota Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Peserta Didik SD 1:20 Sampai 1:28 dan SMP 1:20 Sampai 1:32;	1 Persentase SD Yang Memiliki Rasio Guru Terhadap Siswa Sesuai SPM	3%
		2 Rasio Guru Terhadap Siswa SD	1:33
		3 Persentase SMP Yang Memiliki Rasio Guru Terhadap Siswa Sesuai SPM	3%
		4 Rasio Guru Terhadap Siswa SMP	1:34
S2.17	Meningkatnya tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan meningkatnya angka melanjutkan minimal 95 %. dan menurunnya angka putus sekolah maksimal 1 % untuk jenjang pendidikan dasar	1 Persentase Peserta Didik SD/SDLB Putus Sekolah	1,5%
		2 Persentase Lulusan SD/SDLB yang Melanjutkan	91%
S5.2	Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah mengarusutamakan gender dalam pendidikan;	1 Rasio kesetaraan gender SD/SDLB	97,2%
S7.4	Seluruh Kabupaten dan Kota telah melaksanakan SPM Pendidikan Dasar	1 Persentase SD/SDLB Memenuhi SPM	60%
		2 Persentase SMP/SMPLB Memenuhi SPM	55%
		3 Persentase SD Yang Memiliki Rasio Guru Terhadap Siswa Sesuai SPM	3%
		4 Persentase SMP Yang Memiliki Rasio Guru Terhadap Siswa Sesuai SPM	3%
		5 Persentase Kab/Kota Yang Memiliki Tenaga Kependidikan Sesuai SPM	25%
SG.1	Meningkatnya APK gabungan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi sekurang-kurangnya 86,3%,	1 APM SD/SDLB/Paket A	82,94%
		2 APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	71,98%
		3 APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	55,97%

C. Program Pendidikan Menengah

Tabel 2.15 Program DIKMEN

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)		(2)	(3)
S3.1	Meningkatnya APK nasional melampaui 70.7%,	1 APK SMA/SMLB/SMK/Paket C	61,8%
S3.2	Sekurang-kurangnya 95.5% SMA/SMLB berakreditasi, dan 40%-nya berakreditasi minimal B	1 Persentase SMA/SMLB Berakreditasi	70,7%
		2 Persentase SMA/SMLB Berakreditasi Minimal B	23,4%
		3 Persentase kab/kota memiliki minimal 1 SMA berbasis keunggulan lokal	12,0%
		4 Rasio guru terhadap siswa SM	1:28
S3.3	Sekurang-kurangnya 95.5% SMK berakreditasi, dan 30%-nya berakreditasi minimal B	1 Persentase SMK Berakreditasi	70,7%
		2 Persentase SMK Berakreditasi Minimal B	22%
		3 Persentase kab/kota memiliki minimal 1 SMK berbasis keunggulan lokal	49%
		4 Rasio guru terhadap siswa SM	1:28
S3.5	Sekurang-kurangnya 70% kabupaten/kota memiliki SMA dan SMK SBI atau RSBI	1 Persentase Kab/Kota Memiliki Minimal 1 SMA SBI/RSBI	28,4%
		2 Persentase Kab/Kota Memiliki Minimal 1 SMK RSBI/SBI	62%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)		(2)	(3)
		3 Nilai total tertimbang medali dari kompetensi internasional tingkat pendidikan menengah	22
		4 Persentase sekolah menengah dengan rasio guru terhadap siswa antara 1:20 sampai dengan 1:32	46%
		5 Persentase kab/kota yang memiliki rasio pengawas SM minimal 1:15	85%
S3.6	Sekurang-kurangnya 98% guru SMA/SMLB/SMK berkualifikasi S-1/D-4, dan sekurang-kurangnya 90% bersertifikat;	1 Persentase Guru SMA/SMLB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4	77,1%
		2 Persentase Guru SMK Berkualifikasi Akademik S-1/D-4	87,6%
S3.7	Seluruh SMK bersertifikat ISO 9001:2008	1 Persentase SMK Bersertifikat ISO 9001:2000/9001:2008	25,6%
		2 Jumlah SMA/SMLB bersertifikat ISO 9001/2008	316
S3.8	Sekurang-kurangnya 75% SMA/SMLB dan 70% SMK melaksanakan e-pembelajaran	1 Persentase SMA/SMALB yang memiliki e-perpustakaan	10%
		2 Persentase SMA/SMALB yang memiliki lab.komputer	24.5%
		3 Persentase SMK yang memiliki e-perpustakaan	20%
		4 Persentase SMK yang memiliki laboratorium multimedia	70%
S3.9	Sekurang-kurangnya 70% Lulusan SMK Bekerja pada Tahun Kelulusan	1 Persentase SMK Berkemitraan Dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri	23.4%
S3.10	Seluruh SMK menyediakan layanan pembinaan pengembangan kewirausahaan	1 Persentase kab/kota memiliki minimal 1 SMK berbasis keunggulan lokal	49%
		2 Persentase SMK Berkemitraan Dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri	23.4%
S3.12	Meningkatnya tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan meningkatnya angka melanjutkan minimal 95 %. dan menurunnya angka putus sekolah maksimal 1.69 % untuk jenjang pendidikan menengah	1 Persentase peserta didik paket C dari putus sekolah SMA/SMK/MA	1.93%
S3.13	Menurunnya disparitas gender yang ditunjukkan dengan rasio kesetaraan gender menjadi 95 %	1 Rasio kesetaraan gender SMA/SMK/SMLB	77%
SG.1	Meningkatnya APK gabungan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi sekurang-kurangnya 86,3%	1 APK SMA/SMLB/SMK/Paket C	61,8%

D. Program Pendidikan Tinggi

Tabel 2.16 Program DIKTI

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)		(2)	(3)
S4.1	Meningkatnya APK PT dan PTA usia 19-23 tahun mencapai 30%	1 APK PT dan PTA Usia 19-23 Tahun *) 2 APK Prodi Sains Natural Dan Teknologi (Usia 19-23 Tahun)	22,80% 4,1%
S4.2	Sekurang-kurangnya 100% PTN dan 50% PTS memperoleh Sertifikat ISO 9001:2008	-	
S4.3	Sekurang-kurangnya 100% prodi PT berakreditasi dan 80% berakreditasi minimal B	1 Persentase Prodi Terakreditasi 2 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	82% 67,8%
S4.4	Sekurang-kurangnya 3 PT masuk peringkat 300 terbaik dunia dan sekurang-kurangnya 11 PT (kumulatif) masuk dalam peringkat 600 terbaik dunia versi THES, sekurang-kurangnya 12 PT masuk dalam 200 terbaik Asia versi THES	1 Jumlah Perguruan Tinggi Masuk TOP 500 Dunia 2 Jumlah PT Otonom 3 Jumlah PT Beropini WTP	3 50 7
S4.5	Sekurang-kurangnya 94% dosen program S-1 dan program diploma berkualifikasi minimal S-2	1 Persentase Dosen Berkualifikasi S-2	62,5%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
(1)		(2)		(3)
S4.6	Sekurang-kurangnya 15% dosen pasca sarjana (S-2, profesi, spesialis, dan S-3) berkualifikasi S-3	1	Persentase Dosen Berkualifikasi S-3	9,5%
S4.7	Sekurang-kurangnya 75% dosen PT telah bersertifikat profesi	1	Persentase Dosen Bersertifikat	23,0%
S4.8	Meningkatnya persentase dosen dengan publikasi nasional menjadi 50%	1	Persentase Dosen Dengan Publikasi Nasional	0,15%
		2	Jumlah HAKI Yang Dihasilkan	75
S4.9	Meningkatnya persentase dosen dengan publikasi internasional menjadi 0.8%	1	Persentase Dosen Dengan Publikasi Internasional	0,4%
S4.10	Menurunnya disparitas gender yang ditunjukkan dengan rasio kesetaraan gender menjadi 104 %	1	Rasio Kesetaraan Gender PT	111,8%
		2	Rasio Mahasiswa Vokasi : Total Mahasiswa Vokasi dan S-1	19%
		3	Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa	10%
SG.1	Meningkatnya APK gabungan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi sekurang-kurangnya 86,3%	1	APK PT dan PTA Usia 19-23 Thn *)	22,80%

E. Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Tabel 2.17 Program BSDMP dan PMP

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
(1)		(2)		(3)
S1.2	Meningkatnya Kualifikasi untuk pendidik PAUD formal (TK/TKLB) diharapkan 85% berpendidikan minimal S-1/D-4 dan 85% bersertifikat, sedangkan untuk Pendidik PAUD nonformal diharapkan telah dilatih sekurang-kurangnya 55%	1	Persentase Guru Dalam Jabatan Berkualifikasi Akademik Minimal S-1/ D-4	50,80%
		2	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	33,6%
		3	Persentase satuan Pendidikan anak usia dini yang telah dilakukan penjaminan mutu pendidikan	20%
		4	Persentase pendidik yang telah disupervisi kinerjanya sesuai persyaratan standar pendidik	10%
		5	Tersedianya jenis penghargaan bagi PTK	0%
		6	Persentase kasus pendidik dan tenaga kependidikan yang ditangani	10%
S2.6	Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SD/SDLB dan SMP/SMPLB mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan	1	Persentase Kepala Sekolah mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan Profesionalisme Berkelanjutan	10%
		2	Persentase Pengawas Sekolah mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan Profesionalisme Berkelanjutan	100%
		3	Persentase guru mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme berkelanjutan	34.0%
		4	Jumlah kumulatif pegawai Kemdiknas yang mengikuti diklat	10%
S2.15	Sekurang-kurangnya 91.1% Guru SMP/SMPLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 84.9% bersertifikat;	1	Persentase Guru Dalam Jabatan Berkualifikasi Akademik Minimal S-1/D-4	50,8%
		2	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	33,6%
S3.4	Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SMA/SMLB dan SMK mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan	1	Persentase Kepala Sekolah mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan Profesionalisme Berkelanjutan	10%
		2	Persentase Pengawas Sekolah mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan Profesionalisme Berkelanjutan	100%
		3	Persentase guru mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme berkelanjutan	34.0%
		4	Jumlah kumulatif pegawai Kemdiknas yang mengikuti diklat	10%
S3.6	Sekurang-kurangnya 91.1% guru SMA/SMLB/SMK berkualifikasi S-1/D-4, dan sekurang-kurangnya 84.9% bersertifikat;	1	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	33,6%
		2	Persentase satuan Pendidikan menengah yang telah dilakukan penjaminan mutu pendidikan	20%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)		(2)	(3)
S4.3	Sekurang-kurangnya 100% prodi PT berakreditasi dan 80% berakreditasi minimal B	1 Persentase satuan Pendidikan tinggi yang telah dilakukan penjaminan mutu pendidikan	20%

F. Program Penelitian dan Pengembangan

Tabel 2.18 Program Balitbang

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)		(2)	(3)
1	Meningkatnya standar mutu dan pelaksanaan akreditasi	1 Persentase sekolah/madrasah diakreditasi (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, SLB)	51%
		2 Persentase prodi dan Institusi PT diakreditasi	20%
		3 Persentase program/satuan PNF di akreditasi (PAUD, Paket A, B, C, Paket C Kejuruan, LPK, PKBM)	0,52%
		4 Jumlah peraturan turunan SNP yang dikembangkan dan disempurnakan	7
		5 Jumlah peserta didik yang dinilai kompetensinya sesuai SNP	12.212.234
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penelitian dan pengembangan Kemdiknas	1 Jumlah peraturan perundang-undangan	5
		2 Jumlah informasi dan publikasi kelitbang	4
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan sistem pembelajaran	1 Jumlah model kurikulum dan pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran aktif dan menghasilkan lulusan kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa.	40
		2 Persentase provinsi dan kab/kota yang mengembangkan kurikulum pada tingkat daerah.	97%
		3 Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum secara mandiri	36%
4	Meningkatnya hasil penelitian untuk perumusan kebijakan nasional	1 Jumlah rekomendasi kebijakan pendidikan berbasis penelitian	15
		2 Jumlah daerah yang bergabung dalam jaringan kerjasama penelitian	2
		3 Jumlah judul hasil penelitian yang diterbitkan dan didesiminasikan.	5
5	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1 Persentase mata pelajaran pendidikan dasar dan menengah yang hak cipta buku teksnya telah dibeli (N Total = 885 Jilid Mapel)	72,4
		2 Jumlah PTK yang dinilai kompetensinya sesuai dengan SNP	4000
		3 Jumlah soal yang disusun untuk bank soal untuk berbagai kepentingan penilaian pendidikan	84.300
		4 Jumlah model penilaian pendidikan	67

G. Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra

Tabel 2.19 Program Badan Pembinaan Bahasa dan Sastra

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)		(2)	(3)
S6.1	Sekurang-kurangnya 80 % bahasa daerah di Indonesia terpetakan	1 Persentase Bahasa Daerah Terpetakan (N Total = 746)	59%
S6.2	Sekurang-kurangnya 20% guru bahasa Indonesia memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sesuai standar nasional	1 Persentase Guru Bahasa Indonesia Memiliki Kemahiran Berbahasa Indonesia Sesuai Standar Nasional	-
S6.3	Sekurang-kurangnya 6 majalah bahasa dan sastra nasional diterbitkan secara berkala	1 Jumlah Majalah Bahasa dan Sastra Nasional Diterbitkan Secara Berkala	1

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)		(2)	(3)
		2 Persentase Kabupaten/Kota Yang Terbina Dalam Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Luar Ruang Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	6%
S6.4	Sekurang-kurangnya 50 negara memiliki pusat pembelajaran Bahasa Indonesia	1 Jumlah Negara Memiliki Pusat Pembelajaran Bahasa Indonesia	35
		2 Jumlah Pengembangan Pusat Pembelajaran BIPA di Luar Negeri	8

H. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemdiknas

Tabel 2.20 Program Setjen

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)		(2)	(3)
S7.1	Terwujudnya opini audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012	1 Persentase Satker Tertib Pengelolaan SAK dan SIMAK BMN	80%
		2 Laporan Keuangan Unit-Unit Utama Terintegrasi/Terkonsolidasi Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%
S7.2	Meningkatnya skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sekurang-kurangnya 79	1 Skor LAKIP Kementerian	76
		2 Persentase Satker UPT Pusat di Daerah Yang Menerapkan Standar ISO 9001-2008	20%
		3 Persentase Satker di Lingkungan Unit Utama Yang Menerapkan Standar ISO 9001-2008	100%
		4 Persentase Unit Utama Yang Menerapkan Manajemen Berbasis Kinerja	50%
		5 Persentase Satuan Kerja Yang Tingkat Kehadiran Pegawainya Tidak Kurang Dari 98%	95%
		6 Sistem Remunerasi Berbasis Kinerja Diterapkan di Lingkungan Kementerian	-
S7.3	Seluruh Kementerian/Lembaga mengacu pada Renstra pembangunan pendidikan nasional dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan	1 Persentase Realisasi Program dan Kegiatan Kementerian	95%
		2 Persentase Realisasi Anggaran Kementerian	95%
		3 Persentase Anggaran Yang Tidak Diblokir	90%
		4 Persentase Satker/Unit Kerja Kementerian Terkoneksi Secara Daring (Online)	95%
		5 Tingkat Penerapan E-Administrasi di Lingkungan Kementerian (Persen)	65%
		6 Persentase Satuan Pendidikan Formal dan Unit Kerja Terkoneksi ke Sistem Pembelajaran Daring (Online)	12%
		7 Persentase Kerja Sama Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Pendidikan Yang Ditindaklanjuti	90%
		8 Persentase Penyelenggaraan Pendataan Pendidikan	15%
		9 Jumlah Naskah Data Statistik dan Pendayagunaan Data	33
		10 Persentase Unit Kerja Pusat dan SKPD Yang Tergabung Dalam Jaringan Pendataan	40%
		11 Persentase Masyarakat (Peserta Didik, Orang Tua, Tenaga Pendidik, Satuan Pendidikan, Dunia Industri, Media dan Publik, Pendidikan Daerah, Rekanan, dan Pelajar dan Mahasiswa Asing) Yang Memahami Tentang Kebijakan Pendidikan	72%

I. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Tabel 2.21 Program Itjen

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
S7.1 Terwujudnya opini audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012	1 Persentase Satker dengan Temuan Audit Berkonsekuensi Penyetoran ke Kas Negara > 500 juta	18,0%
	2 Persentase Satker di Lingkungan Kemdiknas Memiliki SPI	45%
	3 Persentase Penyelesaian Temuan Audit	73,3%
S7.2 Meningkatnya skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sekurang-kurangnya 79	1 Persentase Unit Yang Diaudit Manajemen Berbasis Kinerjanya	30,0%

B. PERJANJIAN KINERJA

Kementerian menyusun perjanjian kinerja dalam bentuk Penetapan Kinerja tingkat Kementerian yang ditandatangani oleh Menteri. Penetapan Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Kementerian yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun sesuai dengan rencana strategis. Berikut adalah Penetapan Kinerja Kemdiknas tahun 2010.

Tabel 2.22 Penetapan Kinerja Kemdiknas

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Program (4)	Anggaran (5)
S1.1 Meningkatnya APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS) nasional mencapai 45,05%	1 APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)	29,60%	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal Dan Informal	2.789.829.210
	2 Lembaga PAUD yang berakreditasi	0,5%		
	3 Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Program PAUD-NI	40%		
	4 Persentase PTK PAUD-NI yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	11,75%		
	5 Persentase PTK PAUD-NI Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan	1,36%		
S5.1 Sekurang-kurangnya 30% program keahlian lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi, dan 25% lulusan program kecakapan hidup (PKH) bersertifikat kompetensi	1 Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan Berakreditasi	2,0%		
	2 Persentase Anak Lulus SMP Tidak Melanjutkan, Putus dan atau Lulus Sekolah Menengah Tidak Melanjutkan Mendapatkan Layanan Pendidikan Keterampilan Berbasis Kecakapan Hidup	12%		
S5.2 Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah mengarusutamakan gender dalam pendidikan	1 Persentase Kab/Kota Yang Menerapkan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	14%		
S5.3 Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah memberikan layanan fasilitasi <i>parenting education</i>	1 Persentase Kab/Kota Yang Telah Menyelenggarakan Parenting Education	0%		
SG.3 Meningkatnya tingkat literasi nasional usia ≥ 15 tahun 95,8%	1 Persentase Penduduk Buta Aksara Usia > 15 Tahun	5,0%		
	2 Persentase Kabupaten/Kota Yang Telah Memiliki Minimal 10 TBM	34,0%		
	3 Persentase PKBM Berakreditasi	40%		

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Program	Anggaran
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
S2.1	Meningkatnya APM SD/SDLB/Paket A nasional mencapai 83,57%,	1	APM SD/SDLB/Paket A	82,94%	Program Pendidikan Dasar	25.625.868.878
S2.2	Menurunnya APS Kelompok Usia 7-12 Tahun mencapai 0.7%	1	Persentase Peserta Didik SD/SDLB Putus Sekolah	1,5%		
S2.3	Meningkatnya APK SMP/SMPLB/Paket B nasional mencapai 76,53%	1	APK SMP/SMPLB/Paket B	71,98%		
S2.4	Meningkatnya APM SMP/SMPLB/Paket B/Sederajat mencapai 58,17%	1	APM SMP/SMPLB/Paket B	55,97%		
S2.5	Menurunnya APS Kelompok Usia 13-15 Tahun mencapai 1%	1	Persentase Peserta Didik SMP/SMPLB Putus Sekolah	1.8%		
S2.7	Menurunnya Angka Putus Sekolah SD maksimal 0,7% dan SMP maksimal 1%, meningkatnya angka melanjutkan SD/SDLB sekurang-kurangnya 97%	1	Persentase Peserta Didik SD/SDLB Putus Sekolah	1,5%		
		2	Persentase Peserta Didik SMP/SMPLB Putus Sekolah	1.8%		
		3	Persentase Lulusan SD/SDLB yang Melanjutkan Pendidikan	91%		
S2.8	Meningkatnya Angka Melanjutkan Lulusan SMP/SMPLB ke sekolah menengah sekurang-kurangnya 94%	1	Persentase Lulusan SMP/SMPLB yang Melanjutkan ke Sekolah Menengah	88%		
S2.9	Sekurang-kurangnya 85% SD/SDLB dan 70.9% SMP/SMPLB diakreditasi	1	Persentase SD/SDLB Berakreditasi	45%		
		2	Persentase SMP/SMPLB Berakreditasi	21,3%		
S2.10	Sekurang-kurangnya 90% SD/SDLB dan 100% SMP/SMPLB terakreditasi minimal B	1	Persentase SD/SDLB Berakreditasi Minimal B	28%		
		2	Persentase SMP/SMPLB Berakreditasi Minimal B	30%		
S2.11	Sekurang-kurangnya 40% SD/SDLB dan 60% SMP/SMPLB melaksanakan e-pembelajaran	1	Persentase SD Menerapkan e-Pembelajaran	16%		
		2	Persentase SD memiliki fasilitas internet	10%		
		3	Persentase SMP Menerapkan e-Pembelajaran	20%		
		4	Persentase SMP memiliki fasilitas internet	20%		
S2.12	Sekurang-kurangnya 85% kabupaten/kota memiliki SD SBI atau RSBI	1	Persentase Kabupaten/Kota memiliki minimal satu SD RSBI/SBI	39,4%		
		2	Nilai total tertimbang dari kompetensi internasional tingkat pendidikan dasar	160		
S2.13	Sekurang-kurangnya 75% kabupaten/kota memiliki SMP SBI atau RSBI	1	Persentase Kabupaten/Kota memiliki minimal satu SMP RSBI/SBI	50%		
		2	Nilai total tertimbang dari kompetensi internasional tingkat pendidikan dasar	160		
S2.14	Sekurang-kurangnya 82% Guru SD/SDLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 80% bersertifikat	1	Persentase guru SD/SDLB Dalam Jabatan Berkualifikasi Akademik S-1/D-4	36%		
		2	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima tunjangan	100%		
S2.15	Sekurang-kurangnya 98% Guru SMP/SMPLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 90% bersertifikat;	1	Persentase guru SMP/SMPLB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4	77%		
		2	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima tunjangan	100%		
S2.16	Sekurang-kurangnya 60% Kab/Kota Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Peserta Didik SD 1:20 Sampai 1:28 dan SMP 1:20 Sampai 1:32;	1	Persentase SD Yang Memiliki Rasio Guru Terhadap Siswa Sesuai SPM	3%		
		2	Rasio Guru Terhadap Siswa SD	1:33		

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
		3 Persentase SMP Yang Memiliki Rasio Guru Terhadap Siswa Sesuai SPM	3%		
		4 Rasio Guru Terhadap Siswa SMP	1:34		
S2.17	Meningkatnya tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan meningkatnya angka melanjutkan minimal 95 %. dan menurunnya angka putus sekolah maksimal 1 % untuk jenjang pendidikan dasar	1 Persentase Peserta Didik SD/SDLB Putus Sekolah	1,5%		
		2 Persentase Lulusan SD/SDLB yang Melanjutkan	91%		
S5.2	Sekurang-kurangnya 50% kab/ kota telah mengarusutamakan gender dalam pendidikan;	1 Rasio kesetaraan gender SD/SDLB	97,2%		
S7.4	Seluruh Kabupaten dan Kota telah melaksanakan SPM Pendidikan Dasar	1 Persentase SD/SDLB Memenuhi SPM	60%		
		2 Persentase SMP/SMPLB Memenuhi SPM	55%		
		3 Persentase SD Yang Memiliki Rasio Guru Terhadap Siswa Sesuai SPM	3%		
		4 Persentase SMP Yang Memiliki Rasio Guru Terhadap Siswa Sesuai SPM	3%		
		5 Persentase Kab/Kota Yang Memiliki Tenaga Kependidikan Sesuai SPM	25%		
SG.1	Meningkatnya APK gabungan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi sekurang-kurangnya 86,3%,	1 APM SD/SDLB/Paket A	82,94%		
		2 APK SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	71,98%		
		3 APM SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	55,97%		
S3.1	Meningkatnya APK nasional melampaui 70.7%,	1 APK SMA/SMLB/SMK/ Paket C	61,8%	Program Pendidikan Menengah	
S3.2	Sekurang-kurangnya 95.5% SMA/SMLB berakreditasi, dan 40%-nya berakreditasi minimal B	1 Persentase SMA/SMLB Berakreditasi	70,7%		
		2 Persentase SMA/SMLB Berakreditasi Minimal B	23,4%		
		3 Persentase kab/kota memiliki minimal 1 SMA berbasis keunggulan lokal	12,0%		
		4 Rasio guru terhadap siswa SM	1:28		
S3.3	Sekurang-kurangnya 95.5% SMK berakreditasi, dan 30%-nya berakreditasi minimal B;	1 Persentase SMK Berakreditasi	70,7%		
		2 Persentase SMK Berakreditasi Minimal B	22%		
		3 Persentase kab/kota memiliki minimal 1 SMK berbasis keunggulan lokal	49%		
		4 Rasio guru terhadap siswa SM	1:28		
S3.5	Sekurang-kurangnya 70% kabupaten/kota memiliki SMA dan SMK SBI atau RSBI;	1 Persentase Kab/Kota Memiliki Minimal 1 SMA SBI/RSBI	28,4%		
		2 Persentase Kab/Kota Memiliki Minimal 1 SMK RSBI/SBI	62%		
		3 Nilai total tertimbang medali dari kompetensi internasional tingkat pendidikan menengah	22		
		4 Persentase sekolah menengah dengan rasio guru terhadap siswa antara 1:20 sampai dengan 1:32	46%		
		5 Persentase kab/kota yang memiliki rasio pengawas:SM minimal 1:15	85%		
S3.6	Sekurang-kurangnya 98% guru SMA/SMLB/SMK berkualifikasi S-1/D-4, dan sekurang-kurangnya 90% bersertifikat;	1 Persentase Guru SMA/SMLB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4	77,1%		
		2 Persentase Guru SMK Berkualifikasi Akademik S-1/D-4	87,6%		

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Program	Anggaran
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
S3.7	Seluruh SMK bersertifikat ISO 9001:2008	1	Persentase SMK Bersertifikat ISO 9001:2000/ 9001:2008	25,6%		
		2	Jumlah SMA/SMLB bersertifikat ISO 9001/2008	316		
S3.8	Sekurang-kurangnya 75% SMA/SMLB dan 70% SMK melaksanakan e-pembelajaran	1	Persentase SMA/SMALB yang memiliki e-perpustakaan	10%		
		2	persentase SMA/SMALB yang memiliki lab.komputer	24.5%		
		3	Persentase SMK yang memiliki e-perpustakaan	20%		
		4	Persentase SMA/SMALB yang memiliki laboratorium multimedia	70%		
S3.9	Sekurang-kurangnya 70% Lulusan SMK Bekerja pada Tahun Kelulusan	1	Persentase SMK Berkemitraan Dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri	23.4%		
S3.10	Seluruh SMK menyediakan layanan pembinaan pengembangan kewirausahaan	1	persentase kab/kota memiliki minimal 1 SMK berbasis keunggulan lokal	49%		
		2	Persentase SMK Berkemitraan Dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri	23.4%		
S3.12	Meningkatnya tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan meningkatnya angka melanjutkan minimal 95 %. dan menurunnya angka putus sekolah maksimal 1.69 % untuk jenjang pendidikan menengah	1	persentase peserta didik paket C dari putus sekolah SMA/SMK /MA	1.93%		
S3.13	Menurunnya disparitas gender yang ditunjukkan dengan rasio kesetaraan gender menjadi 95 %	1	Rasio kesetaraan gender SMA/SMK/SMLB	77%		
SG.1	Meningkatnya APK gabungan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi sekurang-kurangnya 86,3%	1	APK SMA/SMLB/SMK/Paket C	61,8%		
S4.1	Meningkatnya APK PT dan PTA usia 19-23 tahun mencapai 30%	1	APK PT dan PTA Usia 19-23 Thn*)	22,8%		
		2	APK prodi sains natural dan teknologi (usia 19-23 tahun)	4,1%		
S4.2	Sekurang-kurangnya 100% PTN dan 50% PTS memperoleh Sertifikat ISO 9001:2008	-				
S4.3	Sekurang-kurangnya 90% prodi PT berakreditasi dan 63% berakreditasi minimal B	1	Persentase Prodi Terakreditasi	82%		
		2	Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	67,8%		
S4.4	Sekurang-kurangnya 3 PT masuk peringkat 300 terbaik dunia dan sekurang-kurangnya 11 PT (kumulatif) masuk dalam peringkat 600 terbaik dunia versi THES, sekurang-kurangnya 12 PT masuk dalam 200 terbaik Asia versi THES	1	Jumlah Perguruan Tinggi Masuk TOP 500 Dunia	3		
		2	Jumlah PT Otonom	50		
		3	Jumlah PT Beropini WTP	7		
S4.5	Sekurang-kurangnya 85% dosen program S-1 dan program diploma berkualifikasi minimal S-2	1	Persentase Dosen Berkualifikasi S-2	62,5%		
S4.6	Sekurang-kurangnya 90% dosen pasca sarjana (S-2, profesi, spesialis, dan S-3) berkualifikasi S-3	1	Persentase Dosen Berkualifikasi S-3	9,5%		
S4.7	Sekurang-kurangnya 75% dosen PT telah bersertifikat profesi	1	Persentase Dosen Bersertifikat	23%		
S4.8	Meningkatnya persentase dosen dengan publikasi nasional menjadi 50%	1	Persentase Dosen Dengan Publikasi Nasional	0,15%		
		2	Jumlah HAKI Yang Dihasilkan	75		



Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
S4.9	Meningkatnya persentase dosen dengan publikasi internasional menjadi 6.5%	1 Persentase Dosen Dengan Publikasi Internasional	0,4%		
S4.10	Menurunnya disparitas gender yang ditunjukkan dengan rasio kesetaraan gender menjadi 104 %	1 Rasio Kesetaraan gender PT	111,8%		
		2 Rasio Mahasiswa Vokasi : Total Mahasiswa Vokasi dan S-1	19%		
		3 Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa	10%		
SG.1	Meningkatnya APK gabungan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi sekurang-kurangnya 86,3%,	1 APK PT dan PTA Usia 19-23 Thn*)	22,80%		
S1.2	Meningkatnya kualifikasi untuk pendidik PAUD formal (TK/TKLB) diharapkan 85% berpendidikan minimal S-1/D-4 dan 85% bersertifikat, sedangkan untuk Pendidik PAUD nonformal diharapkan telah dilatih sekurang-kurangnya 55%	1 Persentase Guru Dalam Jabatan Berkualifikasi Akademik Minimal S-1/ D-4	50,8%	Program Pengembangan SDM Pendidikan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan	
		2 Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	33,6%		
		3 Persentase satuan pendidikan anak usia dini yang telah dilakukan penjaminan mutu pendidikan	20%		
		4 Persentase pendidik yang telah disupervisi kinerjanya sesuai persyaratan standar pendidik	10%		
		5 Tersedianya jenis penghargaan bagi PTK	0%		
		6 Persentase kasus pendidik dan tenaga kependidikan yang ditangani	10%		
S2.6	Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SD/SDLB dan SMP/SMPLB mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan	1 Persentase Kepala Sekolah mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan Profesionalisme Berkelanjutan	10%		
		2 Persentase Pengawas Sekolah mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan Profesionalisme Berkelanjutan	100%		
		3 Persentase guru mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme berkelanjutan	34.0%		
		4 Jumlah kumulatif pegawai kemdiknas yang mengikuti diklat	10%		
S2.15	Sekurang-kurangnya 91.1% Guru SMP/SMPLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 84.9% bersertifikat;	1 Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	33,6%		
		2 Persentase satuan pendidikan dasar yang telah dilakukan penjaminan mutu pendidikan	20%		
S3.4	Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SMA/SMLB dan SMK mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan	1 Persentase Kepala Sekolah mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan Profesionalisme Berkelanjutan	10%		
		2 Persentase Pengawas Sekolah mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan Profesionalisme Berkelanjutan	100%		
		3 Persentase guru mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme berkelanjutan	34.0%		
		4 Jumlah kumulatif pegawai kemdiknas yang mengikuti diklat	10%		
S3.6	Sekurang-kurangnya 91.1% guru SMA/SMLB/SMK berkualifikasi S-1/D-4, dan sekurang-kurangnya 84.9% bersertifikat;	1 Persentase guru bersertifikat pendidik	33.6%		
		2 Persentase satuan pendidikan menengah yang telah dilakukan penjaminan mutu pendidikan	20%		

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
S4.3	Sekurang-kurangnya 100% prodi PT berakreditasi dan 80% berakreditasi minimal B	1 Persentase satuan Pendidikan tinggi yang telah dilakukan penjaminan mutu pendidikan	20%		
1	Meningkatnya standar mutu dan pelaksanaan akreditasi	1 Persentase sekolah/madrasah diakreditasi (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, SLB)	51%	Program Penelitian Dan Pengembangan	1.213.020.968
		2 Persentase prodi dan Institusi PT diakreditasi	20%		
		3 Persentase program/satuan PNF di akreditasi (PAUD, Paket A, B, C, Paket C Kejuruan, LPK, PKBM)	0,52%		
		4 Jumlah peraturan turunan SNP yang dikembangkan dan disempurnakan	7		
		6 Jumlah Peserta didik yang dinilai kompetensinya sesuai dengan SNP	12.212.234		
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penelitian dan pengembangan Kemdiknas	1 Jumlah peraturan perundang-undangan	5		
		2 Jumlah informasi dan publikasi kelitbangan	4		
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan sistem pembelajaran	1 Jumlah model kurikulum dan pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran aktif dan menghasilkan lulusan kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa.	40		
		2 Persentase provinsi dan kab/kota yang mengembangkan kurikulum pada tingkat daerah.	97%		
		3 Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum secara mandiri	36%		
4	Meningkatnya hasil penelitian untuk perumusan kebijakan nasional	1 Jumlah rekomendasi kebijakan pendidikan berbasis penelitian	15		
		2 Jumlah daerah yang bergabung dalam jaringan kerjasama penelitian	2		
		3 Jumlah judul hasil penelitian yang diterbitkan dan didesiminasikan.	5		
5	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1 Persentase mata pelajaran pendidikan dasar dan menengah yang hak cipta buku teksnya telah dibeli (N Total = 885 Jilid Mapel)	72,4		
		2 Jumlah PTK yang dinilai kompetensinya sesuai dengan SNP	4000		
		3 Jumlah soal yang disusun untuk bank soal untuk berbagai kepentingan penilaian pendidikan	84.300		
		4 Jumlah model penilaian pendidikan	67		
S6.1	Sekurang-kurangnya 80 % bahasa daerah di Indonesia terpetakan	1 Persentase Bahasa Daerah Terpetakan (N Total = 746)	59%	Program Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Dan Sastra	
S6.2	Sekurang-kurangnya 20% guru bahasa Indonesia memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sesuai standar nasional	1 Persentase Guru Bahasa Indonesia Memiliki Kemahiran Berbahasa Indonesia Sesuai Standar Nasional	-		



Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	
S6.3	Sekurang-kurangnya 6 majalah bahasa dan sastra nasional diterbitkan secara berkala	1	Jumlah Majalah Bahasa dan Sastra Nasional Diterbitkan Secara Berkala	1		
		2	Persentase Kabupaten/Kota Yang Terbina Dalam Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Luar Ruang Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	6%		
S6.4	Sekurang-kurangnya 50 negara memiliki Pusat Pembelajaran Bahasa Indonesia	1	Jumlah Negara Memiliki Pusat Pembelajaran Bahasa Indonesia	35		
		2	Jumlah Pengembangan Pusat Pembelajaran BIPA di Luar Negeri	8		
S7.1	Terwujudnya Opini audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012	1	Persentase Satker Tertib Pengelolaan SAK dan SIMAK BMN	80%	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1.305.264.105
		2	Laporan Keuangan Unit-Unit Utama Terintegrasi/Terkonsolidasi Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%		
S7.2	Meningkatnya skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sekurang-kurangnya 79	1	Skor LAKIP Kementerian	76		
		2	Persentase Satker UPT Pusat di Daerah Yang Menerapkan Standar ISO 9001-2008	20%		
		3	Persentase Satker di Lingkungan Unit Utama Yang Menerapkan Standar ISO 9001-2008	100%		
		4	Persentase Unit Utama Yang Menerapkan Manajemen Berbasis Kinerja	50%		
		5	Persentase Satuan Kerja Yang Tingkat Kehadiran Pegawainya Tidak Kurang Dari 98%	95%		
		6	Sistem Remunerasi Berbasis Kinerja Diterapkan di Lingkungan Kementerian	-		
S7.3	Seluruh Kementerian/Lembaga mengacu pada Renstra pembangunan pendidikan nasional dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan	1	Persentase Realisasi Program dan Kegiatan Kementerian	95%		
		2	Persentase Realisasi Anggaran Kementerian	95%		
		3	Persentase Anggaran Yang Tidak Diblokir	90%		
		4	Persentase Satker/Unit Kerja Kementerian Terkoneksi Secara Daring (Online)	95%		
		5	Tingkat Penerapan E-Administrasi di Lingkungan Kementerian (Persen)	65%		
		6	Persentase Satuan Pendidikan Formal dan Unit Kerja Terkoneksi ke Sistem Pembelajaran Daring (Online)	12%		
		7	Persentase Kerja Sama Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Pendidikan Yang Ditindaklanjuti	90%		
		8	Persentase Penyelenggaraan Pendataan Pendidikan	15%		
		9	Jumlah Naskah Data Statistik dan Pendayagunaan Data	33		
		10	Persentase Unit Kerja Pusat dan SKPD Yang Terhubung Dalam Jaringan Pendataan	40%		

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
		11 Persentase Masyarakat (Peserta Didik, Orang Tua, Tenaga Pendidik, Satuan Pendidikan, Dunia Industri, Media dan Publik, Pendidikan Daerah, Rekanan, dan Pelajar dan Mahasiswa Asing) Yang Memahami Tentang Kebijakan Pendidikan	72%		
S7.1	Terwujudnya opini audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012	1 Persentase Satker dengan Temuan Audit Berkonsekuensi Penyetoran ke Kas Negara >500 juta	18,0%	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemdiknas	252.923.247
		2 Persentase Satker di Lingkungan Kemdiknas Memiliki SPI	45%		
		3 Persentase Penyelesaian Temuan Audit	73,3%		
S7.2	Meningkatnya skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sekurang-kurangnya 79	1 Persentase Unit Yang Diaudit Manajemen Berbasis Kinerjanya	30,0%		

Untuk melaksanakan sembilan program dan merealisasikan penetapan kinerja Kementerian, selama tahun 2010 Kemdiknas menggunakan pagu anggaran sebesar sejumlah Rp 63.875.938.891.000,-.

C. KONTRAK KINERJA MENTERI DENGAN PRESIDEN

Kontrak Kinerja antara Presiden dengan Menteri Pendidikan Nasional adalah target minimal yang diamanahkan kepada Kemdiknas selama lima tahun ke depan. Kontrak Kinerja menetapkan target yang terukur dalam satuan waktu tertentu dan menjadi arah yang ingin dicapai, sebagai landasan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemdiknas.

Kontrak Kinerja tersebut dirinci dalam rencana aksi setiap tahun, yang ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan Nasional. Berikut adalah Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 yang menjadi tanggung jawab Kemdiknas.

Tabel 2.23 Kontrak Kinerja Menteri dengan Presiden

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B08, B10, B12
1	2	3	4	5	6
N2P6: Peningkatan akses pendidikan dasar, menengah, dan tinggi					
1. Peningkatan sistem manajemen BOS	Kemendiknas	Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota	Tersusun dan terapkannya sistem manajemen BOS	TARGET: Tersalurkannya dana BOS tepat waktu dan tepat jumlah paling lambat November 2010	<p>Target B04:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Tim manajemen BOS di tiap tingkat telah terbentuk ➢ Buku Panduan BOS 2010 telah didistribusikan kepada seluruh sekolah, serta Tim Manajemen BOS Provinsi dan Kab/Kota ➢ Penyaluran dana BOS triwulan 1 sudah selesai 100% secara tepat jumlah ➢ Penyaluran dana BOS triwulan 2 sudah tersalur 60% secara tepat jumlah <p>Target B06:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Penyaluran dana BOS triwulan 2 telah selesai 100% secara tepat jumlah ➢ Tersusunnya hasil monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana BOS triwulan 1 dan 2. <p>Target B08: ➢ Penyaluran dana BOS triwulan 3 sudah tersalur 70% secara tepat jumlah</p> <p>Target B10:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Penyaluran dana BOS triwulan 3 telah selesai 100% secara tepat jumlah ➢ Penyaluran dana BOS triwulan 4 sudah tersalur 60% secara tepat jumlah ➢ Tersusunnya data jumlah siswa tiap sekolah pada tahun ajaran 2010/2011 sebagai dasar penganggaran BOS tahun 2011. ➢ Tersosialisasinya daftar jumlah siswa di tiap sekolah pada Tahun Ajaran 2010/2011. <p>Target B12:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Penyaluran dana BOS triwulan 4 telah selesai 100% secara tepat jumlah ➢ Tersusunnya hasil monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana BOS triwulan 3 dan 4.
2. (N2P1A2) Penyediaan buku ajar yang bermutu dan murah melalui pembelian hak cipta	Kemendiknas	Pemda	Makin terjangkaunya buku ajar yang murah dan bermutu bagi siswa dari seluruh kalangan ekonomi	TARGET: 1) SD/Sederajat: Pengalihan Hak Cipta sejumlah 95 judul buku teks pelajaran SD dan sederajat	<p>B04: Pembentukan Panitia (100%) Pemilihan Judul buku (100%) Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (100%)</p> <p>B06: Pelaksanaan Pengalihan Hak Cipta sejumlah 48 judul (50% dari 95 judul)</p> <p>B08: Pelaksanaan Pengalihan Hak Cipta sejumlah 67 judul (70% dari 95 judul)</p> <p>B10: Pelaksanaan Pengalihan Hak Cipta sejumlah 86 judul (90% dari 95 judul)</p> <p>B12: Pelaksanaan Pengalihan Hak Cipta sejumlah 95 judul (100% dari 95 judul)</p>

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B08, B10, B12
1	2	3	4	5	6
				2) SMP/Sederajat: 47 judul buku teks pelajaran SMP dan sederajat	<p>B04: Pembentukan Panitia (100%) Pemilihan Judul buku (100%) Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (100%)</p> <p>B06: Pelaksanaan Pengalihan Hak Cipta sejumlah 24 judul (50% dari 47 judul)</p> <p>B08: Pelaksanaan Pengalihan Hak Cipta sejumlah 33 judul (70% dari 47 judul)</p> <p>B10: Pelaksanaan Pengalihan Hak Cipta sejumlah 42 judul (90% dari 47 judul)</p> <p>B12: Pelaksanaan Pengalihan Hak Cipta sejumlah 47 judul (100% dari 47 judul)</p>
				3) SMA/Sederajat: 41 judul buku teks pelajaran SMA dan sederajat	<p>B04: Pembentukan Panitia (100%) Pemilihan Judul buku (100%) Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (100%)</p> <p>B06: Pelaksanaan Pengalihan Hak Cipta sejumlah 21 judul (50% dari 41 judul)</p> <p>B08: Pelaksanaan Pengalihan Hak Cipta sejumlah 29 judul (70% dari 41 judul)</p> <p>B10: Pelaksanaan Pengalihan Hak Cipta sejumlah 37 judul (90% dari 41 judul)</p> <p>B12: Pelaksanaan Pengalihan Hak Cipta sejumlah 41 judul (100% dari 41 judul)</p>
				4) SMK: 37 judul buku teks pelajaran SMK	<p>B04: Persiapan Penulisan Buku Teks (100%) Penulisan Buku Teks (100%)</p> <p>B06: Penetapan Tim Penilai (100%) Pelaksanaan Penilaian (100%)</p> <p>B08: Penetapan hasil pengesahan (100%) Pengesahan Hasil penetapan (100%) Usul rekomendasi ke Menteri (100%)</p> <p>B10: Pelaksanaan Pengalihan Hak Cipta sejumlah 19 judul (50% dari 37 judul)</p> <p>B12: Pelaksanaan Pengalihan Hak Cipta sejumlah 37 judul (100% dari 37 judul)</p>
N2P7: Perbaikan status gizi anak sekolah					
3. (N2P7A1) Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan	Kemendiknas/ Kemenag				

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B08, B10, B12
1	2	3	4	5	6
<p>'- Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) untuk siswa TK dan SD terutama di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan</p>	Kemendiknas	Kemenag, Pemda terkait	Jumlah siswa TK dan SD di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan yang memperoleh PMTAS untuk peningkatan gizi	<p>TARGET: 1.200.000 siswa TK dan SD di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan telah menerima PMTAS secara teratur paling lambat Agustus 2010</p>	TARGET B04: 1. Tersusunnya Buku petunjuk pelaksanaan pemberian makanan tambahan
					TARGET B06: Sosialisasi petunjuk pelaksanaan pemberian makanan tambahan kepada semua Pemda terkait
					TARGET B08: 60% dari 1.200.000 siswa TK dan SD di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan telah menerima makanan tambahan secara teratur
					TARGET B10: 100% dari 1.200.000 siswa TK dan SD di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan telah menerima makanan tambahan secara teratur
					TARGET B12: 100% dari 1.200.000 siswa TK dan SD di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan telah menerima makanan tambahan secara teratur
N2P8: Penguatan metodologi dan kurikulum					
<p>4. (N2P8A1) Penyempurnaan kurikulum dan metodologi pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa</p>	Kemendiknas	Pemda terkait Perguruan Tinggi Kemenag	Terimplementasinya ujicoba kurikulum dan metodologi pembelajaran aktif	<p>TARGET: Ujicoba kurikulum telah dilaksanakan 100%; Penguatan pelaksanaan kurikulum sehingga siap untuk mulai diimplementasikan secara luas</p>	TARGET B04: Penataan ulang kurikulum dan rencana penyempurnaannya untuk pendidikan dasar dan menengah yang menghasilkan 1 draft naskah akademik umum penataan ulang kurikulum Penyusunan 5 paket bahan pelatihan metodologi pendidikan dan pembelajaran aktif
					TARGET B06: Penataan ulang kurikulum dan rencana penyempurnaannya untuk pendidikan dasar dan menengah, yang meliputi tapi tak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> • 6 draft naskah akademik penataan ulang kurikulum satuan pendidikan • 1 draft naskah akademik integrasi kewirausahaan ke dalam kurikulum 250 satuan pendidikan yang representatif untuk pengembangan dan ujicoba kurikulum telah disiapkan di 33 provinsi
					<p>B08: (a) Terlatihnya 69 orang dalam Training for Trainers yang akan mendukung satuan pendidikan mengembangkan dan menguji coba kurikulum dan metodologi pembelajaran aktif (b) Pelaksanaan bantuan profesional pengembangan kurikulum dengan pendekatan belajar aktif berdasarkan nilai-</p>

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B08, B10, B12
1	2	3	4	5	6
					<p>nilai budaya untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa di 33 provinsi</p> <p>(c) Tersusunnya 1 kerangka model kurikulum, metodologi pembelajaran dan pengajaran, acuan evaluasi, untuk pendidikan dasar dan menengah</p>
					<p>B10:</p> <p>(a) Terlatihnya 1000 trainers yang akan mendukung satuan pendidikan mengembangkan dan menguji coba kurikulum dan metodologi pembelajaran aktif (tercapai pada bulan September)</p> <p>(b) Tersusunnya analisis konteks daerah dari 16 kabupaten di 16 provinsi dalam mengembangkan model kurikulum</p> <p>(c) Tersusunnya 125 model kurikulum, metodologi pembelajaran, acuan evaluasi, untuk pendidikan dasar dan menengah</p> <p>(d) Uji coba pelaksanaan kurikulum telah dimulai di 125 satuan pendidikan</p> <p>(e) Terlaksananya supervisi awal uji coba pelaksanaan kurikulum di 16 kabupaten di 16 provinsi</p> <p>TARGET B12:</p> <p>(a) Ujicoba kurikulum telah dilaksanakan 100% di 250 satuan pendidikan dan revisi/masukan/perbaikan telah dimasukkan sehingga dapat dilanjutkan</p> <p>(b) Terlaksananya pemantapan supervisi ujicoba pelaksanaan kurikulum di 33 provinsi</p> <p>(c) Pelaksanaan bantuan profesional pengembangan kurikulum kepada tim pengembang kurikulum di 202 kab/kota</p> <p>(d) Pelaksanaan bantuan profesional pengembangan kurikulum kepada berbagai pihak untuk persiapan diseminasi dan diimplementasikan secara luas</p>
N2P9: Penguatan pengelolaan sekolah					
5. (N2P9A1) Peningkatan kompetensi kepala dan pengawas sekolah/madrasah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah	Kemendiknas/ Kemendiknas				
1- Peningkatan kompetensi kepala dan pengawas sekolah untuk jenjang	Kemendiknas	Pemda terkait	Persentase kepala TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan kepala Sekolah terakreditasi yang	TARGET: 15 % dari seluruh kepala TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan kepala	TARGET B04:1% dari seluruh kepala TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B08, B10, B12
1	2	3	4	5	6
pendidikan dasar dan menengah			berkualifikasi menurut kabupaten kota	sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota, paling lambat Desember 2010 (15% untuk tiap tingkatan pendidikan)	<p>TARGET B06: 3% dari seluruh kepala TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota</p> <p>TARGET B08: 6% dari seluruh kepala TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota</p> <p>TARGET B10: 10% dari seluruh kepala TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota</p> <p>TARGET B12: (a) 15% dari seluruh kepala TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota (b) Penyempurnaan Pelatihan kepala sekolah berdasarkan hasil evaluasi dan benchmarking, yang selaras dengan pelatihan kepala Madrasah dari Kemenag</p>
		Pemda terkait	Persentase pengawas TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan kepala Sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kabupaten kota	<u>TARGET:</u> 100 % dari seluruh pengawas TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan pengawas sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota, paling lambat Desember 2010	<p>TARGET B04: 10 % dari seluruh pengawas TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota</p> <p>TARGET B06: 20 % dari seluruh pegawai TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota</p> <p>TARGET B08: 40 % dari seluruh pengawas TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan pengawas sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota</p> <p>TARGET B10: 80% dari seluruh pengawas TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan pengawas sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota</p> <p>TARGET B12: (a) 100% dari seluruh pegawai TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan pengawas sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota (b) Penyempurnaan Pelatihan pengawas sekolah berdasarkan hasil evaluasi dan benchmarking, yang selaras dengan pelatihan kepala Madrasah dari Kemenag</p>

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B08, B10, B12
1	2	3	4	5	6
6. (N2P11A1) Akselerasi penerapan sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan di setiap jenjang pendidikan	Kemendiknas		Satuan pendidikan yang menerapkan sistem penjaminan mutu	TARGET: 10.000 satuan pendidikan telah menerapkan sistem penjaminan mutu, paling lambat Desember 2010	TARGET B04: Sosialisasi sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP) dan Permen 63/2009 tentang SPMP kepada Dinas Pendidikan Propinsi/Kab/Kota dan LPMP oleh Ditjen PMPTK
					TARGET B06: LPMP melakukan TOT penggunaan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan Monitoring Satuan Pendidikan oleh Pemerintah (MSPD) kepada 10.000 kepala sekolah dan 1000 pengawas in EDS dan MSPD
					TARGET B08: Implementasi Evaluasi Diri Sekolah (EDS) sebagai bagian dari SPMP untuk melihat pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan oleh 10.000 satuan pendidikan
					TARGET B10: 1000 Pengawas Sekolah memonitor dan melaporkan pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan (10.000 sekolah di 33 Propinsi) dengan menggunakan EDS dan MSPD
					TARGET B12: Dinas Pendidikan dan LPMP melakukan analisis hasil EDS dan MSPD serta memberikan bantuan teknis untuk peningkatan mutu pendidikan kepada 10.000 sekolah
		Kemendiknas	Jumlah PT masuk 500 terbaik versi Lembaga Pemeringkatan Independen Internasional	TARGET: 8 PT masuk 500 terbaik versi Lembaga Pemeringkatan Independen Internasional, paling lambat Desember 2010	TARGET B04: (a) 4 PT (50%) masuk 500 terbaik versi Lembaga Pemeringkatan Independen Internasional (b) Penyusunan Dokumen Evaluasi Faktor Keberhasilan Tersusun (20%)
					TARGET B06: (a) 4 PT (50%) masuk 500 terbaik versi Lembaga Pemeringkatan Independen Internasional (b) Dokumen Evaluasi Faktor Keberhasilan di kirim dan PT menyusun Laporan (50%)
					TARGET B08: (a) 4 PT (50%) masuk 500 terbaik versi Lembaga Pemeringkatan Independen Internasional (b) Evaluasi Laporan Perguruan Tinggi yang memperoleh bantuan pengembangan WCU (80%)
					TARGET B10: Laporan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi untuk penerapan di PT lain (100%)
					TARGET B12: (a) 8 PT (100%) masuk 500 terbaik versi Lembaga Pemeringkatan Independen Internasional (b) Evaluasi faktor keberhasilan PT yang masuk 500 terbaik dan rencana untuk penerapannya di universitas lain (100%)

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B08, B10, B12
1	2	3	4	5	6
		Kemendiknas	Jumlah PT yang mengembangkan pendidikan berbasis entrepreneurship	TARGET: 95 PT telah mengembangkan pendidikan berbasis entrepreneurship, paling lambat Desember 2010	TARGET B04: 15 PT telah mengembangkan pendidikan berbasis entrepreneurship TARGET B06: 40 PT telah mengembangkan pendidikan berbasis entrepreneurship TARGET B08: 60 PT telah mengembangkan pendidikan berbasis entrepreneurship TARGET B10: 80 PT telah mengembangkan pendidikan berbasis entrepreneurship TARGET B12: 95 PT telah mengembangkan pendidikan berbasis entrepreneurship
7. (N2P11A2) Penerapan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di sekolah	Kemendiknas	Kemenag, Kominfo, Pemda	Persentase satuan pendidikan jenjang SMP dan SMA yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	TARGET: 20% Sekolah dari seluruh satuan pendidikan jenjang SMP dan 40% Sekolah dari seluruh satuan pendidikan jenjang SMA telah menerapkan pembelajaran berbasis TIK, paling lambat Desember 2010	TARGET B04: 8% - SMP & SMA: Pendataan Berita Acara Koneksi Schoolnet existing 3% - Penyusunan rancangan modul TIK 2% - Persiapan Pelatihan TIK 3% TARGET B06: 29% dari keseluruhan langkah-langkah implementasi penerapan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang terdiri dari penyediaan akses internet, penyusunan modul, pelatihan, implementasi dan monev dapat dilaksanakan. Dimana 20% (1870) sekolah telah terkoneksi Schoolnet TARGET B08: 59% dari keseluruhan langkah-langkah implementasi penerapan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang terdiri dari penyediaan akses internet, penyusunan modul, pelatihan, implementasi dan monev dapat dilaksanakan. Dimana 30% (2806) sekolah telah terkoneksi Schoolnet TARGET B10: 81% dari keseluruhan langkah-langkah implementasi penerapan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang terdiri dari penyediaan akses internet, penyusunan modul, pelatihan, implementasi dan monev dapat dilaksanakan. Dimana 50% (4676) sekolah telah terkoneksi Schoolnet TARGET B12: 100% dari keseluruhan langkah-langkah implementasi penerapan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang terdiri dari penyediaan akses internet, penyusunan modul, pelatihan, implementasi dan monev dapat dilaksanakan. Dimana 100% (9.352) sekolah telah terkoneksi Schoolnet

D. REFORMASI BIROKRASI INTERNAL

1. Konsep Reformasi

- Reformasi pelaksanaan sistem pendidikan nasional dirancang untuk dapat melaksanakan lima misi Kemdiknas yaitu Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian, dengan cara seefisien dan seefektif mungkin.
- Tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu sistem yang dapat mendukung tercapainya efisiensi nasional dalam bidang pendidikan. Efisiensi dapat dicapai bila Kemdiknas bekerja secara efisien (efisiensi internal) dan pemangku kepentingan pendidikan dapat memperoleh layanan dari Kemdiknas dengan cara yang efisien juga (efisiensi eksternal).
- Tujuan tersebut akan lebih mudah tercapai bila semua kegiatan Kemdiknas dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sehingga tidak menyisakan sedikitpun celah untuk lengah dalam pemberian layanan terbaik kepada semua pemangku kepentingan.

2. Lingkup Reformasi

Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional yang sedang dilaksanakan oleh Kemdiknas mencakup:

- Reformasi yang berorientasi pada perbaikan kondisi internal, yang diistilahkan sebagai Reformasi Birokrasi, dan
- Reformasi yang berorientasi pada perbaikan layanan kepada pihak eksternal yang diistilahkan sebagai Reformasi Layanan.

Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan mengacu pada Permenpan No. 15/2008 yang mengarahkan bahwa reformasi birokrasi harus mencakup:

- Penguatan Organisasi,
- Pembenahan Tatalaksana, dan
- Penataan dan Penguatan Sumber Daya Manusia

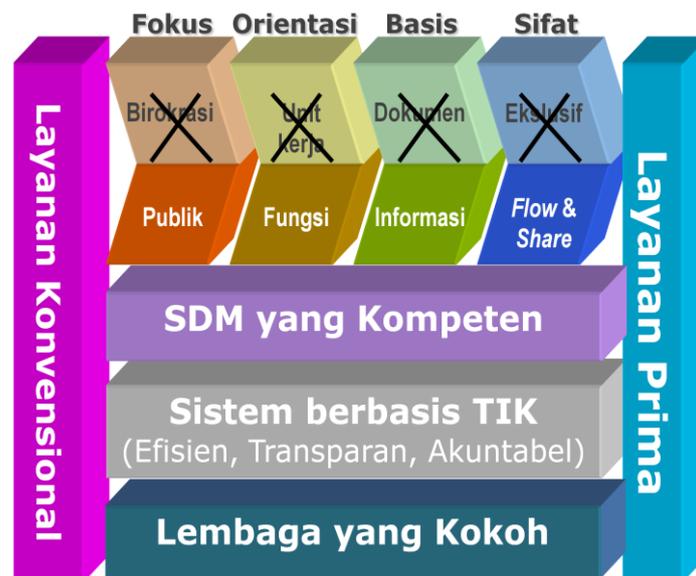
Sedangkan reformasi Layanan Pendidikan dilaksanakan dengan bertumpu pada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga layanan dapat diberikan dari mana saja, kapan saja, dengan menggunakan media apa saja.

3. Pendekatan Reformasi



Gambar 2.1. Konsep Reformasi birokrasi Kemdiknas

Reformasi Birokrasi Kemdiknas, sesuai arahan MenPAN-RB, meliputi Penguatan Organisasi, Pembentukan Ketatalaksanaan, dan Penataan dan Penguatan SDM. Dalam pembentukan ketatalaksanaan, Kemdiknas melaksanakannya dengan melakukan pengembangan sistem melalui pemanfaatan TIK, sehingga dihasilkan proses yang efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam penataan dan penguatan SDM, dilakukan melalui manajemen perubahan budaya kerja melalui perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak.



Gambar 2.2. Reformasi layanan Kemdiknas

Reformasi Layanan Kemdiknas dilakukan melalui rekayasa ulang proses layanan menjadi berfokus pada publik (yang dilayani), mengedepankan peran fungsi layanan (bukannya unit kerja), dengan berbasis pada informasi yang diperlukan untuk memberikan layanan (bukan dokumen fisiknya), serta menekankan pentingnya berbagi informasi dan aktivitas sehingga tidak perlu terjadi pengulangan proses dan pendataan. Semuanya ini dilakukan melalui penguatan dan penataan peran SDM dan penyediaan dukungan sistem berbasis TIK.

4. Agenda Reformasi

Berikut adalah agenda yang dilaksanakan oleh Kemdiknas;

- a) Penguatan organisasi, mencakup;
 - Restrukturisasi organisasi
 - Penataan tugas dan fungsi
 - Analisis beban kerja
 - Sistem pengelolaan kinerja organisasi

- b) Penataan dan penguatan SDM, mencakup;
 - Penguatan budaya kerja
 - Analisis dan evaluasi jabatan
 - Pemetaan dan penempatan jabatan
 - Peningkatan kompetensi
 - Sistem remunerasi berbasis kinerja
 - Sistem pengelolaan kinerja individu

- c) Pembenahan tatalaksana dan pengembangan sistem, mencakup;
 - Sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
 - Sistem pengendalian manajemen
 - Sistem manajemen SDM
 - Sistem manajemen aset BMN (barang milik negara)
 - Sistem manajemen dokumen
 - Sistem informasi produk hukum
 - Sistem manajemen data pendidikan
 - Sistem manajemen portal layanan pendidikan

- d) Reformasi layanan satuan pendidikan, mencakup;
 - Perijinan
 - Akreditasi
 - Mekanisme ketepatan pemberian bantuan/hibah
 - Penentuan standar layanan
 - Pemetaan kondisi sekolah, daya tampung dan cakupan layanan
 - Pembukaan sekolah berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja
 - Layanan informasi dan pendataan

- e) Reformasi layanan peserta didik, mencakup;
 - Pemberian beasiswa
 - Mekanisme penjaminan ketepatan penyaluran beasiswa
 - Pemberian ijin belajar
 - Penyetaraan ijazah
 - Mekanisme penjaminan kepastian memperoleh layanan pendidikan
 - Pendataan siswa dan penduduk usia sekolah
 - Layanan informasi dan pendataan

- f) Reformasi layanan pendidik dan tenaga kependidikan, mencakup;
 - Penerimaan dan perencanaan kebutuhan
 - Mutasi (kenaikan pangkat, jabatan, pindah)
 - Peningkatan kualifikasi dan kompetensi
 - Pensertifikasian
 - Pendistribusian
 - Penghargaan dan perlindungan
 - Penanganan PTK layanan khusus (terpencil, terluar)
 - Peningkatan kesejahteraan (inpassing, tunjangan non sertifikasi)
 - Fasilitasi layanan internasional
 - Layanan informasi dan pendataan

- g) Reformasi layanan substansi pendidikan, mencakup;
 - Kolaborasi berbagi pengetahuan dan pengalaman
 - Penyediaan penggalangan materi e-pembelajaran bersama
 - Layanan informasi kurikulum dan pelaksanaannya
 - Layanan buku sekolah elektronik

- Layanan tutor pembelajaran online
- Layanan materi dan nilai ujian nasional
- Penyempurnaan standar isi pendidikan; karakter, kewirausahaan, penyalarsan
- Layanan informasi substansi pendidikan: garuda, kamus besar bahasa Indonesia, glosarium

E. RENCANA CAPAIAN PROGRAM KERJA 100 HARI KEMDIKNAS

Sebagai upaya ikut mensukseskan program 100 hari pemerintah dalam kabinet Indonesia bersatu jilid II, khususnya dalam bidang pendidikan, Kemdiknas dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional telah merumuskan program kerja 100 hari, yang meliputi delapan program, yaitu:

1. Penyediaan Internet secara massal di sekolah;
2. Penguatan kemampuan kepala dan pengawas sekolah;
3. Beasiswa PTN untuk siswa SMA/SMK/MA berprestasi dan kurang mampu;
4. Penyusunan Kebijakan Khusus bagi guru yang bertugas di daerah terdepan dan terpencil;
5. Penyusunan dan Penyempurnaan Renstra 2009-2014;
6. Pengembangan Budaya dan Karakter Bangsa;
7. Pengembangan Metodologi Belajar Mengajar;
8. Roadmap Sinergitas Lembaga Pendidikan (Kemdiknas-Kemenag) dengan Pengguna Lulusan Untuk Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan.

Uraian lebih terinci delapan program diatas dapat diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.24 Tabel Rencana Program Kerja 100 Hari Kemdiknas

No	Program	Sasaran	Batas penyelesaian
1	Penyediaan Internet secara massal di sekolah	17.500 sekolah berinternet	Januari 2010
2	Penguatan kemampuan kepala dan pengawas sekolah	30.000 kepala/pengawas sekolah terlatih	Januari 2010
3	Beasiswa PTN untuk siswa SMA/SMK/MA berprestasi dan kurang mampu	20.000 orang	Januari 2010
4	Penyusunan Kebijakan Khusus bagi guru yang bertugas di daerah terdepan dan terpencil	Terbitnya Permendiknas	Januari 2010
5	Penyusunan dan Penyempurnaan Renstra 2009-2014	Dokumen Renstra ditetapkan	Desember 2009
6	Pengembangan Budaya dan Karakter Bangsa	Tersusunnya Bahan Ajar	Januari 2010
7	Pengembangan Metodologi Belajar Mengajar	Bahan Pelatihan Tersusun	Januari 2010
8	Roadmap Sinergitas Lembaga Pendidikan (Depdiknas-Depag) dg Pengguna Lulusan Untuk Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan	Terbentuknya Pusat Kewirausahaan	Januari 2010

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA KEMDIKNAS

Sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2010, Kemdiknas berkewajiban untuk mencapai target-target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan organisasi dalam upaya pencapaian sasaran strategisnya dan juga sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, maka diperlukan suatu gambaran tentang capaian-capaian kinerja tersebut. Di bawah ini diuraikan hasil capaian kinerja Kementerian seperti capaian dari penetapan kinerja, kontrak kinerja Menteri dengan Presiden, capaian reformasi birokrasi dan kinerja kementerian lainnya dalam bidang pendidikan.

A. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Kementerian Pendidikan Nasional sudah menetapkan sembilan program pembangunan pendidikan yang telah ditetapkan di dalam perencanaan kinerja. Pengelompokan program pembangunan pendidikan disusun berdasarkan jenjang pendidikan dan dukungan manajemen yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program-program tersebut. Kesembilan program tersebut meliputi :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal Dan Informal
2. Program Pendidikan Dasar
3. Program Pendidikan Menengah
4. Program Pendidikan Tinggi
5. Program Pengembangan SDM Pendidikan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Program Penelitian Dan Pengembangan
7. Program Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Dan Sastra
8. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
9. Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Oleh sebab itu Kementerian berkewajiban untuk merealisasikan target-target kinerja secara bertahap setiap tahunnya, sehingga capaian kinerja program tersebut dapat berkontribusi dalam upaya merealisasikan tujuan instansi dan pencapaian sasaran strategis. Berikut adalah capaian kinerja dari masing-masing program sebagai bentuk keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

1. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

Capaian Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal merupakan salah satu program penting dari Kementerian Pendidikan Nasional. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tujuan strategis sebagai berikut :

1. Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota (T1);
2. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (T5).

Ketercapaian tujuan strategis pertama diukur dari beberapa indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis. Ketercapaian kinerja program tersebut dengan hasil capaian sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Capaian IKU Program PAUDNI

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program Utama	Anggaran			
						PAGU	REALISASI	%	
S1.1 Meningkatkan APK PAUD (TK,KB,TPA,SPS) nasional mencapai 45,05%	1	APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)	29,6%	21,42%	72,30	P1. Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal	2.789.829.210.000	2.560.369.328.844	91,78
	2	Lembaga PAUD yang berakreditasi	0,5%	0,17%	34,0				
	3	Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Program PAUD-NI	40%	0%	0				
	4	Persentase PTK PAUD-NI yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	11,75%	11,75%	100				
	5	Persentase PTK PAUD-NI Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan	1,36%	10%	735,3				
S5.1 Sekurang-kurangnya 30% program keahlian lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi, dan 25% lulusan program kecakapan hidup (PKH) bersertifikat kompetensi	1	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan Berakreditasi	2%	3,45%	172,50				
	2	Persentase Anak Lulus SMP Tidak Melanjutkan, Putus dan atau Lulus Sekolah Menengah Tidak Melanjutkan Mendapatkan Layanan Pendidikan Keterampilan Berbasis Kecakapan Hidup	12%	11,42%	95,17				
S5.2 Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah mengarusutamakan gender dalam pendidikan	1	Persentase Kab/Kota Yang Menerapkan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	14%	15,69%	112,07				
S5.3 Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah memberikan layanan fasilitasi parenting education	1	Persentase Kab/Kota Yang Telah Menyelenggarakan Parenting Education	-	8,35%	-				
SG.3 Meningkatnya tingkat literasi nasional usia ≥ 15 tahun 95,8%	1	Persentase Penduduk Buta Aksara Usia > 15 Tahun	5,0%	4,79%	104,38				
	2	% Kabupaten/ Kota Yang Telah Memiliki Minimal 10 TBM	34%	25%	73,53				
	3	Persentase PKBM Berakreditasi	40%	0%	0				

- Pencapaian Kinerja yang tercermin dalam APK PAUD pada tahun 2010 belum dapat memenuhi target dikarenakan terdapat penurunan jumlah anak yang dilayani oleh PAUD Formal (TK) sebanyak 1.023.550 dari tahun 2009. Layanan PAUD Nonformal (KB, TPA, SPS) mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,2%. Upaya pemerintah untuk meningkatkan jumlah layanan PAUD baik formal maupun nonformal dengan memperluas akses layanan PAUD melalui penambahan dana bantuan rintisan PAUD. Mulai tahun 2011 pemerintah akan memberikan Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD sebesar Rp. 300.000 per anak walaupun dalam jumlah terbatas. Sosialisasi ke masyarakat juga semakin ditingkatkan dengan menggalakan PAUD di masyarakat luas dalam bentuk gerakan massa atau program PAUDISASI.
- Untuk lembaga PAUD terakreditasi pada tahun 2010 baru dirintis pelaksanaannya, dan belum terealisasi dalam dukungan anggaran 2010, karena pelaksanaan akreditasi dilakukan oleh BAN PNF serta BAN SM yang merupakan lembaga terpisah dari Direktorat Jenderal PNFI. Oleh karena itu pencapaian IKU untuk lembaga terakreditasi belum mencapai target yang diharapkan. Strategi yang harus dilaksanakan dalam upaya mendorong lembaga terakreditasi adalah dengan melakukan pendampingan terhadap lembaga-lembaga PAUD yang akan diakreditasi. Sedangkan dalam hal peningkatan mutu pendidik pemerintah berupaya menyelenggarakan orientasi teknis pembelajaran PAUD.
- Pencapaian target kabupaten/kota yang menerapkan pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan pada tahun 2010 telah mencapai 15,69% atau sebanyak 78 kab/kota telah melaksanakan pengarusutamaan gender bidang pendidikan. Hal ini disebabkan adanya penambahan pada jumlah sasaran kab/kota pada tahun 2010.
- Pencapaian persentase PKBM berakreditasi tidak dapat kami sampaikan capaiannya karena yang melakukan penilaian akreditasi adalah BAN-PNF bukan Ditjen PNFI. Oleh karena itu, kami sedang mengusulkan perubahan untuk IKU pada tahun 2011, menjadi persentase PKBM bernomor induk lembaga (NILEM) karena Direktorat Pendidikan Masyarakat pada tahun 2010 telah melakukan pendataan dan hasilnya adalah sebanyak 40% PKBM telah memiliki nomor induk.
- Upaya untuk mendorong tercapainya target akreditasi kursus, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan telah menyiapkan dan meningkatkan mutu lembaga kursus melalui penilaian akreditasi terhadap lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang mendapatkan predikat A dan B sebesar 3,45% dari total lembaga kursus dan pelatihan yang ada saat ini. Meskipun demikian, target LKP yang terakreditasi belum diketahui karena kewenangan akreditasi berada pada BAN-PNF.
- Pencapaian persentase anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapat layanan pendidikan keterampilan berbasis kecakapan hidup hanya mencapai 11,42% atau 125.325 orang dari target sebesar 12% (131.676 orang). Hal tersebut disebabkan karena adanya pengalihan sasaran dari kegiatan PKH menjadi kegiatan beasiswa uji kompetensi dengan pertimbangan dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan program. Kegiatan beasiswa uji kompetensi pada tahun 2010 mencapai 7.027 orang dari target yang ditetapkan sebanyak 5.392 orang.
- Pencapaian persentase kab/kota yang telah menyelenggarakan parenting education (pendidikan keorangtuaan) telah mencapai 8,35% dari target 0%. Hal tersebut dimungkinkan sebagai akibat positif dari penambahan anggaran untuk kegiatan pendidikan keorangtuaan melalui anggaran biaya tambahan (APBN-P) tahun 2010.

- Pencapaian persentase penduduk buta aksara usia >15 tahun telah lebih dari yang ditargetkan yaitu sebesar 4,79% artinya jumlah penyandang buta aksara mengalami penurunan lebih dari target sebesar 0,2%.
- Pencapaian persentase PTK PAUDNI memperoleh penghargaan dan perlindungan dari yang ditargetkan 1,36% dapat mencapai 10%. Hal ini disebabkan karena adanya pemikiran bahwa keberhasilan pelaksanaan program PNFI sangat tergantung dari para pelaksana di lapangan sehingga Ditjen PNFI memandang perlu untuk memberikan penghargaan dalam bentuk bantuan transportasi. Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dan pemacu motivasi kerja bagi PTK-PNF dalam menjalankan tugas sehingga penghargaan diberikan kepada pengelola PKBM dan Kursus yang berdomisili di daerah tertinggal sesuai dengan SK Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Pendidik PAUD, Penilik serta Tutor Inti. Sedangkan perlindungan hukum diberikan dalam bentuk advokasi dan bantuan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan nonformal melalui Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) untuk membantu PTK-PNF yang sedang mendapatkan persoalan dalam menjalankan profesinya.

2. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENDIDIKAN DASAR

Capaian program pendidikan dasar merupakan salah satu program penting dari Kementerian Pendidikan Nasional untuk mendukung tujuan kedua (T2) yaitu: Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota.

Ketercapaian tujuan kedua (T2) diukur dari beberapa Indikator Kinerja dengan hasil capaian sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Capaian IKU Program Pendidikan Dasar

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program Utama	Anggaran				
						PAGU	REALISASI	%		
S2.1	Meningkatnya APM SD/SDLB/Paket A nasional mencapai 83,57%.	1	APM SD/SDLB/Paket A	82,94%	85.31%	102.86	Program Pendidikan Dasar	25,678 Trilyun	23,110 Trilyun	90
S2.2	Menurunnya APS Kelompok Usia 7-12 Tahun mencapai 0.7%	1	Persentase Peserta Didik SD/SDLB Putus Sekolah	1,5%	1.65%	110				
S2.3	Meningkatnya APK SMP/SMPLB/Paket B nasional mencapai 76,53%	1	APK SMP/SMPLB/ Paket B	71,98%	72.46%	100.67				
S2.4	Meningkatnya APM SMP/SMPLB/Paket B/Sederajat mencapai 58,17%	1	APM SMP/SMPLB/Paket B	55,97%	54.98%	98.23				
S2.5	Menurunnya APS Kelompok Usia 13-15 Tahun mencapai 1%	1	Persentase Peserta Didik SMP/SMPLB Putus Sekolah	1,8%	2.49/ 2.33	138.33/ 129.4				
S2.7	Menurunnya angka Putus Sekolah SD maksimal 0,7% dan SMP maksimal 1%, meningkatnya angka melanjutkan SD/SDLB sekurang-kurangnya 97%	1	Persentase Peserta Didik SD/SDLB Putus Sekolah	1,5%	1.65%	110				
		2	Persentase Peserta Didik SMP/SMPLB Putus Sekolah	1.8%	2.49	138.33				
		3	Persentase Lulusan SD/SDLB yang Melanjutkan Pendidikan	91%	76%	83.52				

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program Utama	Anggaran		
						PAGU	REALISASI	%
S2.8	Meningkatnya angka Melanjutkan Lulusan SMP/SMPLB ke sekolah menengah sekurang-kurangnya 94%	1 Persentase Lulusan SMP/SMPLB yang Melanjutkan ke Sekolah Menengah	88%	97.01%	110.24			
S2.9	Sekurang-kurangnya 85% SD/SDLB dan 70.9% SMP/SMPLB diakreditasi	1 Persentase SD/SDLB Berakreditasi	45%	75.8%	168.44			
		2 Persentase SMP/SMPLB Berakreditasi	21,3%	70.9%	332.86			
S2.10	Sekurang-kurangnya 90% SD/SDLB dan 100% SMP/SMPLB terakreditasi minimal B	1 Persentase SD/SDLB Berakreditasi Minimal B	28%	53. 61%	191.46			
		2 Persentase SMP/SMPLB Berakreditasi Minimal B	30%	-				
S2.11	Sekurang-kurangnya 40% SD/SDLB dan 60% SMP/SMPLB melaksanakan e-pembelajaran	1 Persentase SD Menerapkan e-Pembelajaran	16%	16%	100			
		2 Persentase SD memiliki fasilitas internet	10%	10%	100			
		3 Persentase SMP Menerapkan e-Pembelajaran	20%	20%	100			
		4 Persentase SMP memiliki fasilitas internet	20%	20%	100			
S2.12	Sekurang-kurangnya 85% kabupaten/kota memiliki SD SBI atau RSBI	1 Persentase Kabupaten/Kota memiliki minimal satu SD RSBI/SBI	39,4%	37. 36%	94.82			
		2 Nilai total tertimbang dari kompetensi internasional tingkat pendidikan dasar	160	12	7.50			
S2.13	Sekurang-kurangnya 75% kabupaten/kota memiliki SMP SBI atau RSBI	1 Persentase Kabupaten/Kota memiliki minimal satu SMP RSBI/SBI	33%/ 50%	72.64%/ 36.01%	220.12/ 72.2			
		2 Nilai total tertimbang dari kompetensi internasional tingkat pendidikan dasar	160	12	7.5			
S2.14	Sekurang-kurangnya 82% Guru SD/SDLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 80% bersertifikat	1 Persentase guru SD/SDLB Dalam Jabatan Berkualifikasi Akademik S-1/D-4	36%	35%	97.22			
		2 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima tunjangan	100%	Tunjangan khusus = 34.560 org; Tunjangan Fungsional = 293.215 org Tunjangan profesi = 148.509 org				
S2.15	Sekurang-kurangnya 98% Guru SMP/SMPLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 90% bersertifikat;	1 Persentase guru SMP/SMPLB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4	77%	76	98.70			
		2 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima tunjangan	100%	100	100			
S2.16	Sekurang-kurangnya 60% Kab/Kota Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Peserta Didik SD 1:20 Sampai 1:28 dan SMP 1:20 Sampai 1:32;	1 Persentase SD Yang Memiliki Rasio Guru Terhadap Siswa Sesuai SPM	3%	3	100			
		2 Rasio Guru Terhadap Siswa SD	1:33	1:32				
		3 Persentase SMP Yang Memiliki Rasio Guru Terhadap Siswa Sesuai SPM	3%	3	100			
		4 Rasio Guru Terhadap Siswa SMP	1:34	1:34	100			

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program Utama	Anggaran		
						PAGU	REALISASI	%
S2.17 Meningkatkan tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan meningkatnya angka melanjutkan minimal 95 % dan menurunnya angka putus sekolah maksimal 1 % untuk jenjang pendidikan dasar	1 Persentase Peserta Didik SD/SDLB Putus Sekolah	1,5%	1.65%	110				
	2 Persentase Lulusan SD/SDLB yang Melanjutkan pendidikan	91%	76%	83.52				
S5.2 Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah mengarusutamakan gender dalam pendidikan;	1 Rasio kesetaraan gender SD/SDLB	97,2%	97.03%	99.83				
S7.4 Seluruh Kabupaten dan Kota telah melaksanakan SPM Pendidikan Dasar	1 Persentase SD/SDLB Memenuhi SPM	60%	60%	100				
	2 Persentase SMP/SMPLB Memenuhi SPM	55%	55%	100				
	3 Persentase SD Yang Memiliki Rasio Guru Terhadap Siswa Sesuai SPM	3%	3%	100				
	4 Persentase SMP Yang Memiliki Rasio Guru Terhadap Siswa Sesuai SPM	3%	3%	100				
	5 Persentase Kab/Kota Yang Memiliki Tenaga Kependidikan Sesuai SPM	25%	25%	100				
SG.1 Meningkatnya APK gabungan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi sekurang-kurangnya 86,3%,	1 APM SD/SDLB/Paket A	82,94%	85.31%	102.86				
	2 APK SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	71,98%	72.46	100.67				
	3 APM SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	55,97%	86.79	155.07				

- 1. Indikator Kinerja Utama (IKU)** “meningkatnya APM SD/SDLB/Paket A nasional mencapai 83.57%” Ketercapaian target ini didukung oleh kegiatan Bantuan Operasional Sekolah dengan sasaran 27.166.972 siswa. Subsidi penyelenggaraan kelas layanan khusus (KLK) SD dengan sasaran 70 SD meliputi 1.540 siswa. Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin jenjang SD dengan sasaran 2.246.800 siswa di 33 provinsi. Rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan RKB SD, yang mencakup 1.157 ruang kelas.
- 2. Indikator Kinerja Utama (IKU)** “menurunnya angka putus sekolah kelompok usia 7-12% mencapai 0.7%,” pencapaian tersebut didukung melalui program BOS penyelenggaraan kelas layanan khusus (KLK) SD, penyediaan beasiswa bagi siswa miskin jenjang SD.
- 3. Indikator Kinerja Utama (IKU)** “meningkatnya angka melanjutkan SD/SDLB sekurang-kurangnya 97%”, kondisi tersebut dicapai melalui program BOS, kelas layanan khusus (KLK) SD, penyediaan beasiswa bagi siswa miskin jenjang SD.

4. **Indikator Kinerja Utama (IKU) “sekurang-kurangnya 90% SD/SDLB dan 100% SMP/SMPLB terakreditasi B”**, ketercapaian target ini melalui: Subsidi rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan RKB SD, sebanyak 1.157 ruang, pembinaan klub olahraga SD mencakup 528 SD, pembangunan ruang perpustakaan dan PSB SD yang mencakup sasaran 500 SD, peningkatan mutu alat dan buku pembelajaran SD, mencakup 1.000 SD, peningkatan mutu pembelajaran matematika dan IPA, mencakup 978 SD, peningkatan mutu pembelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, mencakup 600 SD, peningkatan mutu alat dan buku pembelajaran SD, mencakup 1.000 SD.

5. **Indikator Kinerja Utama (IKU) “Sekurang-kurangnya 85% kabupaten/kota yang memiliki SD RSBI/SBI”**, sasaran ini dicapai melalui subsidi rintisan dan pembangunan SD bertaraf internasional (RSBI) baru terhadap 35 SD, subsidi rintisan dan pembangunan SD bertaraf internasional (RSBI) lanjutan terhadap 138 SD, dan peningkatan mutu SD standar nasional dan bertaraf internasional.

3. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

Capaian program pendidikan menengah merupakan salah satu program penting dari Kementerian Pendidikan Nasional untuk mendukung tujuan ketiga (T3) yaitu: Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota.

Ketercapaian Tujuan ketiga (T3) diukur dari beberapa Indikator Kinerja dengan hasil capaian sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Capaian IKU Program Pendidikan Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
						Pagu	Realisasi	%
S3.1 Meningkatkan APK nasional melampaui 70.7%,	1 APK SMA/SMLB/SMK/Paket C	61,8%	65%	105.17	Program Pendidikan Menengah	3,836 Trilyun	3,644 Trilyun	94.99
S3.2 Sekurang-kurangnya 95.5% SMA/SMLB berakreditasi, dan 40%-nya berakreditasi minimal B	1 Persentase SMA/SMLB Berakreditasi	70,7%	82.8%	117.11				
	2 Persentase SMA/SMLB Berakreditasi Minimal B	23,4%	41.2%	176.07				
	3 Persentase kab/kota memiliki minimal 1 SMA berbasis keunggulan lokal	12,0%	20%	166.67				
	4 Rasio guru terhadap siswa SM	1:28	1:28	100				
S3.3 Sekurang-kurangnya 95.5% SMK berakreditasi, dan 30%-nya berakreditasi minimal B;	1 Persentase SMK Berakreditasi	70,7%	63.09%	89.24				
	2 Persentase SMK Berakreditasi Minimal B	22%	36%	163.64				
	3 Persentase kab/kota memiliki minimal 1 SMK berbasis keunggulan lokal	49%	49%	100				

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
						Pagu	Realisasi	%
S3.5	Sekurang-kurangnya 70% kabupaten/kota memiliki SMA dan SMK SBI atau RSBI;	4 Rasio guru terhadap siswa SM	1:28	1:28	100			
		1 Persentase Kab/Kota Memiliki Minimal 1 SMA SBI/RSBI	28,4%	42.25%	148.77			
		2 Persentase Kab/Kota Memiliki Minimal 1 SMK RSBI/SBI	62%	66.45%	107.18			
		3 Nilai total tertimbang medali dari kompetensi internasional tingkat pendidikan menengah	22	31	150			
		4 Persentase sekolah menengah dengan rasio guru terhadap siswa antara 1:20 sampai dengan 1:32	46%	50.4%	109.57			
S3.6	Sekurang-kurangnya 98% guru SMA/SMLB /SMK berkualifikasi S-1/D-4, dan sekurang-kurangnya 90% bersertifikat;	5 Persentase kab/kota yang memiliki rasio pengawas:SM minimal 1:15	85%	85%	100			
		1 Persentase Guru SMA/SMLB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4	77.1%	93.20%	120.88			
S3.7	Seluruh SMK bersertifikat ISO 9001:2008	2 Persentase Guru SMK Berkualifikasi Akademik S-1/D-4	87,6%	89.71%	102.40			
		1 Persentase SMK Bersertifikat ISO 9001:2000/ 9001:2008	25,6%	8%	31.25			
S3.8	Sekurang-kurangnya 75% SMA/SMLB dan 70% SMK melaksanakan e-pembelajaran	2 Jumlah SMA/SMLB bersertifikat ISO 9001/2008	316	316	100%			
		1 Persentase SMA/SMLB yang memiliki e-perpustakaan	10%	6.5%	65			
		2 persentase SMA/SMLB yang memiliki lab.komputer	24.5%	61%	239.21			
		3 Persentase SMK yang memiliki e-perpustakaan	20%	32%	160			
S3.9	Sekurang-kurangnya 70% Lulusan SMK Bekerja pada Tahun Kelulusan	4 Persentase SMA/SMLB yang memiliki laboratorium multimedia	70%	70%	100			
		1 Persentase SMK Berkemitraan Dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri	23.4%	60%	256.41			
S3.10	Seluruh SMK menyediakan layanan pembinaan pengembangan kewirausahaan	1 persentase kab/kota memiliki minimal 1 SMK berbasis keunggulan lokal	49%	49%	100			
		2 Persentase SMK Berkemitraan Dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri	23.4%	48%	205.13			
S3.12	Meningkatnya tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan meningkatnya angka melanjutkan minimal 95 % dan menurunnya angka putus sekolah	1 persentase peserta didik paket C dari putus sekolah SMA/SMK/MA	1.93%	1.90%	98.43			

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
						Pagu	Realisasi	%
	maksimal 1.69 % untuk jenjang pendidikan menengah							
S3.13	Menurunnya disparitas gender yang ditunjukkan dengan rasio kesetaraan gender menjadi 95 %	77%	23.4%	30.39				
SG.1	Meningkatnya APK gabungan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi sekurang-kurangnya 86,3%	61,8%	65%	105.18				

Sesuai dengan tabel pengukuran kinerja di atas, dari 24 IKU yang ada dalam program pendidikan menengah terdapat 19 IKU yang telah mencapai target bahkan melebihi dari target yang ditetapkan, 5 (lima) IKU belum dapat mencapai target .

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang realisasi capaian target kinerjanya belum mencapai 100% adalah sebagai berikut :

1. **Indikator Kinerja Utama “Persentase SMK berakreditasi”**. Target tahun 2010 adalah sebesar 70,7% dan hasil capaiannya sebesar 63,09%, pada indikator ini target tidak terpenuhi hal tersebut diakibatkan pada tahun 2010 Direktorat pembinaan SMK tidak secara langsung mengalokasikan biaya akreditasi yang dituntut dalam renstra direktorat. Namun demikian Direktorat Pembinaan SMK telah melaksanakan sosialisasi program ke pada dinas pendidikan propinsi/kabupaten/kota untuk lebih intensif melakukan pembinaan dan pengalokasian pembiayaan berkaitan dengan akreditasi. Pelaksanaan akreditasi dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan kab/kota dan indikator ini juga digambarkan pada janji kinerja SMK atau evaluasi diri SMK.
2. **Indikator Kinerja Utama “Presentase SMK bersertifikat ISO 9001 : 2000/9001 : 2008”**. Target tahun 2010 berjumlah 25,6% tercapai sebesar 8%, pada kegiatan ini tidak tercapai hal tersebut diakibatkan kurangnya alokasi anggaran untuk mendukung program tersebut. Pada tahun 2010 alokasi anggaran yang tersedia untuk kegiatan SMK bersertifikasi ISO dialokasikan melalui APBN-P sebanyak 212 lokasi. Kegiatan pembiayaan SMK bersertifikat ISO harus disediakan secara bersama baik Pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan, dan Komite Sekolah.
3. **Indikator Kinerja Utama “Jumlah SMA/SMALB yang memiliki e-perpustakaan”**. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan Direktorat Pembinaan SMA menetapkan target 10% dari jumlah SMA secara keseluruhan (11.306 SMA) yaitu sebanyak 1.113 SMA seharusnya sudah memiliki e-perpustakaan. Namun demikian berdasarkan hasil penjarangan data yang dilakukan Direktorat Pembinaan SMA bersama dengan dinas pendidikan propinsi maupun dinas pendidikan kabupaten/kota sampai dengan tahun 2010 baru sekitar 735 (6,5%) SMA yang baru memiliki e-perpustakaan. Keterbatasan sarana dan prasarana, dana serta sumber daya manusia di sekolah sebagai petugas perpustakaan berbasis IT masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Diperlukan

sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait untuk pencapaian target yang ditetapkan, sehingga tahun 2011 target IKU dapat tercapai secara maksimal, baik dalam pengalokasian dana melalui pusat, APBD propinsi, APBD kabupaten/kota maupun sekolah yang nantinya dipergunakan untuk melengkapi sarana dan prasarana sekolah dan pelatihan sumber daya manusia sebagai pengelola e-perpustakaan, sehingga target IKU dapat tercapai sesuai yang ditentukan.

4. Presentase peserta didik paket C dari putus sekolah SMA/SMK/MA
5. Rasio kesetaraan gender SMA/SMK/SMLB

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaian realisasi target kinerjanya telah mencapai target dan melebihi 100% adalah sebagai berikut :

1. **Indikator Kinerja Utama “APK SMA/SMALB/SMK/Paket C”.** Pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2010 mencapai 65%. Capaian ini melebihi dari apa yang telah ditargetkan pada tahun 2010 yaitu sebesar 61,8%. Terjadi peningkatan APK Sekolah Menengah sebesar 3,92% yang tersebar di 33 propinsi. Program yang mendukung peningkatan APK di lingkungan Direktorat Pembinaan SMA meliputi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA sebanyak 15 unit, yang intinya menambah daya tampung lulusan SMP dan sederajat. Selain program pembangunan USB SMA, untuk peningkatan daya tampung juga dibangun sebanyak 625 ruang kelas, rehabilitasi ruangan sekolah sebanyak 685 ruang serta pemberian Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) sebanyak 308.862 siswa SMA. Sedangkan program yang mendukung peningkatan APK di lingkungan Direktorat Pembinaan SMK adalah program pencitraan pada tahun 2010 melalui media elektronik maupun media cetak yang berdampak pada meningkatnya animo masyarakat, para lulusan SMP/MTs untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan. Selain itu program pemberian Beasiswa Khusus, Beasiswa Prestasi, BOMM, BKM, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Ruang Praktik Siswa (RPS), Pembangunan USB, dan komponen penunjang lainnya yang mendukung pencapaian APK SMK dimaksud.
2. **Indikator Kinerja Utama “Prosentase SMA/SMALB Berakreditasi”.** Ditargetkan pada tahun 2010 mencapai 70,7% sedangkan realisasinya mencapai 82,8%. Ketercapaian target SMA/SMALB berakreditasi melebihi yang ditentukan yaitu sebesar 117,11%. Berdasarkan data yang ada pada Direktorat Pembinaan SMA dan hasil koordinasi dengan Badan Akreditasi Nasional Sekolah Menengah, diperoleh jumlah SMA yang sudah terakreditasi baik A, B dan C sebanyak sekitar 9.300 sekolah (82,8%) dari jumlah SMA secara keseluruhan sebanyak 11.306 SMA negeri dan swasta.
3. **Indikator Kinerja Utama “Prosentase SMA/SMALB Berakreditasi Minimal B”.** Ditargetkan pada tahun 2010 mencapai 23,4% sedangkan realisasinya mencapai 41,2%. Ketercapaian target SMA/SMALB berakreditasi melebihi yang ditentukan yaitu sebesar 176,07%. Berdasarkan data yang ada pada Direktorat Pembinaan SMA, jumlah SMA terakreditasi minimal B sebanyak sekitar 4.658 SMA terdiri dari SMA pelaksana program RSSN, SSN, RSBI, serta SBI baik sekolah negeri maupun swasta. Sampai dengan tahun 2010 jumlah SMA pelaksana program RSSN sebanyak sekitar 3.265 SMA, pelaksana program RSBI sebanyak sekitar 320 SMA dan SMA lainnya yang bukan binaan Direktorat Pembinaan SMA ada sekitar 1.075 SMA.

4. **Indikator Kinerja Utama** "Prosentase Kabupaten/Kota memiliki minimal 1 SMA berbasis keunggulan lokal". Ditargetkan pada tahun 2010 mencapai 12% sedangkan realisasinya mencapai 20%. Ketercapaian target Kabupaten/Kota memiliki minimal 1 SMA berbasis keunggulan lokal melebihi yang ditentukan yaitu sebesar 166,67%. Tahun 2010 jumlah kabupaten/kota yang memiliki SMA program pendidikan berbasis keunggulan lokal sebanyak 93 kabupaten/kota di 33 propinsi. Jumlah sekolah pelaksanaan program PBKL yang sampai dengan tahun 2010 merupakan binaan Direktorat Pembinaan SMA sebanyak 100 SMA.
5. Rasio Guru terhadap siswa SMA/SMLB dan SMK
6. **Indikator Kinerja Utama** "Persentase SMK berakreditasi minimal B". Target tahun 2010 sebesar 22% dengan realisasi capaian sebesar 36% terjadi peningkatan capaian sebesar 14% dari target yang telah ditetapkan. Pada indikator ini terjadi peningkatan pemahaman para pengelola sekolah melalui sistem evaluasi diri yang sangat membantu pihak sekolah untuk mempersiapkan sistem pembelajaran di sekolah. Hal ini juga didukung oleh penganggaran pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Indikator ini juga didukung melalui program rehabilitasi bangunan dan revitalisasi peralatan.
7. **Indikator Kinerja Utama** "Presentase Kab/Kota memiliki minimal 1 SMK berbasis keunggulan lokal". Target tahun 2010 sebesar 49% dengan realisasi capaian sebesar 49% target terpenuhi sesuai yang telah ditetapkan. Pembukaan program studi keahlian telah dipahami oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan kabupaten/kota yang lebih mendekati pada potensi wilayah yang dimiliki oleh setiap daerah masing-masing yang selanjut disesuaikan dengan program studi keahlian yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMK. Selain dari hal tersebut indikator ini juga dicapai melalui program pemberian bantuan kewirausahaan yang menitikberatkan pada proses pembelajaran yang berorientasi bisnis dengan melibatkan secara langsung siswa, guru dan masyarakat sekitar sekolah, yang diharapkan dapat membentuk jiwa wirausaha, dan mendukung peningkatan ekonomi masyarakat daerah.
8. **Indikator Kinerja Utama (IKU)** "Persentase Kab/Kota minimal memiliki 1 SMA SBI/RSBI". Ditargetkan pada tahun 2010 mencapai 28,4% sedangkan realisasinya mencapai 42,25%. Sampai dengan tahun 2010, jumlah kabupaten/kota yang sudah memiliki SMA SBI/RSBI minimal 1 SMA sebanyak 134 kabupaten/kota [62,33%] dengan asumsi jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia berdasarkan data terbaru sebanyak 465 kabupaten/kota. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki SMA SBI/RSBI didominasi oleh propinsi dalam Jawa dan beberapa propinsi luar Jawa.
9. **Indikator Kinerja Utama** "Presentase Kab/Kota memiliki minimal 1 SMK RSBI/SBI". Target tahun 2010 sebesar 62% dan tercapai sebesar 66,45%, total kabupaten/kota tahun 2010 adalah 486 kab/kota, jumlah kabupaten/kota yang memiliki RSBI sebanyak 218 Kab/Kota, dengan jumlah SMK RSBI sampai dengan 2010 sebanyak 352 SMK, sedangkan untuk SMK SBI tidak tercapai hal tersebut diakibatkan oleh kemampuan SMK RSBI untuk beralih ke SBI secara umum belum siap dan belum optimal melakukan penilaian sesuai yang dipersyaratkan dalam komponen penilaian janji kinerja SMK RSBI. Direktorat pembinaan SMK mengharapkan setiap kabupaten/kota memiliki SMK RSBI, hal tersebut sebagai pemenuhan terhadap amanah undang-undang

sistem pendidikan nasional. Peningkatan jumlah tersebut harus dibarengi dengan capaian-capaian dari setiap SMK RSBI dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat, yang dibantu dengan pemberian dana stimulan pengembangan SMK RSBI baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah baik berupa sarana dan prasarana, kemampuan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan Kurikulum pendidikan.

10. Indikator Kinerja Utama “Nilai total tertimbang medali dari kompetensi internasional tingkat pendidikan menengah”.

Data realisasi jumlah medali emas yang diperoleh dalam kompetisi internasional tahun 2010 lingkup Direktorat Pembinaan SMA sebanyak 31 buah atau sebanyak 150% dari target semula sebanyak 22 medali emas. Perolehan medali emas antara lain dari olimpiade internasional Asian Physics Olimpiad (APho) di Taipeh, Taiwan sebanyak 1 buah emas; Internasional Biology Olympiad (IBO) di Changwon, Kora Selatan sebanyak 2 emas; internasional Physics Olimpiad (IPho) di Zagreb, Kroasia sebanyak 4 buah emas; internasional Chemistry Olympiad (IChO) di Tokio, Jepang sebanyak 1 buah emas; internasional Earth Science Olympiad (IESO) di Yogyakarta sebanyak 2 buah emas. Sedangkan melalui sekolah mitra kerja PASIAD Indonesia dan Surya Institute memperoleh 10 emas dan melalui sekolah mitra kerja dengan pihak lain, memperoleh 11 emas. Sedangkan Direktorat Pembinaan SMK pada tahun 2010 tidak ada alokasi program lomba bertaraf internasional. Kegiatan lomba yang bertaraf international hanya untuk persiapan mengikuti lomba WSC (world Skill Competition) tahun 2011 di Inggris. Kegiatan yang bersifat internasional pada jenjang SMK/vocational school dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Pada tahun 2010 kegiatan lomba yang diadakan oleh Direktorat Pembinaan SMK adalah berskala nasional.

11. Indikator Kinerja Utama “Jumlah SMA/SMALB bersertifikat ISO 9001/2008”.

Ditargetkan pada tahun 2010 mencapai 316 SMA sedangkan realisasinya 316 SMA (100%). Sampai dengan tahun 2010, jumlah SMA yang sudah bersertifikat ISO pada umumnya adalah SMA Bertaraf Internasional (SBI) dan sebagian SMA pelaksana program Rintisan Bertaraf Internasional (RSBI). Sebagai SMA pelaksana program RSBI diwajibkan untuk melaksanakan rintisan program ISO baik yang dibiayai melalui dana block grant APBN maupun dari sumber lainnya (pemerintah propinsi /kabupaten /sekolah). Hal ini merupakan salah satu perwujudan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2010.

12. Indikator Kinerja Utama “Jumlah SMA/SMALB yang memiliki Laboratorium Komputer”.

Ditargetkan pada tahun 2010 mencapai 24,5% sedangkan realisasinya 61% . Ketercapaian target SMA/SMALB yang memiliki Laboratorium Komputer melebihi yang ditentukan yaitu sebesar 239,21%. Sampai dengan tahun 2010, jumlah SMA yang memiliki laboratorium komputer sebanyak 6.897 SMA atau sebanyak 61% dari jumlah keseluruhan sebanyak 11.306 SMA yang tersebar di seluruh Indonesia. Laboratorium komputer yang ada di sekolah dibangun melalui dana APBN, APBD maupun dari swadaya sekolah. Mengingat era globalisasi saat ini, sehingga untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan sekolah salah satunya melalui pembelajaran berbasis IT.

13. **Indikator Kinerja Utama** “Presentasi SMK yang memiliki e-perpustakaan”. Target yang ingin dicapai tahun 2010 sebesar 20% dan terealisasi sebanyak 32%, kegiatan ini melebihi target yang ditetapkan. Dukungan pencapaian dari indikator tersebut melalui program bantuan pemberian prasarana berupa Laptop dan LCD untuk 6000 SMK non RSBI sebanyak 34.200 unit. Laptop yang diberikan kepada SMK non RSBI telah dilengkapi dengan e-learning/ buku elektronik yang berfungsi untuk menudukung proses pembelajaran baik diruang kelas maupun di luar kelas.

14. **Indikator Kinerja Utama** “Jumlah SMA/SMALB yang memiliki Laboratorium Multimedia”. Target pada tahun 2010 mencapai 20,7% sedangkan realisasinya sama yaitu sebesar 18,26%. Ketercapaian target SMA/SMALB yang memiliki Laboratorium multimedia sesuai yang ditentukan yaitu sebesar 100%. Berdasarkan data yang ada pada Direktorat Pembinaan SMA, sampai dengan tahun 2010 jumlah SMA yang memiliki laboratorium multimedia sebanyak 2.065 SMA atau sebanyak 18,26% dari jumlah keseluruhan sebanyak 11.306 SMA yang tersebar di seluruh Indonesia. Laboratorium multimedia yang ada di sekolah dibangun melalui dana APBN, APBD maupun dari swadaya sekolah.

15. **Indikator Kinerja Utama** “Presentase SMK berkemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri”. Target pada tahun 2010 sebanyak 23,4% dengan capaian sebesar 60%. Pencapaian target tersebut didukung oleh institusi industri yang semakin membutuhkan lulusan SMK dari berbagai bidang studi keahlian yang dimiliki oleh SMK dengan harapan lulusan SMK secara langsung dapat berhubungan dengan industri untuk menawarkan keahlian yang dimiliki sehingga terjadi kesesuaian kebutuhan dan ketersediaan lulusan yang dimiliki oleh SMK. Semua SMK dituntut untuk memiliki hubungan dengan industri untuk mendukung pelaksanaan prakerin maupun job matching serta kesesuaian kemampuan para siswa SMK yang akan memasuki dunia kerja. Kegiatan ini secara rutin dilaksanakan oleh Direktorat PSMK maupun oleh dinas pendidikan di propinsi dan kabupaten/kota.

16. Presentase SM dengan rasio guru terhadap siswa 1:20 sampai 1:32

17. Presentase Kab/Kota yang memiliki rasio pengawas:SM

18. Presentase Guru SMA/SMLB berkualifikasi Akademik S1/D4

19. Presentase Guru SMK berkualifikasi Akademik S1/D4

4. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI

Capaian program pendidikan tinggi merupakan salah satu program penting dari Kementerian Pendidikan Nasional untuk mendukung Tujuan keempat (T4) strategis Kementerian, yaitu: Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional dan berkesetaraan di semua provinsi.

Ketercapaian tujuan keempat (T4) strategis tersebut diukur dari beberapa IKU dengan hasil capaian sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.4 Capaian IKU Program Pendidikan Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran (Rp)
-------------------	-------------------	--------	-----------	---	---------	---------------

							Pagu	Realisasi	%	
S4.1	Meningkatnya APK PT dan PTA usia 19-23 tahun mencapai 30%	1	APK PT dan PTA Usia 19-23 Thn *)	22,8%	23,88%	104.74	Program Pendidikan Tinggi	23.240.391.969	20.662.998.630	88.91%
		2	APK prodi sains natural dan teknologi (usia 19-23 tahun)	4.1%	5,74%	140				
S4.2	Sekurang-kurangnya 100% PTN dan 50% PTS memperoleh Sertifikat ISO 9001:2008	1	-							
S4.3	Sekurang-kurangnya 100% prodi PT berakreditasi dan 80% berakreditasi minimal B	1	Persentase Prodi Terakreditasi	82%	72%	87.80				
		2	Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	67,8%	62,0%	91.45				
S4.4	Sekurang-kurangnya 3 PT masuk peringkat 300 terbaik dunia dan sekurang-kurangnya 11 PT (kumulatif) masuk dalam peringkat 600 terbaik dunia versi THES, sekurang-kurangnya 12 PT masuk dalam 200 terbaik Asia versi THES	1	Jumlah Perguruan Tinggi Masuk TOP 500 Dunia	3	4	133.33				
		2	Jumlah PT Otonom	50	20	40.				
		3	Jumlah PT Beropini WTP	7	6	85.71				
S4.5	Sekurang-kurangnya 94% dosen program S-1 dan program diploma berkualifikasi minimal S-2	1	Persentase Dosen Berkualifikasi S-2	62,5%	62%	99.20				
S4.6	Sekurang-kurangnya 15% dosen pasca sarjana (S-2, profesi, spesialis, dan S-3) berkualifikasi S-3	1	Persentase Dosen Berkualifikasi S-3	9,5%	9,5%	100%				
S4.7	Sekurang-kurangnya 75% dosen PT telah bersertifikat profesi	1	Persentase Dosen Bersertifikat	23%	21,9%	95.22				
S4.8	Meningkatkan persentase dosen dengan publikasi nasional menjadi 0.19%	1	Persentase Dosen Dengan Publikasi Nasional	0,15%	17,2%	11466.67				
		2	Jumlah HAKI Yang Dihasilkan	75	76	101.3				
S4.9	Meningkatkan persentase dosen dengan publikasi internasional menjadi 0.8%	1	Persentase Dosen Dengan Publikasi Internasional	0,4%	0,75%	187.5				
S4.10	Menurunnya disparitas gender yang ditunjukkan dengan rasio kesetaraan gender menjadi 104 %	1	Rasio Kesetaraan gender PT	111,8%	108,9%	102.66				
		2	Rasio Mahasiswa Vokasi : Total Mahasiswa Vokasi dan S-1	19%	18,7%	98.42				
		3	Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa	10%	7.30%	73				
SG.1	Meningkatnya APK gabungan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi sekurang-kurangnya 86,3%,	1	APK PT dan PTA Usia 19-23 Thn *)	22,8%	23,88%	104.74				

Berdasarkan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut diatas, dari 16 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 11 sasaran strategis yang ada pada program pendidikan tinggi hanya ada 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang realisasi capaian target kinerjanya telah mencapai 100%, serta 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang realisasi capaian target kinerjanya belum mencapai 100% sedangkan 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) lainnya realisasi capaian target kinerjanya melebihi 100%.

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang realisasi capaian target kinerjanya belum mencapai 100% adalah sebagai berikut :

1. **Indikator Kinerja Utama (IKU) “Jumlah PT Otonom”** Dalam upaya peningkatan status kelembagaan perguruan tinggi menuju perguruan tinggi otonom ditargetkan pada tahun 2010 adalah 50 perguruan tinggi yang berstatus otonom, tetapi dalam realisasi capaiannya hanya 20 perguruan tinggi yang berstatus otonom. Ketidaktercapaian dalam pelaksanaan target tersebut yaitu pasca diberlakukannya Amar keputusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada tanggal 31 Maret 2010 yang membatalkan undang-undang Badan Hukum Pendidikan. Pembatalan ini menyebabkan ketiadaan payung hukum bagi perguruan tinggi yang pada saat itu telah menjadi BHMN dan BHP, sekaligus tertutupnya perguruan tinggi yang telah mengusulkan untuk menjadi PT BHP. Capaian sebanyak 20 perguruan tinggi yang dimaksudkan pada laporan ini merupakan perguruan tinggi yang telah memperoleh penetapan sebagai Badan Layanan Umum, dimana perguruan tinggi tersebut diberikan otonomi dalam pengelolaan keuangan khususnya dana yang diperoleh dari masyarakat.
2. **Indikator Kinerja Utama (IKU) “Jumlah PT Beropini WTP”**. Indikator Kinerja Utama untuk jumlah perguruan tinggi beropini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ditargetkan pada tahun 2010 mencapai 7 perguruan tinggi, sedangkan dalam realisasinya hanya 6 perguruan tinggi, yaitu :
 1. Institut Pertanian Bogor (IPB);
 2. Institut Teknologi Bandung (ITB);
 3. Universitas Gadjah Mada (UGM);
 4. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI);



5. Universitas Airlangga (UNAIR);
 6. Universitas Sumatera Utara (USU); yang memperoleh predikat WTP sedangkan 1 PT yaitu Universitas Indonesia sedang dalam proses audit.
3. **Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Prodi Terakreditasi”**. Capaian Indikator Utama (IKU) persentase prodi terakreditasi, pada tahun 2010 ditargetkan mencapai 82% sedangkan realisasinya adalah 62%. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan penambahan program studi yang diakreditasi oleh BAN PT, dan ada pembukaan program studi baru ditahun 2010 sebanyak 207 program studi. Kecepatan penambahan program studi dengan pelaksanaan tambahan program studi yang diakreditasi menyebabkan secara prosentase capaian kinerjanya menurun. Upaya terus dilaksanakan untuk mencapai target tersebut dengan mendorong PT mengajukan usulan untuk diakreditasi dan memfasilitasi Badan Akreditasi Nasional (BAN) untuk lebih banyak melaksanakan akreditasi di perguruan tinggi.
 4. **Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B”**. Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase prodi PT berakreditasi minimal B pada tahun 2010 ditargetkan sebesar 67.8% dan realisasinya adalah sebesar 62%. Rendahnya target yang dicapai tahun 2010 diakibatkan adanya penurunan kualitas program studi secara umum. Upaya yang dilakukan adalah membatu pembiayaan bagi perguruan tinggi untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya termasuk sarana yang dibutuhkan melalui program hibah kompetisi baik PTN maupun PTS, dan pemberian hibah bagi PTS sehat melalui peningkatan kualitas institusi dan program studi.
 5. **Indikator Kinerja Utama (IKU) “Rasio Mahasiswa Vokasi : Total Mahasiswa Vokasi dan S-1”**. Realisasi Indikator Kinerja Utama untuk rasio mahasiswa vokasi terhadap total mahasiswa vokasi dan S1 ditargetkan mencapai 19% sedangkan realisasinya adalah 18,7%. Penurunan kinerja ini lebih banyak diakibatkan adanya kebijakan

terutama untuk pendidikan guru yang mensyaratkan minimal berpendidikan Sarjana yang sebelumnya dapat memiliki Program Diploma 2 (D2). Upaya ke depan dalam meningkatkan proporsi jumlah mahasiswa vokasi dilakukan dengan membuka pendidikan tidak hanya program D3 tetapi juga program D1. Usaha ini akan terus dilakukan mengingat kebutuhan lapangan pekerjaan yang tersedia.

6. **Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Dosen Berkualifikasi S-2”.** Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase dosen berkualifikasi S-2 tahun 2010 ini ditargetkan sebesar 62,5 % dan realisasinya 62,0%. Ketidaktercapaian jumlah dosen dengan kualifikasi pendidikan S2 disebabkan sebagian dosen yang direncanakan dapat menyelesaikan studi S2-nya dalam waktu 2 tahun pada kenyataannya tidak dapat menyelesaikannya tepat waktu, sehingga kumulatif jumlah dosen berkualifikasi S2 menjadi tidak tercapai pula.
7. **Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Dosen Bersertifikat”.** Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase dosen bersertifikat tahun 2010 ini ditargetkan sebesar 23,0 % dan realisasinya 21,9%. Dari rencana sertifikasi sebanyak 37.790 dosen, sampai dengan tahun 2010 (dosen + guru besar) jumlah dosen yang lulus sertifikasi hanya mencapai 36.030 dosen (terdapat sekitar 4,6 % yang tidak lulus sertifikasi). Kedepan akan lebih disempurnakan mekanisme sertifikasi agar kuota sertifikasi tahun 2011 sebanyak 24.000 dapat tersertifikasi seluruhnya, sehingga target dosen bersertifikat pada tahun 2011 dapat dicapai dengan baik.
8. **Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa”.** Capaian IKU untuk persentase mahasiswa penerima beasiswa ditargetkan pada tahun 2010 adalah mencapai 10% dari total mahasiswa baru dan realisasi sampai dengan akhir Desember 2010 sebesar 7.3%. Capaian ini baru menghitung beasiswa yang sumber dananya dari pemerintah, sedangkan beasiswa yang berasal dari dana masyarakat seperti beasiswa Sampoerna, Bakrie, dll yang sampai pada penyusunan LAKIP ini datanya belum terkumpul secara keseluruhan.

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaian realisasi target kinerjanya melebihi 100% adalah sebagai berikut :

1. **Indikator Kinerja Utama (IKU) “APK PT dan PTA Usia 19-23 Tahun”.** Pencapaian Angka Partisipasi Kasar usia 19-23 tahun pada tahun 2010 mencapai 23,88%. Capaian ini melebihi dari apa yang telah ditargetkan pada tahun 2010 yaitu sebesar 22,88%, hal ini disebabkan bertambahnya program studi baru sebanyak 207 program studi, adanya peningkatan pada pelaksanaan program pembelajaran jarak jauh, dan peningkatan mahasiswa pada program studi yang diminati masyarakat.
2. **Indikator Kinerja Utama (IKU) “Rasio Kesetaraan Gender PT”.** Ditargetkan pada tahun 2010 mencapai 111,8% sedangkan realisasinya mencapai 108,8%, rasio kesetaraan gender ini melebihi dari yang telah ditargetkan, artinya jumlah partisipasi mahasiswa perempuan jika dibandingkan dengan mahasiswa laki-laki masih lebih tinggi, namun telah mulai mencapai keseimbangan. Program studi yang menyumbangkan kontribusi terbesar untuk kinerja ini berasal dari program studi

kependidikan, sejalan dengan program peningkatan kualifikasi guru dimana profesi guru lebih banyak diminati perempuan.

3. **Indikator Kinerja Utama (IKU) “Jumlah Perguruan Tinggi Masuk Top 500 Dunia”.** Dalam konteks internasionalisasi dan mensejajarkan perguruan tinggi Indonesia dengan perguruan tinggi lain di dunia, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan mutu dan daya saing. Pemerintah telah memberikan dukungan kepada perguruan tinggi untuk masuk dalam sistem pemeringkatan *Times Higher Education Supplement* (THES). Pada tahun 2010 pemerintah menargetkan 5 perguruan tinggi masuk dalam 500 besar dunia sebagai Indikator Kinerja Utama.

Pada tahun 2010, pemeringkatan yang dilakukan oleh THES sudah tidak ada lagi. Pemeringkatan yang ada berdasarkan *QS World* Ranking menampilkan 4 perguruan tinggi masuk 500 besar yaitu Universitas Indonesia, UGM, ITB dan Unair. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas ini dengan pengalokasian dana hibah WCU bagi perguruan tinggi yang masuk 500 besar dunia dan 200 besar Asia.

4. **Indikator Kinerja Utama (IKU) “APK Prodi Sains Natural dan Teknologi (Usia 19-23 Tahun”.** Ditargetkan pada tahun 2010 mencapai 4.1% sedangkan realisasinya adalah sebesar 5.74%. Peningkatan ini merupakan keberhasilan dari upaya peningkatan program revitalisasi MIPA, pertanian dan perbaikan sarana dan prasarana program studi teknik.
5. **Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Dosen Dengan Publikasi Nasional”.** Untuk capaian persentase dosen dengan publikasi nasional pada tahun 2010 ditargetkan 14,8% (23.630 orang), sedangkan dalam capaian realisasi untuk indikator kinerja ini mencapai 17,2% (27.506 orang). Kenaikan tingkat capaian ini disebabkan oleh diperhitungkannya kontributor karya ilmiah elektronik pada portal Garuda, selain publikasi nasional berupa penulisan artikel pada 197 jurnal terakreditasi, 159 jurnal yang diusulkan untuk diakreditasi dan penulis buku ajar yang diusulkan di tahun 2010.
6. **Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Dosen Dengan Publikasi Internasional”.** Realisasi Jumlah Total Dosen dengan Publikasi Internasional : 2023 dosen (1,26%). Meskipun jumlah tersebut telah memenuhi target, namun kemungkinannya masih banyak yang melaksanakan publikasi internasional secara mandiri ke luar negeri yang belum terinventarisir oleh DP2M karena tidak dilaporkan. Di samping itu masih banyak dosen WNI yang mengajar atau belajar di luar negeri, bersama karya-karya terbarunya dipublikasikan di luar negeri. Berdasarkan data hasil pemetaan DP2M tahun 2010, jumlah publikasi Internasional Perguruan Tinggi seluruh Indonesia tercatat 3213 judul, dengan rata-rata 3 penulis per judul, maka jumlah dosen dengan publikasi internasional mencapai 9639 dosen, atau sekitar 6% dosen kita telah melaksanakan publikasi internasional. Sehingga target 1,2% untuk Tahun 2010 telah tercapai.

- 7 **Indikator Kinerja Utama (IKU) “Jumlah HAKI Yang Dihasilkan”.** Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dihasilkan sifatnya kumulatif sampai dengan Tahun 2010 sebanyak 76. Pengertian HAKI di sini hanya terhitung Paten. Padahal pengertian Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya ada Hak Cipta, Hak Pemuliaan Varietas, Hak Merk Industri, Hak Desain Logo, dan lain-lain. Jika hanya paten, maka ditinjau dari segi prosesnya bisa melebihi 4 tahun anggaran, bahkan 7 atau 10 tahun, dan terkait dengan lembaga yang berkompeten memproses paten baik Dalam maupun Luar Negeri, maka berkaitan dengan output kinerja DP2M berbasis paten, sifatnya hanya memfasilitasi proses untuk perolehan paten. Maka perlu dipertimbangkan, mengenai indikator kinerja secara proporsional. Pada masa depan seharusnya ada pengembangan program lebih lanjut, guna meningkatkan perolehan HAKI baik paten maupun lainnya tersebut. Berdasarkan data pemetaan yang berhasil dikumpulkan oleh DP2M telah diperoleh 681 HAKI/Paten, 2546 Teknologi Tepat Guna , 3739 model desain, dan 5321 buku ajar, dari para dosen di seluruh Indonesia.



5. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Capaian program pengembangan SDM pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan merupakan salah satu program penting dari Kementerian Pendidikan Nasional untuk mendukung 4 (empat) tujuan strategis Kementerian, yaitu:

- a. Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota (T1);
- b. Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota (T2);
- c. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota (T3);

- d. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (T5);

Ketercapaian keempat tujuan strategis tersebut diukur dari beberapa IKU dengan hasil capaian sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.5 Capaian IKU Program BSDMP dan PMP

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran			
						Pagu	Realisasi	%	
S1.2 Meningkatkan kualifikasi untuk pendidik PAUD formal (TK/TKLB) diharapkan 85% berpendidikan minimal S-1/D-4 dan 85% bersertifikat, sedangkan untuk Pendidik PAUD nonformal diharapkan telah dilatih sekurang-kurangnya 55%	1	Persentase Guru Dalam Jabatan Berkualifikasi Akademik Minimal S-1/ D-4	50,8%	Di hapus sesuai kesepakatan dg DPR	84.82	Program Pengembangan SDM Pendidikan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan	9.353.236.181.000	8.756.770.667.674	93,62%
	2	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	33,6%	28.50%					
	3	Persentase satuan Pendidikan anak usia dini yang telah dilakukan penjaminan mutu pendidikan	20%	Baru diprogramkan tahun 2011					
	4	Persentase pendidik yang telah disupervisi kinerjanya sesuai persyaratan standar pendidik	10%	Baru diprogramkan tahun 2011					
	5	Tersedianya jenis penghargaan bagi PTK	0%	Di hapus sesuai kesepakatan dg DPR					
	6	Persentase kasus pendidik dan tenaga kependidikan yang ditangani	10%	Di hapus sesuai kesepakatan dg DPR					
S2.6 Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SD/SDLB dan SMP/SMPLB mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan	1	Persentase Kepala Sekolah mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan Profesionalisme Berkelanjutan	10%	15.6%	156				
	2	Persentase Pengawas Sekolah mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan Profesionalisme Berkelanjutan	100%	100%	100				
	3	Persentase guru mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme berkelanjutan	34.0%	13.1%	38.5				
	4	Jumlah kumulatif pegawai Kemdiknas yang mengikuti diklat	10% /3430 org	3680 org	107.28				
S2.15 Sekurang-kurangnya 91.1% Guru SMP/SMPLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 84.9% bersertifikat;	1	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	33,6%	28.50%	84.82				
	2	Persentase satuan Pendidikan dasar yang telah dilakukan penjaminan mutu pendidikan	20%	7.9%	39.50				
S3.4 Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SMA/SMLB dan SMK mengikuti Pelatihan Profesional	1	Persentase Kepala Sekolah mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan	10%	15.6%	156				

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
						Pagu	Realisasi	%
Berkelanjutan	Profesionalisme Berkelanjutan							
	2 Profesionalisme Berkelanjutan	100%	100%	100				
	3 Persentase guru mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme berkelanjutan	34.0%	13.1%	38.5				
	4 Jumlah kumulatif pegawai kemdiknas yang mengikuti diklat	10% /3430 org	3680 org	107.28				
S3.6	1 Sekurang-kurangnya 91.1% guru SMA/SMLB/SMK berkualifikasi S-1/D-4, dan sekurang-kurangnya 84.9% bersertifikat;	33,6%	28.50%	84.82				
	2 Persentase satuan Pendidikan menengah yang telah dilakukan penjaminan mutu pendidikan	20%	30.80%	154%				
S4.3	1 Sekurang-kurangnya 100% prodi PT berakreditasi dan 80% berakreditasi minimal B	20%	Baru diprogramkan tahun 2011	-				

Sesuai dengan Permendiknas No. 44 tahun 2010, BSDMP dan PMP mempunyai 13 IKU yang digunakan sebagai ukuran dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian. Namun, sesuai dengan rapat dengan DPR hanya 10 (sepuluh) IKU yang disepakati. Ketiga IKU yang tidak disepakati yaitu 1). IKU “persentase guru dalam jabatan berkualifikasi akademik minimal S1/D4”; 2). IKU “persentase kasus pendidik dan tenaga kependidikan yang ditangani”; dan 3). IKU “tersedianya jenis penghargaan bagi PTK”. Dari 10 (sepuluh) IKU yang ada di BSDMP dan PMP hanya 5 (lima) IKU yang tercapai targetnya.

Persentase ketercapaian guru bersertifikat untuk guru TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK secara keseluruhan mencapai 28,50% dari target 33,6 %. Selain faktor keterbatasan dana terhadap kuota, faktor geografis dan rendahnya komitmen guru terhadap pentingnya sertifikasi dan kewajiban mengajar yang masih di bawah 24 jam per minggu menjadi kendala ketidaktercapaian pelaksanaan program ini.

Penjaminan mutu pendidikan dasar dengan indikator target sebesar 20%, baru tercapai 7,9%. Ketidaktercapaian ini disebabkan oleh proses penjaminan mutu mulai dilakukan tahun 2010 dan masih berfokus pada pendidikan tinggi dan dasar. Sedangkan realisasi indikator pendidikan menengah yang ditentukan 20% mencapai 30,8%. Kelebihan ketercapaian disebabkan pada tahun 2010 lebih difokuskan pada pendidikan menengah sebagai upaya untuk memperbaiki lulusan tingkat SLTA. Selanjutnya, untuk penjaminan

mutu pendidikan tinggi sampai tahun 2010 masih menjadi tanggungjawab Ditjen Pendidikan Tinggi.

Ketercapaian persentase guru mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme berkelanjutan untuk guru secara berurutan sebagai berikut guru TK ketercapainya 128.1%, guru SD/SDLB ketercapainya 50.7%, guru SMP/SMPLB ketercapainya 34.8%, guru SMA/SMALB ketercapainya 27.5%, dan guru SMK ketercapainya 60.2%. Untuk guru TK/TKLB melebihi dari indikator yang ditentukan, dimana indikator yang ditentukan sebesar 15,6%, sementara yang telah tercapai 19.12%. Kelebihan ketercapaian disebabkan karena semua jenis diklat yang dilakukan oleh guru TK masih dihitung secara menyeluruh, tidak hanya peningkatan kompetensi di bidangnya, tetapi juga menyangkut semua jenis diklat yang diikuti termasuk pembinaan guru secara menyeluruh, dimana ada PPPPTK yang menangani TK/TKLB secara langsung. Sedangkan PPB untuk guru SD, SMP, SMA dan SMK belum tercapai karena jumlah guru yang ada sangat besar meskipun sudah melibatkan KKG, MGMP dan lembaga terkait. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk program di tahun yang akan datang.

Ketercapaian Persentase Kepala Sekolah mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan Profesionalisme Berkelanjutan sebesar 15,6% dari indikator yang telah ditentukan 10%. Hal ini sesuai dengan Inpres No 1 tahun 2010 tentang penjaminan mutu pendidikan yang mewajibkan kepala sekolah untuk mengikuti pelatihan. Kemudian, persentase pengawas sekolah mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Berkelanjutan mencapai 100 % dari indikator yang telah ditentukan sebesar 100% sehingga sama antara pelaksanaan dan indikator yang telah ditentukan.

Ketercapaian Jumlah kumulatif pegawai Kemdiknas yang mengikuti diklat mencapai 107, 28% dari indikator yang telah ditetapkan sebesar 20 %. Pada tahun 2010, program ini masih menjadi tanggung jawab Pusdiklat Pegawai. Berdasarkan informasi dari Pusdiklat, tercapainya jumlah kumulatif tersebut karena surat keputusan (SK) honorer maka diklat prajabatan yang semula untuk honorer dialihkan dialihkan ke peserta reguler. Selain itu, target jumlah peserta reguler lebih besar dibandingkan jumlah honorer.

Ketercapaian Persentase pendidik yang telah disupervisi kinerjanya sesuai persyaratan standar pendidik belum bisa diukur, dari indikator yang telah ditentukan sebesar 20%. Hal ini disebabkan sampai saat ini proses sertifikasi masih menjadi fokus. Kemudian kinerja guru yang sudah sertifikasi tahun 2006, 2007 dan 2008, akan disupervisi kinerjanya setelah guru tersebut bekerja selama 2 tahun setelah mendapatkan tunjangan profesi. Oleh karena itu, tahun 2011 dan 2012 proses supervisi kinerja bagi guru harus dilaksanakan.

6. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Capaian program penelitian dan pengembangan merupakan salah satu program penting dari Kementerian Pendidikan Nasional. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tujuan strategis Kementerian sebagai berikut :

- a. Tersedia dan terjangkau layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota (T1);

- b. Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota (T2);
- c. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota (T3);
- d. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional dan berkesetaraan di semua provinsi (T4);
- e. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (T5).

Ketercapaian tujuan strategis tersebut diukur dari beberapa IKU dengan hasil capaian sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.6 Capaian IKU Program Balitbang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
						Pagu	Realisasi	%
1 Meningkatkan standar mutu dan pelaksanaan akreditasi	1 Persentase sekolah/madrasah diakreditasi (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/ MAK, SLB)	51%	71.60%	140.39	Program Penelitian Dan Pengembangan	1.213.020	1.071.698	88,35
	2 Persentase prodi dan Institusi PT diakreditasi	20%	20%	100		.968.000	.042.494	
	3 Persentase program/satuan PNF di akreditasi (PAUD, Paket A, B, C, Paket C Kejuruan, LPK, PKBM)	0,52%	0.35%	67.31				
	4 Jumlah peraturan turunan SNP yang dikembangkan dan disempurnakan	7	7	100				
	5 Jumlah Peserta didik yang dinilai kompetensinya sesuai dengan SNP	12.212.234	12.042.031	98.32				
2 Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penelitian dan pengembangan Kemdiknas	1 Jumlah peraturan perundang-undangan	5	8	160				
	2 Jumlah informasi dan publikasi kelitbang	4	3	75				
3 Meningkatkan kualitas kurikulum dan sistem pembelajaran	1 Jumlah model kurikulum dan pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran aktif dan menghasilkan lulusan kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa.	40	82	205				
	2 Persentase provinsi dan kab/kota yang mengembangkan kurikulum pada tingkat daerah.	97%	97%	100				
	3 Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum secara mandiri	36%	36%	100				
4 Meningkatkan hasil penelitian untuk perumusan kebijakan	1 Jumlah rekomendasi kebijakan pendidikan berbasis penelitian	15	15	100				

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
						Pagu	Realisasi	%
nasional	2 Jumlah daerah yang bergabung dalam jaringan kerjasama penelitian	2	2	100				
5 Meningkatkan kualitas penilaian pendidikan	3 Jumlah judul hasil penelitian yang diterbitkan dan didesiminasikan.	5	5	100				
	1 Persentase mata pelajaran pendidikan dasar dan menengah yang hak cipta buku teksnya telah dibeli (N Total = 885 Jilid Mapel)	72,4	72.4%	100				
	2 Jumlah PTK yang dinilai kompetensinya sesuai dengan SNP	4000	4000	100				
	3 Jumlah soal yang disusun untuk bank soal untuk berbagai kepentingan penilaian pendidikan	84.300	84.300	100				
	4 Jumlah model penilaian pendidikan	67	67	100				

Berdasarkan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut diatas, dari 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 5 sasaran strategis yang ada pada program penelitian dan pengembangan digambarkan bahwa ada 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang realisasi capaian target kinerjanya telah mencapai 100%, serta 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang realisasi capaian target kinerjanya belum mencapai 100% sedangkan 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) lainnya realisasi capaian target kinerjanya melebihi 100%.

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang realisasi capaian target kinerjanya belum mencapai 100% adalah sebagai berikut :

1. **Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Program/Satuan PNF Diakreditasi (PAUD,Paket A,B,C Paket C kejuruan, LKP, PKBM)”,** dimana realisasi capaian targetnya baru sebesar 0.35%, capaian ini lebih kecil dari target 2010 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0.52%.

Dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun (2008-2009), BAN PNF telah menghasilkan 1.053 program/satuan PNF dengan status Terakreditasi yang tersebar diseluruh Indonesia. Tahun 2010 BAN PNF mempunyai sasaran akreditasi sebanyak 560 program/satuan PNF yang diakreditasi. Capaian target akreditasi program/satuan PNF dapat digambarkan seperti tabel berikut:

Tabel 3.7 Realisasi IKU 6.3 Balitbang 2010

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	IKU/IKK	TARGET 2010	REALISASI 2010	Dalam Angka*	N (Populasi)
6	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	IKU 6.3 PERSENTASE PROGRAM/SATUAN PNF DIAKREDITASI (PAUD, PAKET A, B, C, PAKET C KEJURUAN, LKP, PKBM)	0,52%	0,35%	560	162.118
6.1	FASILITASI STANDAR MUTU DAN PELAKSANAAN AKREDITASI	IKK 6.1.9 PERSENTASE SATUAN PAUD NONFORMAL DIAKREDITASI	0,00%	0,1%	101	101.254
		IKK 6.1.10 PERSENTASE PROGRAM PAKET A DIAKREDITASI	0,00%	0,13%	8	6.273
		IKK 6.1.11 PERSENTASE PROGRAM PAKET B DIAKREDITASI	0,00%	0,15%	26	17.587
		IKK 6.1.12 PERSENTASE PROGRAM PAKET C DIAKREDITASI	5,00%	0,20%	21	10.735
		IKK 6.1.13 PERSENTASE PROGRAM PAKET C KEJURUAN DIAKREDITASI	0,00%	-	-	-
		IKK 6.1.14 PERSENTASE PROGRAM/SATUAN KEAHLIAN LKP DIAKREDITASI	6,00%	2,51%	387	15.440
		IKK 6.1.15 PERSENTASE PKBM DIAKREDITASI	5,00%	0,2%	17	10.829
		IKK 6.1.16 PERSENTASE SATUAN TBM DIAKREDITASI	0,00%	0,0%	-	-

Sumber: Sekretariat BAN PNF Tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa antara jumlah target dan sasaran akreditasi PNF terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena:

- Untuk target persentase program/satuan PNF diakreditasi (PAUD, Paket A, B, C, Paket C Kejuruan, LKP, PKBM) dengan jumlah **0,52%** (841 program/satuan PNF dari Populasi 162.118 program/satuan PNF) hanya mampu menghasilkan sasaran sebesar **0,35%** (560 program/satuan PNF dari 162.118 program/satuan PNF). Jumlah sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kemdiknas sebesar 0,52% (841 program/satuan PNF) mengalami pengurangan jumlah sasaran sejak penepatan pagu sementara sampai dengan hasil RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Komisi X DPR RI, sehingga target BAN PNF berkurang menjadi 560 program/satuan PNF.
- Persentase Satuan PAUD Nonformal diakreditasi. Sasaran PAUD Nonformal mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari jumlah awal 0,0% menjadi 18,0% dari sasaran akreditasi pada tahun 2010 (560). Hal ini dikarenakan banyaknya minat pengelola PAUD Nonformal untuk mengikuti pelaksanaan akreditasi PNF serta sebaran data yang digunakan dalam penentuan IKK tersebut belum valid pada penetapan sasaran di Renstra Kemdiknas sehingga sasaran IKK sejumlah 0,0%
- Persentase Program Paket A diakreditasi. Sasaran Program Paket A mengalami kenaikan dari jumlah awal 0,0% menjadi 1,4% dari sasaran akreditasi pada tahun 2010 (560). Hal ini disebabkan sebaran data yang digunakan dalam penentuan IKK tersebut belum valid pada penetapan sasaran di Renstra Kemdiknas sehingga sasaran IKK sejumlah 0,0%.
- Persentase Program Paket B diakreditasi. Sasaran Program Paket B mengalami kenaikan dari jumlah awal 0,0% menjadi 4,6% dari sasaran akreditasi pada tahun 2010 (560). Hal ini dikarenakan sebaran data yang digunakan dalam penentuan IKK tersebut belum valid pada penetapan sasaran di Renstra Kemdiknas sehingga sasaran IKK sejumlah 0,0%

- Persentase Program Paket C diakreditasi. Sasaran Program Paket C mengalami kenaikan dari jumlah awal 0,0% menjadi 3,8% dari sasaran akreditasi pada tahun 2010 (560). Hal ini dikarenakan sebaran data yang digunakan dalam penentuan IKK tersebut belum valid pada penetapan sasaran di Renstra Kemdiknas sehingga sasaran IKK sejumlah 0,0%
- Persentase Program Paket C Kejuruan diakreditasi. Sasaran Program Paket C Kejuruan mengalami angka yang stabil atau dalam jumlah yang sama yaitu 0,0% dari sasaran akreditasi pada tahun 2010 (560). Hal ini dikarenakan Program Paket C Kejuruan sampai dengan tahun 2010 belum berlangsungnya program paket C Kejuruan di Indonesia. Hal ini telah kami konfirmasi dengan Direktorat Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal terutama pada tahun 2010.
- Persentase Satuan PKBM diakreditasi. Sasaran Satuan PKBM mengalami penurunan dari jumlah awal 5,0% menjadi 3,0% dari sasaran akreditasi pada tahun 2010 (560). Hal ini dikarenakan sebaran pengelola PKBM belum mengerti benar tentang manfaat akreditasi yang diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 yang salah satu batang tubuhnya adalah satuan pendidikan baik formal maupun nonformal tidak dapat mengeluarkan ijazah apabila satuan pendidikan belum diakreditasi.

Faktor tersebut yang sebenarnya menjadi kendala BAN PNF dalam melaksanakan tupoksinya. Sebaran data yang tiap tahunnya selalu berubah-ubah, pengelola program/satuan PNF yang merasa bahwa kurangnya manfaat dari pelaksanaan akreditasi PNF, serta dukungan berbagai pihak yang menjadikan sasaran akreditasi PNF pada tahun berjalan terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah/sasaran akreditasi Formal baik Sekolah/Madrasah (BAN S/M) dan Perguruan Tinggi (BAN PT).

2. **Indikator Kinerja Utama (IKU) "Jumlah Informasi dan Publikasi Kelitbangan"** yang capaian targetnya baru 3, lebih kecil dari target 2010, yang berjumlah 4 yaitu (1) Jurnal Dikbud, (2) Jurnal Bahasa Inggris, (3) Warta Balitbang, (4) Publikasi Kelitbangan. Belum tercapainya target yang dicanangkan, disebabkan karena salah satu dari 4 (empat) outputnya yakni Publikasi Kelitbangan akan dilaksanakan pada tahun 2011.
3. **Indikator Kinerja Utama (IKU) "Jumlah peserta didik dinilai kompetensinya sesuai dengan SNP"** capaian target 2010 sejumlah 12.042.031 peserta didik, lebih kecil dari target yang direncanakan. Pencapaian target yang tidak sesuai dengan yang direncanakan tersebut dikarenakan rencana target 2010 itu adalah estimasi jumlah peserta didik, sedangkan realisasi jumlah peserta didik yang mengikuti ujian nasional jenjang formal maupun non formal sesuai dengan data dalam nota kesepahaman (MOU) dengan penyelenggaraan ujian nasional provinsi.

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaian realisasi target kinerjanya melebihi 100% adalah sebagai berikut :

1. **Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase Sekolah/Madrasah Diakreditasi (TK/RA, SD/MI, SMP/M.Ts, SMA/MA, SMK/MAK, SLB)"** yang mencapai 71.60%, melebihi target tahun 2010 yang hanya 51%. Sebagaimana diketahui, IKU tersebut ditopang dengan pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah, sebagai bentuk implementasi UU No. 20 Tahun 2003 dan PP No.19 Tahun 2005, sebagai upaya pemerintah dalam rangka penjaminan mutu pendidikan pendidikan formal.

Keberhasilan pencapaian target tersebut antara lain disebabkan:

- a. Pada komponen mekanisme pelaksanaan akreditasi Sekolah/Madrasah terdapat kegiatan pelatihan asesor. Berhubung jumlah asesor yang merupakan hasil pelatihan tahun 2008 dan 2009 masih berlaku dan masih mencukupi, maka komponen tersebut tidak diperhitungkan. Hanya beberapa provinsi yang kuota akreditasinya banyak tetapi ketersediaan asesornya kurang, yang diberikan komponen tersebut, sehingga dengan demikian dapat menambah target.
- b. Satuan biaya akreditasi per jenjang pada DIPA dihitung rata-rata. BAN S/M menguraikan satuan biaya tersebut menjadi satuan biaya rata-rata per masing-masing provinsi. Di samping itu, perbedaan transport, juga ikut berpengaruh pada penambahan target akreditasi.

2. **Indikator Kinerja Utama (IKU)** "Jumlah Model Kurikulum dan Pembelajaran yang menekankan pada Pembelajaran Aktif dan menghasilkan Lulusan Kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter Bangsa", yang mencapai target 82 model, capaian target ini lebih tinggi dari target tahun 2010 yang telah ditetapkan sebanyak 40 model.

Keberhasilan pencapaian target yang melebihi rencana tersebut antara lain disebabkan karena di samping 40 naskah model kurikulum satuan pendidikan yang dihasilkan sebagaimana sesuai dengan yang telah direncanakan, dihasilkan pula 42 naskah lain berupa 40 naskah kajian kurikulum dan 2 bahan/naskah pendidikan kewirausahaan. (sebagai capaian target IKK 6.3.1 s.d. 6.3.4).

3. **Indikator Kinerja Utama (IKU)** "Jumlah Peraturan Perundang-undangan" yang mencapai target 8 naskah lebih tinggi dari target tahun 2010 sebanyak 5 naskah. Pencapaian target yang melebihi rencana tersebut disebabkan karena terdapat 3 naskah rancangan undang-undang yang seharusnya ditetapkan pada tahun 2009, baru ditetapkan pada tahun 2010.

7. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA

Capaian program pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra merupakan salah satu program penting dari Kementerian Pendidikan Nasional untuk mendukung tujuan strategis Kementerian, yaitu: Terwujudnya Bahasa Indonesia sebagai jati diri dan martabat bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah, serta wahana pengembangan IPTEKS (T6).

Ketercapaian tujuan strategis tersebut diukur dari beberapa IKU dengan hasil capaian sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.8 Capaian IKU Program pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
						Pagu	Realisasi	%
S6.1 Sekurang-kurangnya 80 % bahasa daerah di Indonesia terpetakan	1 Persentase Bahasa Daerah Terpetakan (N Total = 746)	59% (442 bahasa daerah)	67% (499 bahasa daerah)	112.8	Program Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Dan Sastra	118.272.823.200	113.748.253.939	96.17%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
						Pagu	Realisasi	%
S6.2 Sekurang-kurangnya 20% guru bahasa Indonesia memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sesuai standar nasional	1 Persentase Guru Bahasa Indonesia Memiliki Kemahiran Berbahasa Indonesia Sesuai Standar Nasional	-	-	-				
S6.3 Sekurang-kurangnya 6 majalah bahasa dan sastra nasional diterbitkan secara berkala	1 Jumlah Majalah Bahasa dan Sastra Nasional Diterbitkan Secara Berkala	1	1	100				
	2 Persentase Kabupaten/Kota Yang Terbina Dalam Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Luar Ruang Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	6% (30 Kab/kota)	1% (5 kab/kota)	16.6				
S6.4 Sekurang-kurangnya 50 negara memiliki pusat pembelajaran Bahasa Indonesia	1 Jumlah Negara Memiliki Pusat Pembelajaran Bahasa Indonesia	35	35	100%				
	2 Jumlah pengembangan pusat pembelajaran BIPA di luar negeri	8	8	100				

Dari 6 (enam) IKU dalam program Pengembangan dan Pembinaan bahasa dan Sastra, hanya 1 (satu) IKU yang capaiannya melebihi target yang ditetapkan, 3 (tiga) IKU mencapai target (100%), dan 1 (satu) IKU yang belum mencapai target (16.6%), serta terdapat 1 (satu) IKU yang belum dilaksanakan, karena baru akan dilaksanakan pada tahun 2011. IKU yang belum mencapai target adalah persentase kabupaten/kota dengan penggunaan bahasa di media luar ruang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana IKU telah menargetkan 6% (30 Kab/Kota), tetapi hanya 1% (5 Kab/Kota) yang capai terealisasi. Kegagalan pencapaian target pada IKU tersebut dikarenakan kurangnya dana yang tersedia.

IKU yang melebihi target adalah persentase bahasa daerah di Indonesia terpetakan yang direncanakan 59% (442 bahasa daerah) dapat terealisasi mencapai 67% (499 bahasa daerah). Pencapaian yang melebihi target ini karena adanya efektifitas pencarian data di lapangan. Memperhatikan ketercapaian kinerja di atas, untuk ke depan perlu perencanaan anggaran yang lebih cermat sehingga minimal semua IKU dapat mencapai target yang ditetapkan.

Ada satu IKU yaitu Persentase Guru Bahasa Indonesia Memiliki Kemahiran Berbahasa Indonesia Sesuai Standar Nasional yang belum terlaksana pada tahun 2010 ini, karena program tersebut baru akan dilaksanakan pada tahun 2011.

8. CAPAIAN KINERJA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

Capaian program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya merupakan salah satu program penting dari Kementerian Pendidikan Nasional untuk mendukung tujuan strategis Kementerian yang ke tujuh, yaitu: Tersedianya sistem tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional (T7).

Ketercapaian tujuan strategis tersebut diukur dari beberapa IKU dengan hasil capaian sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.9 Capaian IKU Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
						Pagu	Realisasi	%
S7.1 Terwujudnya opini audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012	1 Persentase Satker Tertib Pengelolaan SAK dan SIMAK BMN	80%	80%	100	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1.305.264.105.000.-	1.157.817.202.817.000	88.66
	2 Laporan Keuangan Unit-Unit Utama Terintegrasi /Terkonsolidasi Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100				
S7.2 Meningkatnya skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sekurang-kurangnya 79	1 Skor LAKIP Kementerian	76	72.66	95.6				
	2 Persentase Satker UPT Pusat di Daerah Yang Menerapkan Standar ISO 9001-2008	20%	20%	100				
	3 Persentase Satker di Lingkungan Unit Utama Yang Menerapkan Standar ISO 9001-2008	100%	100%	100				
	4 Persentase Unit Utama Yang Menerapkan Manajemen Berbasis Kinerja	50%	50%	100				
	5 Persentase Satuan Kerja Yang Tingkat Kehadiran Pegawaiinya Tidak Kurang Dari 98%	95%	88.40%	93.05				
	6 Sistem Remunerasi Berbasis Kinerja Diterapkan di Lingkungan Kementerian	-						

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
						Pagu	Realisasi	%
S7.3 Seluruh Kementerian/Lembaga mengacu pada Renstra pembangunan pendidikan nasional dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan	1	Persentase Realisasi Program dan Kegiatan Kementerian	95%	89.29%	93.98			
	2	Persentase Realisasi Anggaran Kementerian	95%	92.60%	97.47			
	3	Persentase Anggaran Yang Tidak Diblokir	90%	97.25%	108.06			
	4	Persentase Satker/Unit Kerja Kementerian Terkoneksi Secara Daring (Online)	95%	80.03%	84.24			
	5	Tingkat Penerapan E-Administrasi di Lingkungan Kementerian (Persen)	65%	77.18%	118.74			
	6	Persentase Satuan Pendidikan Formal dan Unit Kerja Terkoneksi ke Sistem Pembelajaran Daring (Online)	12%	26.96%	224.67			
	7	Persentase Kerja Sama Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Pendidikan Yang Ditindaklanjuti	90%	90%	100			
	8	Persentase Penyelenggaraan Pendataan Pendidikan	15%	15%	100			
	9	Jumlah Naskah Data Statistik dan Pendayagunaan Data	33	33%	100			
	10	Persentase Unit Kerja Pusat dan SKPD Yang Terhubung Dalam Jaringan Pendataan	40%	39.9%	99.97			
	11	Persentase Masyarakat (Peserta Didik, Orang Tua, Tenaga Pendidik, Satuan Pendidikan, Dunia Industri, Media dan Publik, Pendidikan Daerah, Rekanan, dan Pelajar dan Mahasiswa Asing) Yang Memahami Tentang Kebijakan Pendidikan	72%	79.69%	106.5			

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja diatas, Setjen yang mempunyai 19 IKU telah dapat merealisasikan 4 (empat) IKU yang realisasi capaian target kinerjanya telah melebihi 100%,

8 [delapan] IKU yang mencapai target 100%, dan 6 [enam] IKU yang realisasinya belum mencapai 100%, serta 1 [satu] IKU yang masih belum terlaksana pada tahun 2010. Analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis indikator kinerja utama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

- a) Persentase satker UPT pusat di daerah yang menerapkan standar ISO 9001:2008.
Capaian kinerja untuk sasaran tersebut didukung oleh indikator sasaran, yaitu meningkatkan standar layanan birokrasi di semua unit kerja Kemdiknas di tingkat Unit Pelaksana Teknis daerah, Perguruan Tinggi dan Sekolah Menengah Kejuruan meliputi 55 UPT, 172 SMK, 36 PT dengan capaian target 20%. Secara kuantitatif sasaran tersebut sudah mencapai target, sehingga hasil evaluasi akhir terhadap kegiatan ini tidak mengalami hambatan.
- b) Persentase satker di lingkungan unit utama yang menerapkan standar ISO 9001:2008.
Capaian kinerja untuk sasaran tersebut didukung oleh indikator sasaran, yaitu meningkatkan standar layanan birokrasi di semua unit kerja Kemdiknas di tingkat pusat meliputi 47 unit kerja eselon II dengan capaian target 100%. Secara kuantitatif sasaran tersebut sudah mencapai target, sehingga hasil evaluasi akhir terhadap kegiatan ini tidak mengalami hambatan.
- c) Skor LAKIP Kementerian.
Capaian kinerja untuk sasaran tersebut didukung oleh indikator sasaran, yaitu ketepatan dalam penyusunan Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah meliputi 6 laporan/naskah dengan capaian target 76%.
IKU skor lakip untuk 2010 ini belum diketahui capaian realisasinya, karena masih menunggu hasil penilaian evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sedangkan untuk skor lakip tahun 2009 sebesar 73.5. meskipun skor tersebut belum mencapai target namun Kemdiknas masih dalam 2 besar penilaian predikat baik oleh Menpan.
- d) Laporan keuangan unit-unit utama terintegrasi/terkonsolidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Capaian kinerja untuk sasaran tersebut, didukung oleh indikator sasaran yaitu meningkatnya ketepatan dalam pengelolaan anggaran di lingkungan Kemdiknas, meliputi 27 laporan kegiatan dengan capaian target 100%. Berdasarkan hasil evaluasi akhir kegiatan ini tidak mengalami hambatan, karena waktu pelaksanaan dari kegiatan tersebut harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- e) Persentase unit utama yang menerapkan manajemen berbasis kinerja
Capaian kinerja untuk sasaran tersebut didukung oleh indikator sasaran, yaitu peningkatan kompetensi dosen dan non dosen, serta penerapan anggaran berbasis kinerja, yang meliputi 51 kegiatan dan 7 naskah, dengan capaian target 50%. Berdasarkan hasil evaluasi akhir, pelaksanaan kegiatan ini tidak mengalami hambatan.
- f) Persentase satker yang tingkat kehadiran pegawainya tidak kurang dari 98% (basis: OH).
Capaian kinerja untuk sasaran tersebut didukung oleh indikator sasaran, yaitu pemrosesan dan penyelesaian kasus pelanggaran disiplin bagi pejabat pengelola kepegawaian, yang meliputi 1682 SK/surat dan 4 kegiatan, dengan capaian target 88,40%. Berdasarkan hasil evaluasi akhir, pelaksanaan kegiatan ini tidak mengalami hambatan.
- g) Persentase satker Kementerian terkoneksi secara daring (Online).

Capaian kinerja untuk sasaran tersebut didukung oleh indikator sasaran, yaitu meningkatnya sistem pembelajaran jarak jauh (*distance learning*), untuk mendukung perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal sebagai media pembelajaran jarak jauh, dan juga untuk memfasilitasi manajemen pendidikan, yang meliputi 2 perangkat, 8 lokasi, 224 unit, 24.051 Nodes, 136 satker/tahun, 12 bulan, 1 paket, 3 dokumen, 2 aplikasi, dan 2.366 orang, dengan capaian target 80,03%. Berdasarkan hasil evaluasi akhir, pelaksanaan kegiatan ini belum mencapai target karena proses pengusulan anggaran mengalami hambatan dalam pengusulan dokumen pendukung (tidak sesuai jadwal).

- h) Tingkat penerapan E-Administrasi di lingkungan Kementerian (Persen).

Capaian kinerja untuk sasaran tersebut didukung oleh indikator sasaran, yaitu meningkatnya pengelolaan administrasi yang sesuai tugas dan fungsi, yaitu meliputi 12 bulan, 2 edisi, 16 dokumen, 3 event, 1.008 orang, 9 paket, dan 2 unit dengan capaian 77,18%. Berdasarkan hasil evaluasi akhir, pelaksanaan kegiatan ini belum mencapai target karena proses pengusulan anggaran mengalami hambatan dalam pengusulan dokumen pendukung (tidak sesuai jadwal).

- i) Persentase satuan pendidikan formal dan unit kerja terkoneksi ke sistem pembelajaran daring (*Online*).

Capaian kinerja untuk sasaran tersebut, didukung oleh indikator sasaran yaitu meningkatnya kualitas belajar TVE interaktif (VOD) melalui jaringan pendidikan nasional, yang meliputi 370 program, 1 aplikasi, 0 unit, 10 lokasi, 18 SMPT, 320 PSB, 7.421 orang, 12 bulan 5.000 siswa, 20.000 Node dan 3 dokumen dengan capaian target 26,96%. Berdasarkan hasil evaluasi akhir, pelaksanaan kegiatan ini belum mencapai target karena proses pengusulan anggaran mengalami hambatan dalam pengusulan dokumen pendukung (tidak sesuai jadwal).

- j) Persentase Kerja Sama Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Pendidikan yang ditindaklanjuti.

Capaian kinerja untuk sasaran tersebut didukung oleh indikator sasaran, yaitu tersedianya bahan kebijakan dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan program pengembangan pendidikan, yang meliputi 15 laporan dan 12 kegiatan dengan capaian 90%. Berdasarkan hasil evaluasi akhir, pelaksanaan kegiatan ini tidak mengalami hambatan.

- k) Persentase realisasi program dan kegiatan.

Capaian kinerja untuk sasaran tersebut telah mencapai 89,29%. Belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan belum menerima seluruh data yang seharusnya menyampaikan laporan masuk dan petugas penginput data belum memahani tentang penghitungan realisasi fisik.

- l) Persentase Penyelenggaraan Pendataan Pendidikan

Capaian kinerja untuk sasaran tersebut didukung oleh tiga indikator sasaran, yaitu: terpetakannya data Satuan Pendidikan, data Peserta Didik Dan PTK dan data Pendidikan Keaksaraan didalam Padati-Web, dengan capaian target 15% ini sesuai dengan yang ditargetkan. Berdasarkan hasil evaluasi akhir, pelaksanaan kegiatan ini tidak mengalami hambatan.

- m) Jumlah Naskah Data Statistik dan Pendayagunaan Data

Capaian kinerja untuk sasaran tersebut didukung oleh indikator sasaran, yaitu tersedianya 39 Naskah Data Statistik dan Pendayagunaan Data, sehingga capaian target IKU adalah 100%.

Statistik Pendidikan Nasional sebanyak 10 naskah:

- (1) Statistik TK/ RA/ BA;
- (2) Statistik SD/ MI;
- (3) Statistik SMP/ MTs;
- (4) Statistik SMA/ MA;
- (5) Statistik SMK/ MAK;
- (6) Statistik Pendidikan Menengah (SMP/ MTs, SMA/ MA, dan SMK/ MAK);
- (7) Statistik SLB;
- (8) Statistik Persekolahan (TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK, SLB);
- (9) Statistik Pendidikan Tinggi (PTN, PTS, dan PTK);
- (10) Statistik Pendidikan Nonformal (Pendidikan Keaksaraan, PAUD Nonformal, Pendidikan Kesetaraan, serta Kursus dan Kelembagaan).

Analisis dan Pendayagunaan Data Pendidikan Bidang Statistik Pendidikan Dasar sebanyak 3 naskah, yakni

- (1) Analisis Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- (2) Analisis Pendidikan Sekolah Dasar;
- (3) Analisis Pendidikan Sekolah Luar Biasa.

Analisis dan Pendayagunaan Data Bidang Statistik Pendidikan Menengah sebanyak 10 naskah, yakni:

- (1) Analisis: Kajian Peran Sekolah dalam Pendidikan Nasional (mikro-Kabupaten);
- (2) Analisis: Dampak Sertifikasi Guru terhadap Kinerja Guru (SP);
- (3) Analisis: Variabel Instrumen Pendataan Pendidikan (Provinsi);
- (4) Analisis: Kebutuhan SDM dan Sarana/ Prasarana dalam Alih Fungsi SMA menjadi SMK (Kabupaten);
- (5) Pendayagunaan Data: Indikator Pendidikan Menengah;
- (6) Pendayagunaan Data: Direktori Individu Sekolah Menengah Atas menurut Provinsi;
- (7) Pendayagunaan Data: Informasi Individu Sekolah Kejuruan menurut Provinsi;
- (8) Pendayagunaan Data: Sekolah Kejuruan Dalam Angka menurut Kabupaten;
- (9) Pendayagunaan Data: Data Pokok Sekolah Menengah Atas menurut Kabupaten;
- (10) Pendayagunaan Data: Perkembangan Pendidikan Menengah di Indonesia.

Analisis dan Pendayagunaan Data Bidang Statistik Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Nonformal sebanyak 7 naskah, yakni

- (1) Profil Pendidikan Tinggi (lanjutan),
- (2) Analisis Progran Studi Pendidikan Tinggi,
- (3) Analisis SDM Pendidikan Tinggi,
- (4) Analisis Lama Studi Lulusan Pendidikan Tinggi,
- (5) Profil Pendidikan Nonformal (lanjutan),
- (6) Kajian PKBM/ Kursus/ TBM,
- (7) Analisis SDM Kabupaten/ Kota;

Analisis dan Pendayagunaan Data Pendidikan sebanyak 3 naskah, yakni:

- (1) Penyusunan Indikator Kuantitatif Pendidikan Internasional (World Education Indicators) Kemdiknas - Unesco - OECD,
- (2) Penyusunan Naskah Pendayagunaan Data Statistik Pendidikan,
- (3) Analisis Kebijakan Pendayagunaan Pendidikan Untuk Pimpinan.

Berdasarkan hasil evaluasi akhir, pelaksanaan kegiatan ini tidak mengalami hambatan.

- n) Persentase Unit Kerja Pusat dan SKPD Yang Terhubung Dalam Jaringan Pendataan. Capaian kinerja untuk sasaran tersebut didukung oleh 4 indikator sasaran, yaitu terimplementasinya Sistem Informasi Pendataan Pendidikan, terkoordinasinya SKPD Pendataan Pendidikan, terbinanya Pendataan Pendidikan di SKPD Pendidikan, dan terintegrasinya Pangkalan Data Pendidikan dengan Pangkalan Data Kemendiknas. Dari 4 sasaran indikator diatas di tahun 2010 ini baru 2 indikator karena indikator keluaran yang terbinanya Pendataan SKPD Pendidikan dan terintegrasinya Pangkalan Data Pendidikan tidak ada. Capaian kegiatan ini adalah 39.9%, sehingga sesuai dengan yang ditargetkan, berdasarkan hasil evaluasi akhir, pelaksanaan kegiatan ini tidak mengalami hambatan.
- o) Persentase masyarakat peserta didik, orang tua, tenaga pendidik, satuan pendidikan, dunia industri, media dan publik, pendidikan daerah, rekanan, dan pelajar dan mahasiswa asing) yang memahami tentang kebijakan pendidikan dengan sasaran strategis 72%. Capaian kinerja untuk sasaran tersebut didukung oleh sasaran, yaitu ketepatan pelaksanaan kebijakan, rencana dan program di lingkungan kemdiknas, serta analisis, berita media masa yang mendukung kebijakan pemerintah meliputi 2 laporan kegiatan dengan capaian 79.69%. berdasarkan hasil evaluasi akhir, pelaksanaan kegiatan ini tidak mengalami hambatan.
- p) IKU "persentase tingkat kehadiran pegawai", IKU persentase satuan kerja yang tingkat kehadiran pegawainya tidak kurang dari 98% tahun 2010 ditargetkan sebesar 95% dan realisasinya hanya tercapai 93.05%. ketidaktercapaian kehadiran pegawai tidak sesuai target yang diinginkan disebabkan kehadiran pegawai tidak sesuai jam kehadiran yang sudah ditentukan dan adanya tingkat eror perangkat elektronik, sehingga tidak terekam dalam absensi elektronik (sidik jari)
- q) IKU "persentase Satker/unit kerja kementerian terkoneksi secara daring (online). IKU persentase satker/unit kerja kementerian terkoneksi secara daring (online) tahun 2010 ditargetkan sebesar 95%, namun realisasinya hanya tercapai 80.03%. ketercapaian target kegiatan ini disebabkan anggaran kegiatan jarkindas di blokir, sehingga proses revisi anggaran menghambat dalam pencapaian target.

9. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR

Capaian program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur merupakan salah satu program penting dari Kementerian Pendidikan Nasional untuk mendukung tujuan strategis Kementerian yang ke tujuh, yaitu: Tersedianya sistem tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional (T7).

Ketercapaian tujuan strategis tersebut diukur dari beberapa IKU dengan hasil capaian sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.10 Capaian IKU Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran (Rp)			
						Pagu	Realisasi	%	
S7.1 Terwujudnya opini audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012	1	Persentase Satker dengan Temuan Audit Berkonsekuensi Penyetoran ke Kas Negara >500 juta	18%	3,38%	18.78	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemdiknas	252.923.247	178.914.027	70,74
	2	Persentase Satker di Lingkungan Kemdiknas Memiliki SPI	45%	25,34%	56.31				
	3	Persentase Penyelesaian Temuan Audit	73,3%	47,05%	64.19				
S7.2 Meningkatnya Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sekurang-kurangnya 79	1	Persentase Unit Yang Diaudit Manajemen Berbasis Kinerjanya	30,0%	61,15%	203.83				

Berdasarkan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut diatas, dari 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 2 sasaran strategis yang ada pada program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur ada 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang realisasi capaian target kinerjanya belum mencapai 100% dan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) realisasi capaian target kinerjanya melebihi 100%.

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang realisasi capaian target kinerjanya belum mencapai 100% adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase Satker di Lingkungan Kemdiknas Memiliki SPI". Capaian IKU Persentase Satker di Lingkungan Kemdiknas memiliki SPI sebesar 25,34%, capaian ini lebih kecil 19,66% dari yang ditargetkan pada tahun 2010 yaitu sebesar 45%. Penyebab dari kurangnya capaian ini adalah masih terbatasnya jumlah SDM yang kompeten dari satuan kerja Kemdiknas untuk membentuk unit fungsional Satuan Pengawasan Intern. Inspektorat Jenderal Kemdiknas telah mengupayakan untuk terus mensosialisasikan dan membina satuan kerja agar dapat mempercepat pembentukan unit SPI. Keberadaan SPI pada satuan kerja sangat penting dalam memacu upaya percepatan perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Kemdiknas karena salah satu rekomendasi BPK untuk memperbaiki kinerja laporan keuangan adalah dengan meningkatkan efektifitas Sistem Pengendalian Internal.

Inspektorat Jenderal saat ini juga sedang dalam tahap revisi Permendiknas Nomor 16 Tahun 2009 tentang Satuan Pengawasan Intern menjadi Satuan Pengendalian Internal. Setelah proses revisi selesai, maka Inspektorat Jenderal akan mengintensifkan sosialisasi dan internalisasi Permendiknas yang baru. Inspektorat Jenderal juga akan terus meningkatkan proses pembinaan teknis kepengawasan internal kepada SPI satuan kerja Kemdiknas melalui workshop, pelatihan, serta monitoring dan evaluasi.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase Penyelesaian Temuan Audit". Sampai dengan akhir tahun 2010, total temuan audit (Itjen, BPKP dan BPK-RI) adalah sebanyak 34.000 temuan, dan telah ditindaklanjuti sebanyak 15.997 temuan (47.05%). Ketidaktercapaian sebesar 26,25% dari 73,30% yang ditargetkan terjadi karena masih

belum cepatnya penyelesaian rekomendasi temuan hasil pengawasan yang dilakukan oleh auditan. Kondisi ini utamanya terjadi pada satuan kerja di daerah otonomi yang kerap melakukan proses mutasi dan promosi, sehingga aparat yang bertanggungjawab untuk menangani tindak lanjut tidak mampu melaksanakan kewajibannya secara optimal. Namun demikian Inspektorat Jenderal terus melakukan intensifikasi penyelesaian tindak lanjut melalui program monitoring, rapat koordinasi, dan penyelesaian kasus khusus. Diharapkan pada tahun mendatang dapat terbentuk sistem monitoring Itjen atas tindak lanjut rekomendasi temuan hasil audit Itjen, BPK-RI, dan BPKP yang lebih efektif, sehingga dapat mempercepat proses penyelesaian temuan audit.

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaian realisasi target kinerjanya melebihi 100% adalah sebagai berikut :

- 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Unit Yang Diaudit Manajemen Berbasis Kinerjanya”.** Capaian IKU Persentase Unit yang diaudit Manajemen Berbasis Kinerjanya sebesar 61,15% yang lebih besar 31,15% dari yang ditargetkan yaitu sebesar 30%. Keterjangkauan audit Itjen yang berfokus pada pembenahan manajemen kantor auditan dengan berbasis pada kinerja merupakan faktor pendukung tercapainya skor LAKIP Kemdiknas sekurang-kurangnya sebesar 79 poin. Audit Itjen akan sangat membantu auditan dalam mengidentifikasi hal-hal yang masih dinilai lemah dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mencakup perencanaan, pengukuran, dan pelaporan. Hal ini benar adanya mengingat skor LAKIP diberikan tidak hanya sekedar kepada menariknya tampilan dan penyajian sistematika LAKIP tetapi sudah sejauhmana SAKIP dapat diimplementasikan secara utuh dan efektif.
- 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Satker dengan Temuan Audit Berkonsekuensi Penyetoran ke Kas Negara >500 juta”.** Capaian 2010 pada IKU Persentase Satker dengan Temuan Audit Berkonsekuensi Penyetoran ke Kas Negara >500 juta secara harfiah memang terlihat jauh lebih kecil daripada yang ditargetkan. Target sebesar 18% hanya dapat dicapai sebesar 3,38%. Hal ini berarti terdapat kekurangan sebesar 14,62% dan bermakna bahwa hanya 18,78% yang dapat direalisasikan dari target yang ditetapkan. Namun demikian apabila dikaji lebih mendalam dari makna IKU tersebut maka sesungguhnya yang terjadi adalah peningkatan akuntabilitas dari auditan. Dari hasil audit tahun 2010 diketahui bahwa hanya ada 10 Auditan (9 Universitas dan 1 LPMP) yang memiliki temuan berkonsekuensi penyetoran ke kas Negara dengan nilai > Rp 500.000.000. Fakta tersebut mencerminkan bahwa auditan sudah lebih tertib dalam mengelola keuangan negara. Dapat pula dinyatakan bahwa kondisi tersebut merupakan hasil dari pembinaan Inspektorat Jenderal yang berperan sebagai penjamin mutu (*Quality Assurance*). Di sisi lain hal ini juga merupakan salah satu indikator kinerja yang menggambarkan telah berfungsinya pembinaan oleh Satuan Pengawasan Internal yang dibimbing teknis pengawasannya oleh Itjen Kemdiknas. Oleh karena itu capaian tahun 2010 ini sesungguhnya dapat pula dipandang sebagai prestasi bagi Inspektorat Jenderal.

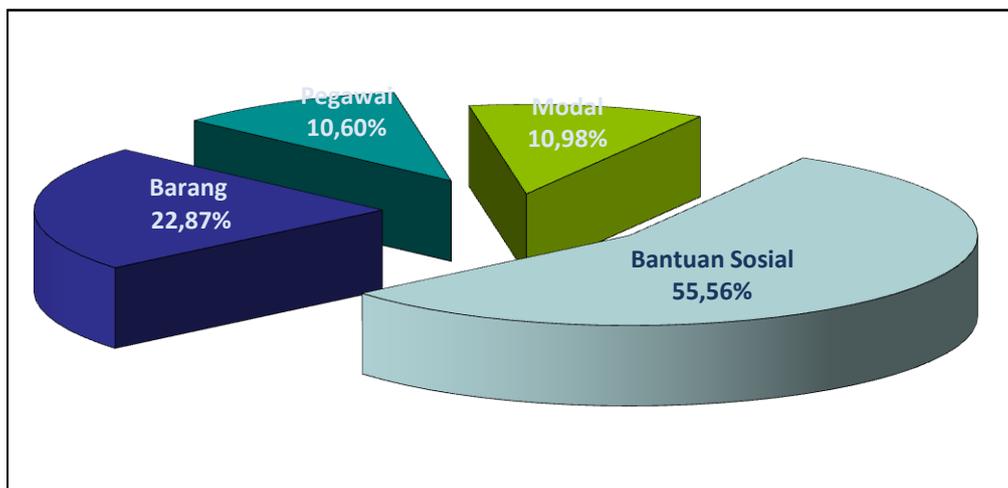
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pagu belanja Kementerian Pendidikan Nasional dalam DIPA dibagi dalam 4 (empat) pos pengeluaran, yaitu: (1) Pegawai, (2) Barang, (3) Modal, (4) Bantuan Sosial (Bansos). Pos pengeluaran belanja Pegawai yaitu pos yang dikhususkan untuk belanja pegawai, misalnya:

gaji dan tunjangan-tunjangan. Pos pengeluaran belanja Barang yaitu pos pengeluaran yang meliputi belanja untuk keperluan sehari-hari perkantoran, pemeliharaan dan perjalanan dinas sebagai penunjang kegiatan. Pos pengeluaran belanja Modal yaitu pos pengeluaran yang meliputi kegiatan pengadaan sarana prasarana yang merupakan aset tetap. Pos pengeluaran belanja Bansos yaitu pos pengeluaran yang meliputi kegiatan bantuan sosial kepada penyelenggaraan pendidikan berupa dana: 1) Imbal Swadana; 2) Bantuan Operasional Sekolah (BOS); 3) Bantuan Kegiatan Mengajar (BKM); 4) *Safe Guarding*, 5) Lembaga; 6) Beasiswa; 7) Rehabilitasi; 8) Taman Bacaan Masyarakat; 9) Perpustakaan; dan 10) Kursus-kursus, dll.

Alokasi untuk pos-pos pengeluaran tersebut dapat dilihat dari gambar 11.1. berikut ini

Grafik 3.1. Persentase pembagian Pos Pengeluaran pada DIPA 2010



Total pagu belanja pada DIPA Kemdiknas tahun 2010 sebesar Rp. 63.876.938.891.000,- (Enam Puluh Tiga Trilyun Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah). Dari jumlah tersebut Belanja Bantuan Sosial mendapatkan alokasi sebesar 55,56%, Belanja Pegawai mendapatkan alokasi 10,60%, Belanja Barang mendapatkan alokasi 22,87%, dan Belanja Modal mendapatkan alokasi 10,97%.

1. Realisasi Anggaran

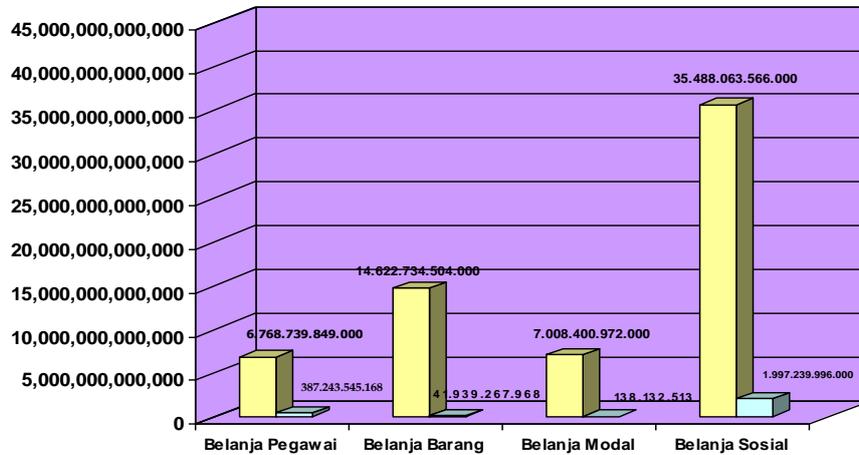
Total anggaran Kemdiknas yang ada dalam DIPA tahun 2010 berjumlah Rp. 63.876.938.891.000,-. Realisasi pengeluaran DIPA sampai bulan Desember tahun 2010 adalah Rp. 59.436.646.805.699,- (data per 27 Januari 2011) Sehingga daya serap anggaran Kemdiknas sampai Desember 2010 adalah:

$$\frac{59.436.646.805.699}{63.876.938.891.000} \times 100\% = 93,05\%$$

Sajian-sajian gambar berikutnya memperlihatkan realisasi daya serap DIPA 2010 Kementerian Pendidikan Nasional untuk bulan Januari-Desember 2010 pada masing-masing pos pengeluaran. Sajian ini bertujuan memperlihatkan pada pos pengeluaran mana terjadi daya serap yang kecil atau yang besar.

Grafik 3.2. Realisasi Daya Serap DIPA Kementerian Pendidikan Nasional Bulan Januari 2010

**GRAFIK DAYA SERAP ANGGARAN KEMDIKNAS
PER JENIS PENGELUARAN (JANUARI 2010)**

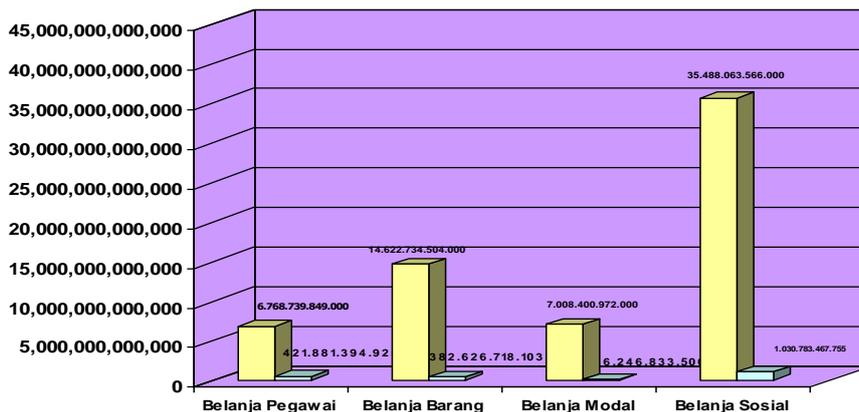


	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Sosial
■ Pagu	6,768,739,849,000	14,611,734,504,000	7,008,400,972,000	35,488,063,566,000
■ Realisasi	387,243,545,168	41,939,267,968	138,132,513	2,426,560,941,649

Bulan Januari daya serap DIPA 2010 paling tinggi untuk belanja bantuan sosial (3,13%) kemudian diikuti oleh belanja pegawai (0,61%), belanja barang (0,07%) dan belanja modal (0,00%).

Grafik 3.3. Realisasi Daya Serap DIPA Kementerian Pendidikan Nasional Bulan Februari 2010

**GRAFIK DAYA SERAP ANGGARAN KEMDIKNAS
PER JENIS PENGELUARAN (FEBRUARI 2010)**

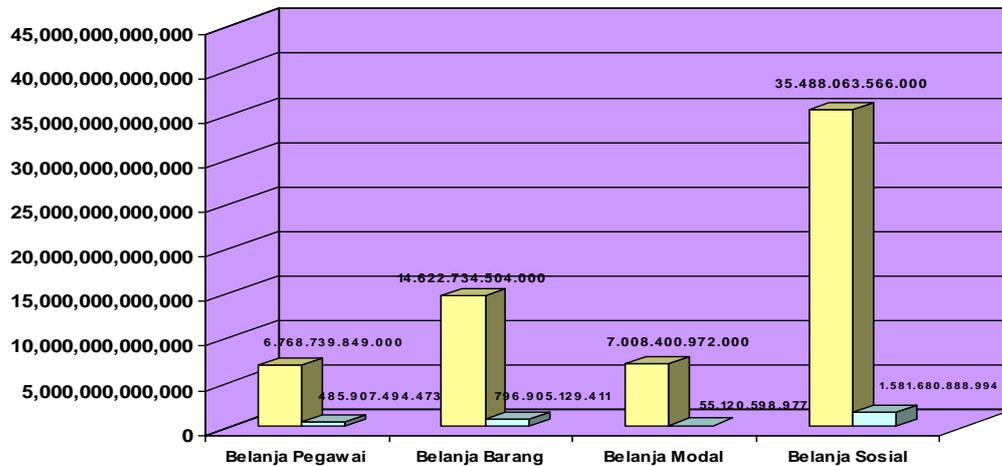


	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Sosial
■ Pagu	6,768,739,849,000	14,611,734,504,000	7,008,400,972,000	35,488,063,566,000
■ Realisasi	421,881,394,925	382,626,718,103	6,246,833,500	1,030,783,467,755

Bulan Februari daya serap DIPA 2010 paling tinggi dikeluarkan oleh pos pengeluaran belanja bantuan sosial (1,61%) kemudian diikuti oleh belanja pegawai (0,66%), belanja barang (0,60%), dan belanja modal (0,01%).

Grafik 3.4. Realisasi Daya Serap DIPA Kementerian Pendidikan Nasional Bulan Maret 2010

**GRAFIK DAYA SERAP ANGGARAN KEMDIKNAS
PER JENIS PENGELUARAN (MARET 2010)**

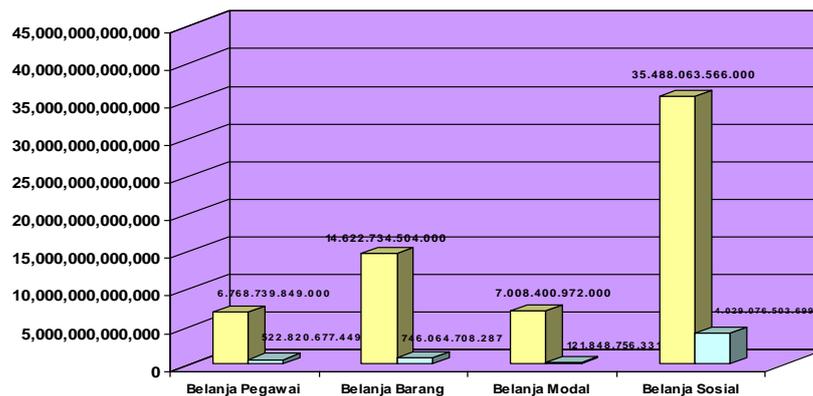


	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Sosial
Pagu	6,768,739,849,000	14,611,734,504,000	7,008,400,972,000	35,488,063,566,000
Realisasi	485,907,494,473	796,905,129,411	55,120,598,977	1,581,680,888,994

Bulan Maret 2010 daya serap DIPA paling tinggi dikeluarkan oleh pos pengeluaran belanja bantuan sosial (2,48%) kemudian diikuti oleh belanja barang (1,25%), belanja pegawai (0,76%), dan belanja modal (0,09%).

Grafik 3.5. Realisasi Daya Serap DIPA Kementerian Pendidikan Nasional Bulan April 2010

**GRAFIK DAYA SERAP ANGGARAN KEMDIKNAS
PER JENIS PENGELUARAN (APRIL 2010)**

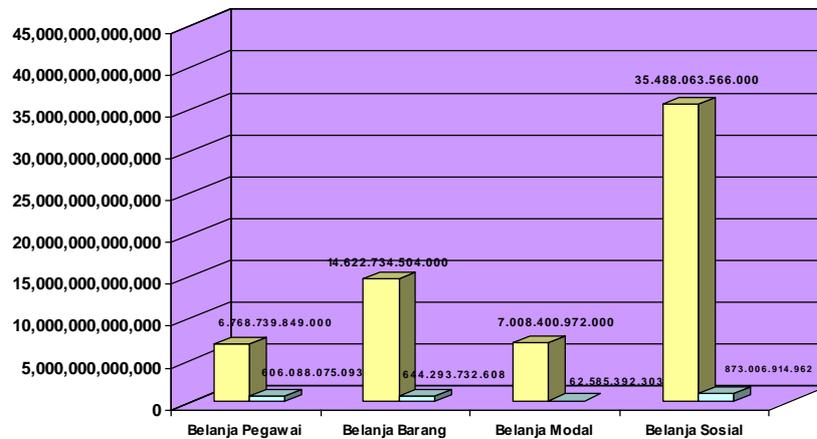


	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Sosial
Pagu	6,768,739,849,000	14,611,734,504,000	7,008,400,972,000	35,488,063,566,000
Realisasi	522,820,677,449	746,064,708,287	121,848,756,331	4,029,076,503,699

Bulan April 2010 daya serap DIPA paling tinggi dikeluarkan oleh pos pengeluaran belanja bantuan sosial (6,31%) kemudian diikuti oleh belanja barang (1,17%), belanja pegawai (0,82%), dan belanja modal (0,19%).

Grafik 3.6. Realisasi Daya Serap DIPA Kementerian Pendidikan Nasional Bulan Mei 2010

**GRAFIK DAYA SERAP ANGGARAN KEMDIKNAS
PER JENIS PENGELUARAN (MEI 2010)**

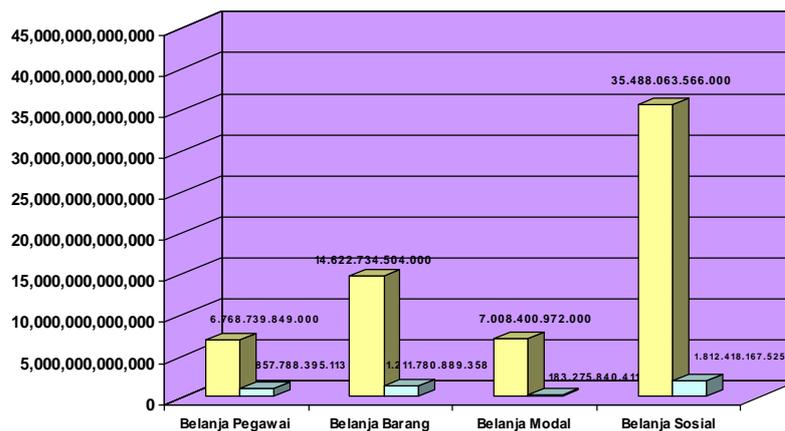


	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Sosial
■ Pagu	6,768,739,849,000	14,611,734,504,000	7,008,400,972,000	35,488,063,566,000
■ Realisasi	606,088,075,093	644,293,732,608	62,585,392,303	873,006,914,962

Bulan Mei 2010 daya serap DIPA paling tinggi dikeluarkan oleh pos pengeluaran belanja bantuan sosial (1,37%) kemudian diikuti oleh belanja barang (1,01%), belanja pegawai (0,95%), dan belanja modal (0,10%).

Grafik 3.7. Realisasi Daya Serap DIPA Kementerian Pendidikan Nasional Bulan Juni 2010

**GRAFIK DAYA SERAP ANGGARAN KEMDIKNAS
PER JENIS PENGELUARAN (JUNI 2010)**

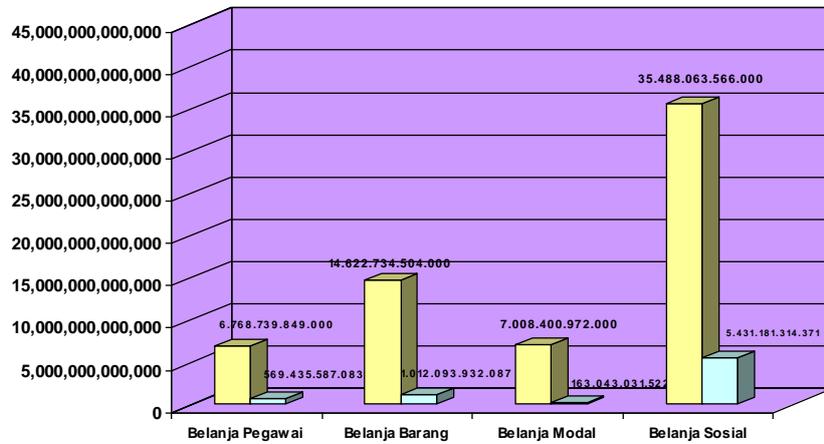


	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Sosial
■ Pagu	6,768,739,849,000	14,611,734,504,000	7,008,400,972,000	35,488,063,566,000
■ Realisasi	857,788,395,113	1,211,780,889,358	183,275,840,411	1,812,418,167,525

Bulan Juni 2010 daya serap DIPA paling tinggi dikeluarkan oleh pos pengeluaran belanja bantuan social (2,84%) kemudian diikuti oleh belanja barang (1,90%), belanja pegawai (1,34%), dan belanja modal (0,29%).

Grafik 3.8. Realisasi Daya Serap DIPA Kementerian Pendidikan Nasional Bulan Juli 2010

**GRAFIK DAYA SERAP ANGGARAN KEMDIKNAS
PER JENIS PENGELUARAN (JULI 2010)**

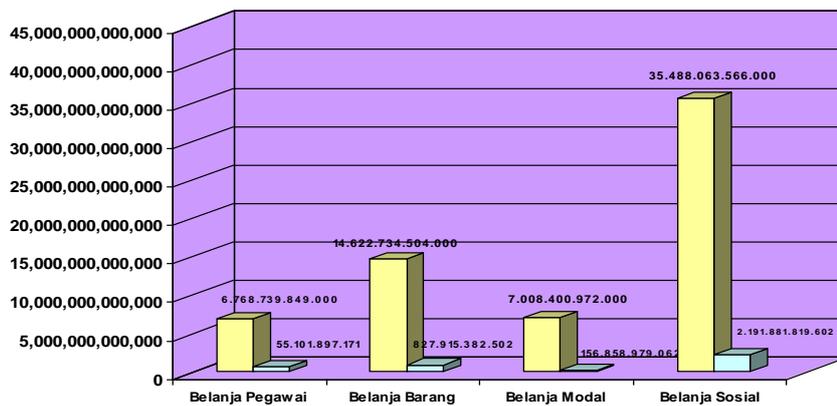


	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Sosial
Pagu	6,768,739,849,000	14,611,734,504,000	7,008,400,972,000	35,488,063,566,000
Realisasi	569,435,587,083	1,012,093,932,087	163,043,031,522	5,431,181,314,371

Bulan Juli 2010 daya serap DIPA paling tinggi dikeluarkan oleh pos pengeluaran belanja bantuan sosial (8,50%) kemudian diikuti oleh belanja barang (1,58%), belanja pegawai (0,89%), dan belanja modal (0,26%).

Grafik 3 .9. Realisasi Daya Serap DIPA Kementerian Pendidikan Nasional Bulan Agustus 2010

**GRAFIK DAYA SERAP ANGGARAN KEMDIKNAS
PER JENIS PENGELUARAN (AGUSTUS 2010)**

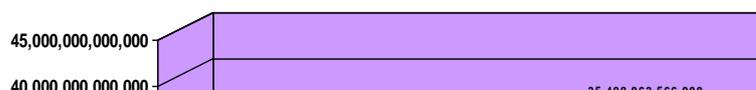


	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Sosial
Pagu	6,768,739,849,000	14,611,734,504,000	7,008,400,972,000	35,488,063,566,000
Realisasi	55,101,897,171	827,915,382,502	156,858,979,062	2,191,881,819,602

Bulan Agustus 2010 daya serap DIPA paling tinggi dikeluarkan oleh pos pengeluaran belanja bantuan sosial (3,43%) kemudian diikuti oleh belanja barang (1,30%), belanja pegawai (0,86%), dan belanja modal (0,25%).

Grafik 3.10. Realisasi Daya Serap DIPA Kementerian Pendidikan Nasional Bulan September 2010

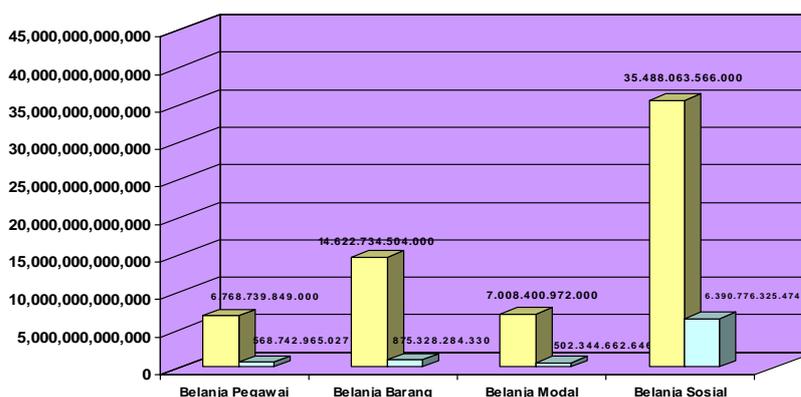
**GRAFIK DAYA SERAP ANGGARAN KEMDIKNAS
PER JENIS PENGELUARAN (SEPTEMBER 2010)**



Bulan September 2009 daya serap DIPA paling tinggi dikeluarkan oleh pos pengeluaran belanja bantuan sosial (2,86%) kemudian diikuti oleh belanja barang (1,94%), belanja pegawai (0,87%), dan belanja modal (0,61%).

Grafik 3.11. Realisasi Daya Serap DIPA Kementerian Pendidikan Nasional Bulan Oktober 2010

**GRAFIK DAYA SERAP ANGGARAN KEMDIKNAS
PER JENIS PENGELUARAN (OKTOBER 2010)**

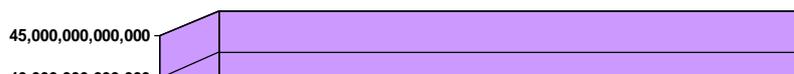


	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Sosial
Pagu	6,768,739,849,000	14,611,734,504,000	7,008,400,972,000	35,488,063,566,000
Realisasi	568,742,965,027	875,328,284,330	502,344,662,646	6,390,776,325,474

Bulan Oktober 2010 daya serap DIPA paling tinggi dikeluarkan oleh pos pengeluaran belanja bantuan sosial (10%) kemudian diikuti oleh belanja barang (1,37%), belanja pegawai (0,89%), dan belanja modal (0,79%).

Grafik 3.12. Realisasi Daya Serap DIPA Kementerian Pendidikan Nasional Bulan November 2010

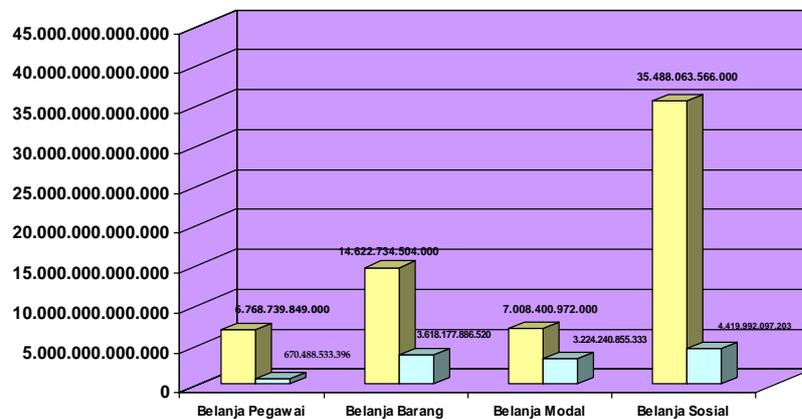
**GRAFIK DAYA SERAP ANGGARAN KEMDIKNAS
PER JENIS PENGELUARAN (NOVEMBER 2010)**



Bulan Nopember 2010 daya serap DIPA paling tinggi dikeluarkan oleh pos pengeluaran belanja bantuan sosial (4,60%) kemudian diikuti oleh belanja barang (1,99%), belanja modal (1,03%), dan belanja pegawai (0,83%).

Grafik 3.13. Realisasi Daya Serap DIPA Kementerian Pendidikan Nasional Bulan Desember 2010

**GRAFIK DAYA SERAP ANGGARAN KEMDIKNAS
PER JENIS PENGELUARAN (DESEMBER 2010)**



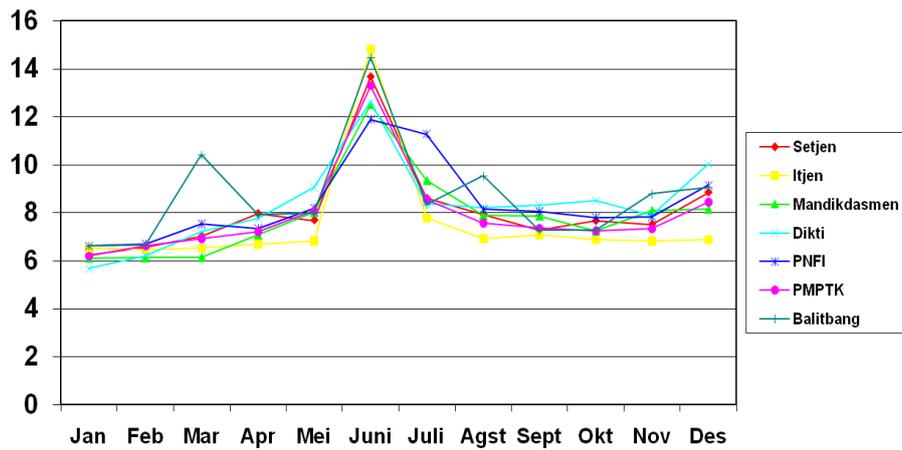
	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Sosial
■ Pagu	6,768,739,849,000	14,611,734,504,000	7,008,400,972,000	35,488,063,566,000
■ Realisasi	670,488,533,396	3,618,177,886,520	3,224,240,855,333	4,419,992,097,203

Bulan Desember 2010 daya serap DIPA paling tinggi dikeluarkan oleh pos pengeluaran belanja bantuan sosial (6,92%), belanja barang (5,66%), kemudian diikuti oleh belanja modal (5,05%), dan belanja pegawai (1,05%).

Sajian-sajian grafik berikut ini memperlihatkan persentase daya serap pada tiap unit utama di masing-masing pos pengeluaran dari bulan Januari – Desember 2010.

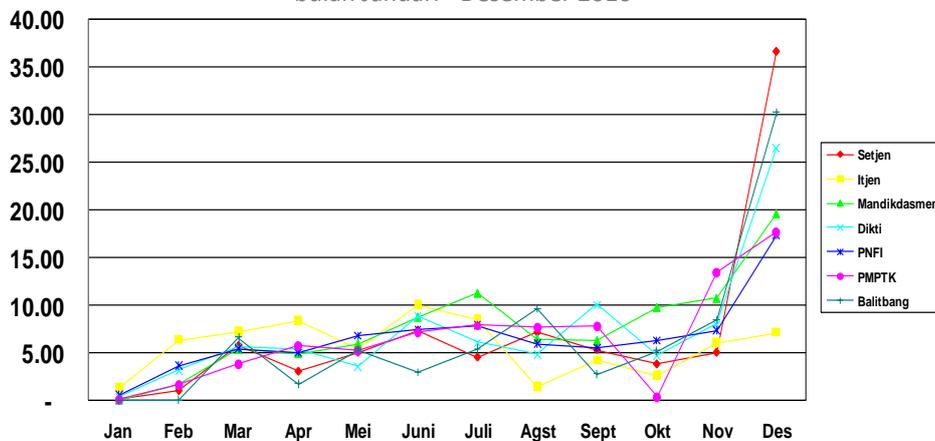
Grafik 3.14. Persentase daya serap DIPA Kemdiknas pada pos pengeluaran

belanja pegawai dari bulan Januari – Desember 2010



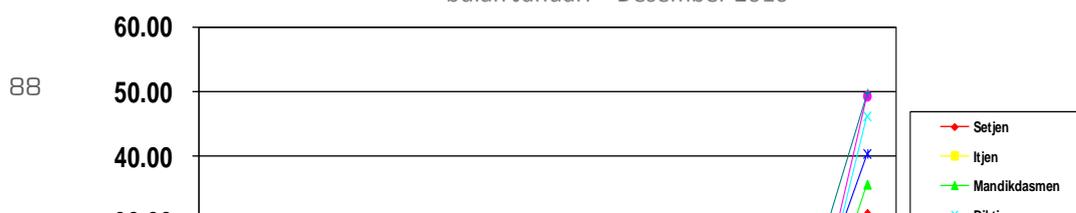
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
Setjen	6.25	6.59	7.04	7.97	7.69	13.67	8.6	7.93	7.3	7.66	7.52	8.85
Itjen	6.5	6.45	6.5	6.68	6.81	14.81	7.77	6.91	7.08	6.86	6.82	6.86
Mandikdasmen	6.1	6.12	6.14	7.08	8.01	12.51	9.35	7.89	7.86	7.24	8.1	8.14
Dikti	5.67	6.2	7.19	7.75	9.04	12.62	8.38	8.19	8.31	8.49	7.88	10.03
PNFI	6.62	6.7	7.54	7.34	8.19	11.89	11.28	8.14	8.06	7.79	7.82	9.15
PMPTK	6.19	6.61	6.91	7.21	8.07	13.28	8.53	7.56	7.36	7.24	7.32	8.44
Balitbang	6.62	6.64	10.41	7.92	7.98	14.47	8.33	9.54	7.27	7.28	8.78	9.05

Grifik 3.15. Persentase daya serap DIPA Kemdiknas pada pos pengeluaran belanja barang dari bulan Januari - Desember 2010



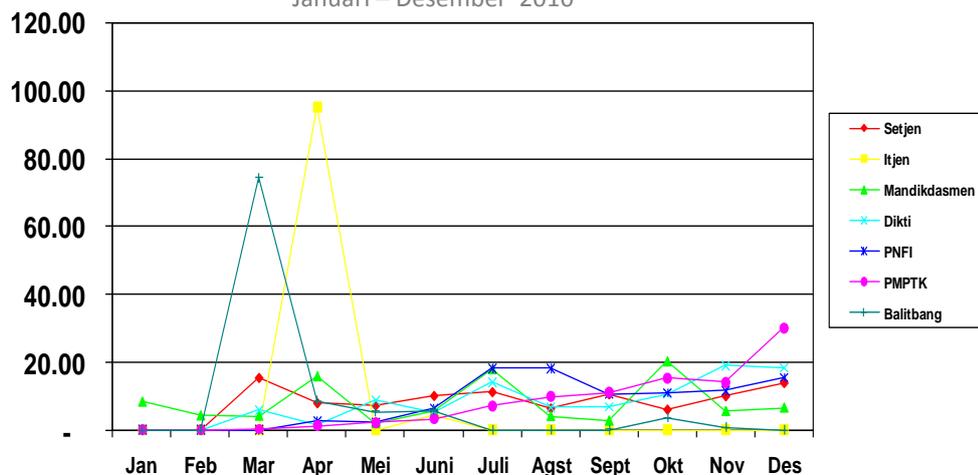
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
Setjen	0.17	1.03	5.77	3.06	5.06	7.36	4.55	7.15	5.35	3.83	5.05	36.66
Itjen	1.30	6.38	7.27	8.39	5.37	10.08	8.57	1.46	4.23	2.62	6.07	7.16
Mandikdasmen	-	1.63	5.36	4.90	5.97	8.74	11.27	6.47	6.26	9.78	10.74	19.65
Dikti	0.37	3.14	5.60	5.40	3.61	8.88	6.10	4.83	10.07	4.75	8.01	26.54
PNFI	0.53	3.65	5.41	4.98	6.78	7.43	7.84	5.96	5.49	6.26	7.34	17.37
PMPTK	0.08	1.66	3.82	5.74	5.21	7.16	7.87	7.68	7.76	0.40	13.41	17.70
Balitbang	-	-	6.57	1.69	5.29	2.91	5.38	9.58	2.75	5.17	8.43	30.21

Grifik 3.16. Persentase daya serap DIPA Kemdiknas pada pos pengeluaran belanja modal dari bulan Januari – Desember 2010



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
Setjen	0.02	-	0.42	1.35	1.18	2.88	23.16	4.84	1.95	17.05	5.19	31.10
Itjen	-	-	-	13.43	2.77	22.34	5.41	-	7.60	-	24.27	9.23
Mandikdasmen	-	0.34	6.56	14.27	8.61	5.62	0.86	4.14	4.02	9.17	8.21	35.61
Dikti	0.00	0.09	0.77	1.70	0.82	2.52	2.01	2.12	5.55	7.21	9.37	46.16
PNFI	-	0.35	1.89	2.39	1.89	2.35	4.60	7.36	6.20	10.40	14.78	40.27
PMPTK	-	0.13	1.00	1.85	2.25	4.41	3.72	3.60	7.13	2.45	9.94	49.32
Balitbang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	0.00	0.00	19.63	49.64

Grafik 3.17. Persentase daya serap DIPA Kemdiknas pada pos pengeluaran belanja bansos dari bulan Januari – Desember 2010



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
Setjen	-	-	15.51	7.97	7.28	10.13	11.27	6.41	10.61	6.07	10.04	14.00
Itjen	-	-	-	95.30	-	4.70	-	-	-	-	-	-
Mandikdasmen	8.39	4.29	4.22	15.94	2.00	5.48	18.05	4.15	2.78	20.36	5.64	6.63
Dikti	-	0.18	5.92	1.61	8.78	5.25	14.14	6.77	6.87	10.76	19.13	18.40
PNFI	-	-	0.05	2.76	2.28	6.48	18.20	18.06	10.58	10.88	11.70	15.40
PMPTK	-	0.10	0.24	1.20	2.26	3.29	7.19	9.92	11.20	15.35	14.10	30.22
Balitbang	-	-	74.40	8.63	5.48	5.83	-	-	0.15	3.73	0.83	-

Dari uraian tersebut di atas, menggambarkan bahwa sistem pengelolaan anggaran pendidikan pagu belanja DIPA Kemdiknas Tahun Anggaran 2010 dibagi 4 pos pengeluaran, yaitu (1) Belanja Pegawai, (2) Belanja Barang, (3) Belanja Modal, (4) Belanja Bansos. Pada DIPA, secara garis besar, urutan alokasi anggaran dari yang terbesar hingga yang terkecil,

yaitu: (1) Belanja Bansos, (2) Belanja Barang dan, (3) Belanja Pegawai serta terakhir (4) Belanja Modal.

Dengan posisi alokasi anggaran demikian maka dapat disimpulkan bahwa alokasi ini sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Kemdiknas yang antara lain menyebutkan:

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; dan
- c. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya kenyataan bahwa alokasi terbesar realisasi anggaran pada belanja Bantuan Sosial memiliki makna bahwa Depdiknas memiliki kebijakan yang memihak pada upaya pemberdayaan masyarakat. Komitmen ini sebagaimana ditunjukkan pada kecenderungan pengeluaran terbesar dalam setiap bulannya (Januari – Desember 2010) pada pos Bantuan Sosial, sebagaimana tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 3.11. Urutan Peringkat Persentase Pos Pengeluaran Juni – Desember 2010 pada Realisasi Daya Serap DIPA Kemdiknas

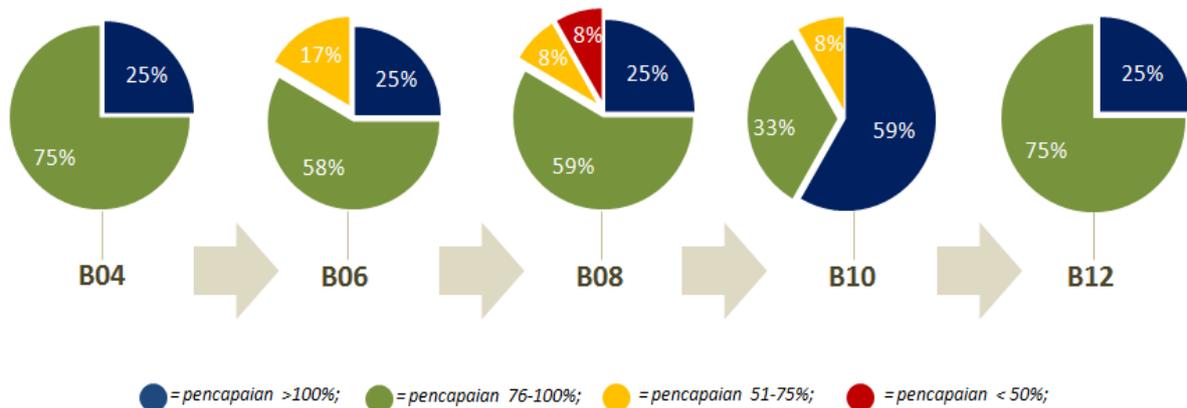
	Terbesar 1	Terbesar 2	Terbesar 3	Terbesar 4
Juni 2010	Bansos	Barang	Pegawai	Modal
Juli 2010	Bansos	Barang	Pegawai	Modal
Agustus 2010	Bansos	Barang	Pegawai	Modal
September 2010	Bansos	Barang	Pegawai	Modal
Oktober 2010	Bansos	Barang	Pegawai	Modal
November 2010	Bansos	Barang	Modal	Pegawai
Desember 2010	Bansos	Barang	Modal	Pegawai

Secara umum persentase yang terbesar daya serapnya adalah belanja bansos kemudian diikuti oleh belanja barang, pegawai dan belanja modal.

C. CAPAIAN KONTRAK KINERJA MENTERI DENGAN PRESIDEN

Sesuai dengan kontrak kinerja antara Menteri dengan Presiden sebagaimana tertuang dalam Inpres No 1 tahun 2010, Kemdiknas telah merealisasikan kontrak kinerja tersebut dengan baik. Berikut adalah persentase capaian kontrak kinerja secara keseluruhan antara Menteri dengan Presiden sampai dengan bulan ke-12, yang digambarkan dalam grafik dibawah ini.

Grafik 3.18 Persentase Capaian kontrak kinerja



Berikut adalah persentase capaian sembilan rencana aksi sebagaimana ada dalam kontrak kinerja antara Menteri Pendidikan Nasional dengan Presiden Republik Indonesia tahun 2010.

Tabel 3.12 Capaian 9 rencana aksi kontrak kinerja

No	RENCANA AKSI	UKURAN KEBERHASILAN	PENCAPAIAN
1	[N2P6A1] Peningkatan sistem manajemen BOS	Tersalurkannya dana BOS tepat waktu dan tepat jumlah paling lambat November 2010.	76-100%
2	[N2P1A2] Penyediaan buku ajar yang bermutu dan murah melalui pembelian hak cipta.	220 judul buku mata pelajaran SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, dan SMK telah dibeli hak ciptanya.	>100%
3	[N2P7A1] Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah (PMTAS) di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan	1.200.000 siswa TK dan SD telah menerima PMTAS secara teratur paling lambat Oktober 2010.	76-100%
4	[N2P8A1] Penyempurnaan kurikulum dan metoda pembelajaran aktif berdasarkan nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan katakter bangsa.	- Uji coba kurikulum dilaksanakan 100% di 250 satuan pendidikan. - Penguatan pelaksanaan kurikulum sehingga siap untuk mulai diimplementasikan secara luas.	76-100%
5	[N2P9A1] Peningkatan kompetensi kepala dan pengawas sekolah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.	<ul style="list-style-type: none"> • 15% dari seluruh kepala TK/SD, SMP dan SMA/SMK sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut Kab./Kota paling lambat Desember 2010 (15% untuk tiap tingkatan pendidikan) • 100 % dari seluruh pengawas TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan pengawas sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota, paling lambat Desember 2010 	>100% 76-100%
6	[N2P11A1] Akselerasi penerapan sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan di setiap jenjang pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> - 10.000 satuan pendidikan telah menerapkan sistem penjaminan mutu paling lambat Desember 2010. - 8 PT masuk 500 terbaik versi Lembaga 	76-100% 76-100%

No	RENCANA AKSI	UKURAN KEBERHASILAN	PENCAPAIAN
		Pemeringkatan Independen Internasional paling lambat Desember 2010. - 95 PT telah mengembangkan pendidikan berbasis entrepreneurship paling lambat Desember 2010.	76-100%
7	[N2P11A2] Penerapan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di sekolah	20% dari seluruh SMP dan 40% dari seluruh SMA menerapkan TIK paling lambat Desember 2010.	76-100%
8	[N4P18A3] Penyediaan beasiswa pendidikan bagi masyarakat berpendapatan rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Target 2.767.300 siswa SD/SDLB dari masyarakat berpendapatan rendah. • Target 966.100 siswa SMP/ SMPLB dari masyarakat berpendapatan rendah. • Target 378.800 siswa SMA dari masyarakat berpendapatan rendah. • Target 305.550 siswa SMK dari masyarakat berpendapatan rendah. • Target 65.000 mahasiswa dari masyarakat berpendapatan rendah 	>100%
9	[N2P11A1] Peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik	Sebanyak 46.300 orang guru yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik pada Desember 2010	76-100%

Capaian secara terinci kontrak kinerja antara Menteri dengan Presiden dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.13 Capaian Kontrak Kinerja

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B08, B10, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
N2P6: Peningkatan akses pendidikan dasar, menengah, dan tinggi							
-Peningkatan sistem manajemen BOS	Kemendiknas	Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota	Tersusun dan terapkannya sistem manajemen BOS	TARGET: Tersalurkannya dana BOS tepat waktu dan tepat jumlah paling lambat November 2010	Target B04: > Tim manajemen BOS di tiap tingkat telah terbentuk > Buku Panduan BOS 2010 telah didistribusikan kepada seluruh sekolah, serta Tim Manajemen BOS Provinsi dan Kab/Kota > Penyaluran dana BOS triwulan 1 sudah selesai 100% secara tepat jumlah > Penyaluran dana BOS triwulan 2 sudah tersalur 60% secara tepat jumlah	Realisasi B04: > Tim Manajemen BOS di seluruh kabupaten/kota dan provinsi telah dibentuk (100%). > Buku Panduan BOS tingkat SMP telah terkirim sampai ke sekolah (dikirimkan langsung ke alamat sekolah). Demikian pula untuk Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota telah selesai dikirimkan.(100%) > Jumlah dana triwulan 1 tingkat SD mencapai 100.63%. Untuk penyaluran dana triwulan 1 tingkat SMP, dari target dana sebesar Rp 1.331.857.985.850, dana yang telah tersalurkan adalah Rp1.331.115.516.212 atau 99,94%. > Jumlah dana triwulan 2 tingkat SD telah mencapai 77.86%. Untuk penyaluran dana triwulan 2 tingkat SMP,	Realisasi B04: > Penyaluran triwulan 1 SMP belum mencapai target 100% akibat penyaluran dana di Prov. Papua Barat belum dilaksanakan. Kondisi ini akibat penundaan pencairan seluruh anggaran di Dinas Pendidikan Provinsi oleh Gubernur untuk menunggu pelantikan pejabat Kadis yang baru. > Penyaluran triwulan 2 yang mencapai angka 75,50% (SMP) dan 77,86% (SD) diperoleh dengan pencairan dana BOS di 22 provinsi sampai pertengahan minggu kedua bulan April ini. Diperkirakan

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B08, B10, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>Target B06:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Penyaluran dana BOS triwulan 2 telah selesai 100% secara tepat jumlah ➢ Tersusunnya hasil monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana BOS triwulan 1 dan 2. <p>Target B08: ➢ Penyaluran dana BOS triwulan 3 sudah tersalur 70% secara tepat jumlah</p> <p>Target B10:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Penyaluran dana BOS triwulan 3 telah selesai 100% secara tepat jumlah ➢ Penyaluran dana BOS triwulan 4 sudah tersalur 60% secara tepat jumlah ➢ Tersusunnya data jumlah siswa tiap sekolah pada tahun ajaran 2010/2011 sebagai dasar penganggaran BOS tahun 2011. ➢ Tersosialisasinya daftar jumlah siswa di tiap sekolah pada Tahun Ajaran 2010/2011. 	<p>B06:</p> <p>BOS SD:</p> <p>1. Jumlah dana triwulan 2 tingkat SD mencapai 100% yaitu sebesar Rp 1.331.115.516.212</p> <p>BOS SMP:</p> <p>1). Untuk penyaluran dana triwulan 2 tingkat SMP, dari target dana sebesar Rp 1.342.887.865.650, dana yang telah tersalurkan adalah Rp 1.335.654.511.000 atau 100,08%.</p> <p>2). Total penyaluran dana BOS tahun 2010 di tingkat SMP, dari alokasi Rp 5.514.939.900.000, sampai minggu kedua bulan Juni sudah tersalur sejumlah Rp 2.673.164.553.462 atau 48,47%.</p> <p>3). Telah dilaksanakan pemantauan bos tahap 1 dan 2. Laporan terlampir.</p> <p>B08: a. untuk penyaluran dana triwulan 3 tingkat SD, dana BOS telah mencapai Rp. 2.589.976.165.600 (96,6%)b. untuk penyaluran dana triwulan 3 tingkat SMP, telah mencapai 100% sebesar 5.514 trilyun.</p> <p>B10: Capaian 107,9%</p> <p>BOS SD:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Penyaluran dana BOS Triwulan 3 tingkat SD telah tersalurkan 100% dengan sasaran 27.063.337 siswa dan dana sebesar Rp 2.690.056.104.750,- (capaian 100%) ➢ Penyaluran dana BOS Triwulan 4 tingkat SD, dari target dana sebesar Rp. 2.700.379.042.000,- dana yang telah tersalurkan adalah Rp2.271.726.518.500,- atau 84,13%. (capaian 140%) ➢ Tersedianya data jumlah siswa tahun ajaran 2010/1011 hasil Workshop Pendataan sejumlah 26.630.889 siswa (capaian 100%) ➢ Data jumlah siswa tahun 	<p>dari target dana sebesar Rp 1.342.887.865.650, dana yang telah tersalurkan adalah Rp1.040.761.034.500 atau 75,50%.</p> <p>sampai menjelang akhir bulan April pencairan sudah terlaksana hampir di seluruh provinsi.</p> <p>Laporan hasil monitoring dan evaluasi masih dalam proses penyelesaian. Diperkirakan laporan tersebut akan selesai pada tanggal 17 Juni, mengingat kegiatan tersebut baru selesai pada bulan Mei.</p> <p>Provinsi yang belum melakukan pencairan adalah Papua Barat dan Maluku Utara, karena masih proses validasi data tahun ajaran 2010/2011</p> <p><u>catatan:</u> Mekanisme penyaluran BOS telah diatur dlm buku panduan BOS dimana telah dibentuk Tim manajemen BOS di tingkat Kab/Kota untuk memastikan penyaluran dana BOS tepat sasaran dan waktu. Mengingat administrasi awal tahun anggaran biasanya penyaluran dana BOS utk periode Triwulan I (Januari-Maret) baru dpt diterima bulan Feb/Maret</p>

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B08, B10, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
(N2P1A2) Penyediaan buku ajar yang bermutu dan murah melalui pembelian hak cipta	Kemendiknas	Pemda	Makin terjangkaunya buku ajar yang murah dan bermutu bagi siswa dari seluruh kalangan ekonomi	TARGET: 1) SD/Sederajat: Pengalihan Hak Cipta sejumlah 95 judul buku teks pelajaran SD dan sederajat	Target B12: > Penyaluran dana BOS triwulan 4 telah selesai 100% secara tepat jumlah > Tersusunnya hasil monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana BOS triwulan 3 dan 4.	ajaran baru disosialisasikan pada bulan Oktober. BOS SMP: > Untuk penyaluran dana triwulan 3 tingkat SMP, dari target dana sebesar Rp1.337.372.925.750 yang telah tersalurkan adalah Rp 1.337.372.925.750 atau 100%. > Untuk penyaluran dana triwulan 4 tingkat SMP, dari target dana sebesar Rp1.513.018.695.317, yang telah tersalurkan adalah Rp1.513.018.695.317 atau 74,73%. (capaian 123,55%) > Data jumlah siswa tiap sekolah untuk penganggaran BOS tahun 2010/2011 telah tersusun sebagai hasil dari kegiatan pendataan bulan Agustus dan September di 5 region. Jumlah total siswa SMP adalah 9.387.670 siswa dari 34.179 lembaga/sekolah (target 100% tercapai) > Daftar jumlah siswa di tiap sekolah telah disosialisasikan sejak bulan Agustus B12: 100% BOS SD: > Penyaluran dana BOS Triwulan 4 tingkat SD, dana BOS telah selesai mencapai 100% sebesar Rp.2.749.396.114.250,- . Total Pencairan dana BOS tahun 2010 di tingkat SD, dari alokasi Rp.10.801.516.168.000,- sudah tersalur sejumlah Rp.10.800.712.578.177,- atau 99,99% BOS SMP: > Penyaluran dana BOS Triwulan 4 tingkat SMP, dana BOS telah selesai mencapai 100% sebesar Rp.1.349.253.361.288,- . Total Pencairan dana BOS tahun 2010 di tingkat SMP, dari alokasi Rp.5.520.903.802.250,- sudah tersalur sejumlah Rp.5.364.423.149.250,- atau 97,17% > Monitoring penyaluran dana BOS triwulan 3 dan 4 di tingkat SD dan SMP telah selesai dilaksanakan dengan sasaran seluruh propinsi dan laporan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana BOS triwulan 3 dan 4 telah disusun. (100%)	Anggaran yang tersedia sebesar Rp30.793.400.000 Sasaran: 220 Judul
					B04: Pembentukan Panitia (100%) Pemilihan Judul buku (100%) Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (100%) B06: Pelaksanaan Pengalihan Hak Cipta sejumlah 48 judul (50% dari 95 judul)	B04: Pembentukan Panitia (100%) Pemilihan Judul buku (100%) Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (100%) B06: 59 judul (120%)	

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B08, B10, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				2) SMP/Sederajat: 47 judul buku teks pelajaran SMP dan sederajat	<p>B08: Pelaksanaan Pengalihan Hak Cipta sejumlah 67 judul (70% dari 95 judul)</p> <p>B10: Pelaksanaan Pengalihan Hak Cipta sejumlah 86 judul (90% dari 95 judul)</p> <p>B12: Pelaksanaan Pengalihan Hak Cipta sejumlah 95 judul (100% dari 95 judul)</p> <p>B04: Pembentukan Panitia (100%) Pemilihan Judul buku (100%) Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (100%)</p> <p>B06: Pelaksanaan Pengalihan Hak Cipta sejumlah 24 judul (50% dari 47 judul)</p> <p>B08: Pelaksanaan Pengalihan Hak Cipta sejumlah 33 judul (70% dari 47 judul)</p> <p>B10: Pelaksanaan Pengalihan Hak Cipta sejumlah 42 judul (90% dari 47 judul)</p> <p>B12: Pelaksanaan Pengalihan Hak Cipta sejumlah 47 judul (100% dari 47 judul)</p>	<p>B08: 80 judul (120%)</p> <p>B10: Capaian 124% Pelaksanaan pengalihan hak cipta 107 judul buku dari target 86 judul buku</p> <p>B12: Capaian 188,4% Pelaksanaan pengalihan hak cipta 179 judul buku dari target 95 judul buku</p> <p>B04: Pembentukan Panitia (100%) Pemilihan Judul buku (100%) Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (100%)</p> <p>B06: 24 judul (100%)</p> <p>B08: 33 judul (100%)</p> <p>B10: Capaian 105% Pelaksanaan pengalihan hak cipta 44 judul buku dari target 42 judul buku</p> <p>B12: Capaian 100% Pelaksanaan pengalihan hak cipta 47 judul buku dari target 47 judul buku</p>	
				3) SMA/ Sederajat: 41 judul buku teks pelajaran SMA dan sederajat	<p>B04: Pembentukan Panitia (100%) Pemilihan Judul buku (100%) Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (100%)</p> <p>B06: Pelaksanaan Pengalihan Hak Cipta sejumlah 21 judul (50% dari 41 judul)</p> <p>B08: Pelaksanaan Pengalihan Hak Cipta sejumlah 29 judul (70% dari 41 judul)</p> <p>B10: Pelaksanaan Pengalihan Hak Cipta sejumlah 37 judul (90% dari 41 judul)</p> <p>B12: Pelaksanaan Pengalihan Hak Cipta sejumlah 41 judul (100% dari 41 judul)</p>	<p>B04: Pembentukan Panitia (100%) Pemilihan Judul buku (100%) Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (100%)</p> <p>B06: 21 judul (100%)</p> <p>B08: 29 judul (100%)</p> <p>B10: Capaian 100% Pelaksanaan pengalihan hak cipta 37 judul buku dari target 37 judul buku</p> <p>B12: Capaian 120% Pelaksanaan pengalihan hak cipta 49 judul buku dari target 41 judul buku</p>	
				4) SMK: 37 judul buku teks pelajaran SMK	<p>B04: Persiapan Penulisan Buku Teks (100%) Penulisan Buku</p>	<p>B04: Persiapan Penulisan Buku Teks (100%) Penulisan Buku Teks (100%)</p>	

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B08, B10, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Teks (100%) B06: Penetapan Tim Penilai (100%) Pelaksanaan Penilaian (100%) B08: Penetapan hasil pengesahan (100%) Pengesahan Hasil penetapan (100%) Usul rekomendasi ke Menteri (100%) B10: Pelaksanaan Pengalihan Hak Cipta sejumlah 19 judul (50% dari 37 judul) B12: Pelaksanaan Pengalihan Hak Cipta sejumlah 37 judul (100% dari 37 judul)	B06: Penetapan Tim Penilai (100%) Pelaksanaan Penilaian (100%) B08: Penetapan hasil Penilaian oleh BSNP (100%) Usul Rekomendasi oleh BSNP (100%) B10: Capaian 158% Pelaksanaan pengalihan hak cipta 30 judul buku dari target 19 judul buku B12: Capaian 81% Pelaksanaan pengalihan hak cipta 30 judul buku dari target 37 judul buku	Sebanyak 25 judul buku yang lulus dalam proses penetapan kelayakan oleh Mendiknas Belum termasuk 26 judul buku SMK (dalam proses penetapan oleh Mendiknas)
N2P7: Perbaiki status gizi anak sekolah							
(N2P7A1) Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) untuk siswa TK dan SD terutama di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan	Kemendiknas/Kem enag Kemendiknas	Kemenag, Pemda terkait	Jumlah siswa TK dan SD di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan yang memperoleh PMTAS untuk peningkatan gizi	TARGET: 1.200.000 siswa TK dan SD di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan telah menerima PMTAS secara teratur paling lambat Agustus 2010	TARGET B04: 1. Tersusunnya Buku petunjuk pelaksanaan pemberian makanan tambahan 2. Teridentifikasinya sasaran siswa TK dan SD penerima PMTAS TARGET B06: Sosialisasi petunjuk pelaksanaan pemberian makanan tambahan kepada semua Pemda terkait TARGET B08: 60% dari 1.200.000 siswa TK dan SD di	B04: 1. Telah tersusun buku petunjuk pelaksanaan pemberian makanan tambahan (100%) 2. Rekonsiliasi dengan Kementerian Daerah Tertinggal untuk menentukan kriteria dan sasaran penerima PMTAS (100%) B06: 1. Buku petunjuk pelaksanaan pemberian PMTAS sudah tersusun (100%) 2. Kuota per Kab/Kota telah selesai (100%) 3. Identifikasi sasaran siswa telah selesai (100%) B08: 1. Telah diluncurkannya pelaksanaan kegiatan PMTAS	Pembiayaan baru dimulai Bulan Juli 2010 Proses penyelesaian DIPA APBN-P untuk PMTAS masih dalam proses DIPA APBN-P baru saja diterima.

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B08, B10, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan telah menerima makanan tambahan secara teratur	oleh 7 Menteri terkait tanggal 13 Agustus 2010 2. Telah terlatihnya 60 orang (100%) Tim Pelatih PMTAS tingkat Pusat 3. 100% telah tersosialisasikannya kegiatan PMTAS bagi 216 pengambil kebijakan terkait PMTAS di tingkat provinsi dan Kabupaten 4. 100% terlatihnya tim pelatih PMTAS tingkat Kabupaten 5. 70% terlatihnya tim pelaksana PMTAS tingkat sekolah (30% pelaksanaan pelatihan Tim PMTAS Sekolah dilaksanakan pada B09	
					TARGET B10: 100% dari 1.200.000 siswa TK dan SD di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan telah menerima makanan tambahan secara teratur	B10: Capaian 100%: 1.200.000 siswa TK dan SD di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan telah menerima makanan tambahan secara teratur	
					TARGET B12: 100% dari 1.200.000 siswa TK dan SD di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan telah menerima makanan tambahan secara teratur	B12: Capaian 100%: 1.200.000 siswa TK dan SD di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan telah menerima makanan tambahan secara teratur	
NZP8: Penguatan metodologi dan kurikulum							
(N2P8A1) Penyempurnaan kurikulum dan metodologi pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa	Kemendiknas	Pemda terkait Perguruan Tinggi Kemenag	Terimplementasinya uji coba kurikulum dan metodologi pembelajaran aktif	TARGET: Uji coba kurikulum telah dilaksanakan 100%; Penguatan pelaksanaan kurikulum sehingga siap untuk mulai diimplementasikan secara luas	TARGET B04: Penataan ulang kurikulum dan rencana penyempurnaannya untuk pendidikan dasar dan menengah yang menghasilkan 1 draft naskah akademik umum penataan ulang kurikulum Penyusunan 5 paket bahan pelatihan metodologi pendidikan dan pembelajaran aktif TARGET B06: Penataan ulang kurikulum dan rencana penyempurnaannya untuk pendidikan dasar dan menengah, yang meliputi tapi tak	B04: 100% B06: 100% 1. 6 naskah akademik penataan ulang umum dan 1 naskah akademik integrasi kewirausahaan sudah selesai 2. yang disetujui DPR 125 satuan pendidikan a. Disain piloting telah selesai b. Bahan pelatihan telah selesai	5 Paket Bahan Pelatihan: 1. Konsep tentang pendidikan berkarakter 2. Metodik umum 3. Contoh bahan ajar untuk jenjang pendidikan dasar 4. Contoh bahan ajar untuk jenjang pendidikan menengah (SMP) 5. Contoh bahan ajar untuk jenjang pendidikan menengah (SMA) Hasil pembahasan dengan Komisi X DPR melalui APBNP 2010 ditetapkan tolok ukur "250 satuan pendidikan yang representatif" diubah menjadi 125 satuan pendidikan yang representatif untuk pengembangan dan

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B08, B10, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 draft naskah akademik penataan ulang kurikulum satuan pendidikan • 1 draft naskah akademik integrasi kewirausahaan ke dalam kurikulum 250 satuan pendidikan yang representatif untuk pengembangan dan ujicoba kurikulum telah disiapkan di 33 provinsi <p>B08:</p> <p>(a) Terlatihnya 69 orang dalam Training for Trainers yang akan mendukung satuan pendidikan mengembangkan dan menguji coba kurikulum dan metodologi pembelajaran aktif</p> <p>(b) Pelaksanaan bantuan profesional pengembangan kurikulum dengan pendekatan belajar aktif berdasarkan nilai-nilai budaya untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa di 33 provinsi</p> <p>(c) Tersusunnya 1 kerangka model kurikulum, metodologi pembelajaran dan pengajaran, acuan evaluasi, untuk pendidikan dasar dan menengah</p> <p>B10:</p> <p>(a) Terlatihnya 1000 trainers yang akan mendukung satuan pendidikan mengembangkan dan menguji coba kurikulum dan metodologi pembelajaran aktif (tercapai pada bulan September)</p> <p>(b) Tersusunnya analisis konteks daerah dari 16 kabupaten di 16 provinsi dalam mengembangkan</p>	<p>c. seleksi dan penetapan 125 satuan pendidikan (sesuai dengan persetujuan DPR) sudah selesai</p> <p>B08: 100%</p> <p>B10: Capaian 100.23%: (a) 116.4% (terlatih 1169 trainer) (b) 100% (c) 100% (d) 100% (e) 100%</p>	<p>ujicoba kurikulum".</p> <p>a. 670 peserta/trainer dilatih pada minggu 3 dan 4 Agustus 2010 b. telah dilaksanakan pelatihan karakter di 33 provinsi c. telah disusun bahan persiapan berupa konsep piloting kurikulum di 16 provinsi</p>

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B08, B10, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>model kurikulum</p> <p>(c) Tersusunnya 125 model kurikulum, metodologi pembelajaran, acuan evaluasi, untuk pendidikan dasar dan menengah</p> <p>(d) Uji coba pelaksanaan kurikulum telah dimulai di 125 satuan pendidikan</p> <p>(e) Terlaksananya supervisi awal uji coba pelaksanaan kurikulum di 16 kabupaten di 16 provinsi</p> <p>TARGET B12:</p> <p>(a) Ujicoba kurikulum telah dilaksanakan 100% di 250 satuan pendidikan dan revisi/masukan/perbaikan telah dimasukkan sehingga dapat dilanjutkan</p> <p>(b) Terlaksananya pemantapan supervisi ujicoba pelaksanaan kurikulum di 33 provinsi</p> <p>(c) Pelaksanaan bantuan profesional pengembangan kurikulum kepada tim pembembang kurikulum di 202 kab/kota</p> <p>(d) Pelaksanaan bantuan profesional pengembangan kurikulum kepada berbagai pihak untuk persiapan diseminasi dan diimplementasikan secara luas</p>	<p>B12:Capaian 100%:</p> <p>(a) 100%</p> <p>(b) 100%</p> <p>(c) 100%</p> <p>(d) 100%</p>	<p>(a) dan (b) Target sasaran telah diralat menjadi 125 sat pend di 16 provinsi sesuai surat Mendiknas No. 197/MPN/LL/2010 tentang Perubahan Ukuran Keberhasilan Inpres No. 1 tahun 2010 B06, B10 dan B12</p>
N2P9: Penguatan pengelolaan sekolah							
(N2P9A1) Peningkatan kompetensi kepala dan pengawas sekolah/madr	Kemendiknas/Kem enag						

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B08, B10, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
asah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah '- Peningkatan kompetensi kepala dan pengawas sekolah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah	Kemendiknas	Pemda terkait	Persentase kepala TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan kepala Sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kabupaten kota	TARGET: 15 % dari seluruh kepala TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota, paling lambat Desember 2010 (15% untuk tiap tingkatan pendidikan)	TARGET B04:1% dari seluruh kepala TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota TARGET B06: 3% dari seluruh kepala TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota TARGET B08: 6% dari seluruh kepala TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota TARGET B10: 10% dari seluruh kepala TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota TARGET B12: (a) 15% dari seluruh kepala TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota (b) Penyempurnaan Pelatihan kepala sekolah berdasarkan hasil evaluasi dan benchmarking, yang selaras dengan pelatihan kepala Madrasah dari Kemenag	B04: 100,47% (Sudah tercapai 2.418 orang di seluruh Propinsi) B06: 100,19% (7.234 orang kepala TK/SD, SMP, SMA/SMK) B08: 100,04% (14.446 orang) Kepala TK/SD, SMP, SMA/SMK sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota. B10: Capaian 118,39% (28.493 orang dari terget 24.068 orang) Kepala TK/SD, SMP, SMA/SMK sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota. B12: 100,78% (a) 101,55% (36.662 orang dari target 36.102 orang) atau 15% dari 240.678 orang kepala TK/SD, SMP, dan SMA/SMK sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota (b) sudah dilaksanakan Penyempurnaan Pelatihan kepala sekolah berdasarkan hasil evaluasi dan benchmarking, yang selaras dengan pelatihan kepala Madrasah dari Kemenag	

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B08, B10, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pemda terkait	Persentase pengawas TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan kepala Sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kabupaten kota	TARGET: 100 % dari seluruh pengawas TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan pengawas sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota, paling lambat Desember 2010	TARGET B04: 10 % dari seluruh pengawas TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota TARGET B06: 20 % dari seluruh pegawai TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota TARGET B08: 40 % dari seluruh pengawas TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan pengawas sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota TARGET B10: 80% dari seluruh pengawas TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan pengawas sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota TARGET B12: (a) 100% dari seluruh pegawai TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan pengawas sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota (b) Penyempurnaan Pelatihan pengawas sekolah berdasarkan hasil evaluasi dan benchmarking, yang selaras dengan pelatihan kepala Madrasah dari Kemenag	B04: 2.212 pengawas sekolah (100.94%) B06:100% B08: 100,11% (8.775 orang) Pengawas Sekolah telah mengikuti pelatihan pengawas sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota B10: Capaian 101,29%: (17.756 orang) Pengawas Sekolah telah mengikuti pelatihan pengawas sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota B12 : 99,26% (a) 98,52% (21.588 orang) pegawai TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan pengawas sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota (b) 100%, sudah dilaksanakan Penyempurnaan Pelatihan pengawas sekolah berdasarkan hasil evaluasi dan benchmarking, yang selaras dengan pelatihan kepala Madrasah dari Kemenag	
(N2P11A1) Akselerasi penerapan	Kemendiknas		Satuan pendidikan yang menerapkan sistem	TARGET: 10.000 satuan pendidikan telah menerapkan sistem	TARGET B04: Sosialisasi sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP)	B04: Sosialisasi sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP) dan Permen 63/2009 tentang SPMP dilakukan oleh	Sumber dana APBN 2010

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B08, B10, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan di setiap jenjang pendidikan			penjaminan mutu	penjaminan mutu, paling lambat Desember 2010	dan Permen 63/2009 tentang SPMP kepada Dinas Pendidikan Propinsi/Kab/Kota dan LPMP oleh Ditjen PMPTK TARGET B06: LPMP melakukan TOT penggunaan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan Monitoring Satuan Pendidikan oleh Pemerintah (MSPD) kepada 10.000 kepala sekolah dan 1000 pengawas in EDS dan MSPD TARGET B08: Implementasi Evaluasi Diri Sekolah (EDS) sebagai bagian dari SPMP untuk melihat pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan oleh 10.000 satuan pendidikan TARGET B10: 1000 Pengawas Sekolah memonitor dan melaporkan pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan (10.000 sekolah di 33 Propinsi) dengan menggunakan EDS dan MSPD TARGET B12: Dinas Pendidikan dan LPMP melakukan analisis hasil EDS dan MSPD serta memberikan bantuan teknis untuk peningkatan mutu pendidikan kepada 10.000 sekolah	Direktorat Pembinaan Diklat (di Jakarta, Bali, Makasar dan Bandung) dengan jumlah peserta sebanyak 1.500 orang (peserta eselon I, II, III di lingkungan Kemendiknas dan Kemenag dan stakeholder propinsi dan kabupaten.). B06: 1. Penetapan kuota calon peserta TOT per Kab/Kota telah selesai. 2. Modul pelatihan untuk kepala sekolah dan pengawas sudah selesai dipersiapkan 3. Pelatihan dan penetapan instruktur tingkat Nasional telah selesai B08: 100% (10.000 Satuan Pendidikan dan 1.000 orang pengawas sekolah) telah siap untuk mengimplementasikan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dalam rangka SPMP sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan, dilaksanakan mulai tanggal 19 Agustus 2010 B10: Capaian 100%: (10.000 satuan pendidikan dan 1.000 orang pengawas sekolah) telah mengimplementasikan EDS mengacu pada 8 standar Nasional pendidikan dan 1.000 pengawas sekolah sudah melakukan monitoring (MSPD) pencapaian 8 standar nasional pendidikan di 10.000 satuan pendidikan tersebut pada 33 provinsi) B12: 100% Dinas Pendidikan dan LPMP telah melakukan analisis hasil EDS dan MSPD serta memberikan bantuan teknis untuk peningkatan mutu pendidikan kepada 10.000 sekolah B04: (a) 100% (b) 100% B06: (a) 100% (b) 100%	Sumber dana APBN-P 2010 dan baru disahkan Juni 2010. Sumber dana APBN-P 2010, Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) disahkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan pada tanggal 2 Agustus 2010. Untuk DIPA/POK Daerah masih dalam proses penelaahan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, PPPPTK dan LPMP. Sumber dana APBN-P Sumber dana APBN-P Laporan analisis hasil EDS dan MSPD Pemeringkat Independen Internasional mengeluarkan peringkatnya satu kali setiap tahunnya yaitu pada bulan Agustus (Autumn Season) sehingga hasilnya untuk B04 sampai B10 belum bisa diukur dan menggunakan hasil pemeringkatan tahun 2009
		Kemendiknas	Jumlah PT masuk 500 terbaik versi Lembaga Pemeringkatan Independen Internasional	TARGET: 8 PT masuk 500 terbaik versi Lembaga Pemeringkatan Independen Internasional, paling lambat Desember 2010	TARGET B04: (a) 4 PT (50%) masuk 500 terbaik versi Lembaga Pemeringkatan Independen Internasional (b) Penyusunan Dokumen Evaluasi Faktor Keberhasilan Tersusun (20%) TARGET B06: (a) 4 PT (50%) masuk 500 terbaik versi Lembaga Pemeringkatan Independen Internasional		

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B08, B10, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kemendiknas	Jumlah PT yang mengembangkan pendidikan berbasis entrepreneurship	TARGET: 95 PT telah mengembangkan pendidikan berbasis entrepreneurship, paling lambat Desember 2010	(b) Dokumen Evaluasi Faktor Keberhasilan di kirim dan PT menyusun Laporan (50%) TARGET B08: (a) 4 PT (50%) masuk 500 terbaik versi Lembaga Pemeringkatan Independen Internasional (b) Evaluasi Laporan Perguruan Tinggi yang memperoleh bantuan pengembangan WCU (80%) TARGET B10: Laporan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi untuk penerapan di PT lain (100%) TARGET B12: (a) 8 PT (100%) masuk 500 terbaik versi Lembaga Pemeringkatan Independen Internasional (b) Evaluasi faktor keberhasilan PT yang masuk 500 terbaik dan rencana untuk penerapannya di universitas lain (100%) TARGET B04: 15 PT telah mengembangkan pendidikan berbasis entrepreneurship	B08: 137.5% (a) 175% (b) 100% B10: Capaian 67.5%: (a) Laporan 100% (b) Proses evaluasi terhadap laporan Semester I program pengembangan WCU: 25% B12: 100% B04: 100% B06: 100%	(a) Tahun 2010 terdapat 7 PT yang masuk dalam Asian University Ranging-Top 200 yaitu: UI:50, UGM:85, Unair:109, ITB:113, IPB:119,UNDIP:161, UNPAD:161 (b) Sedang dalam proses Evaluasi terhadap laporan Semester I program pengembangan WCU Proses evaluasi terhadap laporan Semester I program pengembangan WCU baru dari UGM (a) Tahun 2010 terdapat 8 PT yang masuk dalam Asian University Ranging-Top 200 yaitu: UI:50, UGM:85, Unair:109, ITB:113, IPB:119, UNDIP:161, UNS: 171, UNIBRAW: 191 (b) Telah dilakukan Monitoring dan evaluasi di UI, UGM, Unair, ITB, IPB, UNDIP, UNS, Unibraw B04:15 PT 1 Universitas Sumatera Utara 2 Universitas Riau 3 Universitas Andalas 4 Universitas Indonesia 5 Institut Teknologi Bandung 6 Institut Pertanian Bogor 7 Universitas Gadjah mada 8 Politeknik Negeri Pontianak 9 Institut Teknologi Sepuluh Nopember 10 Universita Ciputra Surabaya 11 Universitas Esa Unggul Jakarta 12 Politeknik Manufaktur Negeri Bandung 13 Universitas Negeri Jakarta 14 Universitas Pelita Harapan Jakarta 15 Unika Atma Jaya Jakarta B06: 25 PT 1 Universitas Airlangga 2 Politeknik Negeri Jember 3 Universitas Darul Ulum Lamongan

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B08, B10, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					TARGET B08: 60 PT telah mengembangkan pendidikan berbasis entrepreneurship	B08: 100%	4 STSI Bandung 5 Universitas Merdeka Malang 6 Universitas Widyagama Malang 7 Universitas Negeri Malang 8 Universitas Lampung 9 Universitas Gunadarma 10 Universitas Sebelas Maret 11 Universitas Udayana 12 Poltek Pratama Mulia Surakarta 13 Universitas Nasional Jakarta 14 STIE Perbanas Surabaya 15 Universitas Internasional Batam 16 Sekolah Tinggi Teknik Surabaya 17 Universitas Widyatama Bandung 18 Universitas Pendidikan Ganasha Singaraja 19 Universitas Bengkulu 20 Universitas Pancasila 21 Universitas Teknologi Yogyakarta 22 Politeknik Negeri Sriwijaya 23 Universitas Semarang 24 Politeknik Tonggak Equator 25 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta B08: 20 PT 1 Akademi Pertanian Yogyakarta 2 Universitas Atmajaya Yogyakarta 3 Universitas Panca Bakti Pontianak 4 Universitas Negeri Padang 5 Politeknik Negeri Jakarta 6 Universitas Palangkaraya 7 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 8 Universitas Cokroaminoto Palopo 9 Universitas Muhammadiyah Pontianak 10 Universitas Islam Lamongan 11 Universitas Brawijaya Malang 12 STIKES Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta 13 Sekolah Teknik Tinggi Adi Sucipto Yogyakarta 14 Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Indonesia Malang 15 Universitas Negeri Makassar 16 Universitas Bakrie Jakarta 17 Politeknik Negeri

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B08, B10, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					TARGET B10: 80 PT telah mengembangkan pendidikan berbasis entrepreneurship	B10: Capaian 137.5%: (110 PT dari 80 PT yang ditargetkan) telah mengembangkan pendidikan berbasis entrepreneurship	Malang 18 STIE Ahmad Dahlan Jakarta 19 Universitas Panca Marga Probolinggo 20 Universitas Malikusaleh B10 50 PT 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Maiji Jakarta 2 Universitas Padjadjaran 3 Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Pontianak 4 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 5 Politeknik API Yogyakarta 6 Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI (Undaris) Ungaran 7 Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulya 8 Universitas Muhammadiyah Malang 9 Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto 10 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nahdlatul Ulama Jepara 11 Universitas Syah Kuala 12 Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta 13 STIE Widya Dharma Malang 14 Universitas Haluoleo 15 Institut Teknologi Indonesia Serpong 16 Universitas Muhammadiyah Surakarta 17 Politeknik Pertanian Negeri Kupang 18 Politeknik Negeri Banjarmasin 19 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 20 Universitas Andi Djemma Palopo 21 STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta 22 Akademi Komunikasi Indonesia Yogyakarta 23 Universitas Islam Sultan Agung Semarang 24 Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer (STMIK) El Rahma Yogyakarta 25 Akademi Manajemen Ilmu Komputer (AMIK) Logika Medan 26 Universitas Mercu Buana Jakarta 27 Akademi Keperawatan Panti Rapih Yogyakarta

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B08, B10, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
(N2P11A2) Penerapan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di sekolah	Kemendiknas	Kemenag, Kominfo, Pemda	Persentase satuan pendidikan jenjang SMP dan SMA yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	TARGET: 20% Sekolah dari seluruh satuan pendidikan jenjang SMP dan 40% Sekolah dari seluruh satuan pendidikan jenjang SMA telah menerapkan pembelajaran berbasis TIK, paling lambat Desember	TARGET B12: 95 PT telah mengembangkan pendidikan berbasis entrepreneurship TARGET B04: 8% - SMP & SMA: Pendataan Berita Acara Koneksi Schoolnet existing 3% - Penyusunan rancangan modul TIK 2% - Persiapan Pelatihan TIK 3%	B12: 137,5% B04: 100%	28 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Panca Bhakti Pontianak 29 Akademi Keperawatan Arta Kabanjahe Sumatera Utara 30 Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan (STKIP) Persada Khatulistiwa Sintang 31 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 32 Akademi Seni Rupa dan Desain MSD Yogyakarta 33 Universitas Teuku Umar Meulaboh 34 Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan (STKIP) YPM Bangko 35 Politeknik Seni Yogyakarta 36 Universitas Trisakti Jakarta 37 Universitas Pembangunan "Veteran" Yogyakarta 38 Universitas Dian Nuswantoro Semarang 39 Politeknik Negeri Manado 40 STIE AMM Mataram 41 Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta 42 Universitas Muhammadiyah Ponorogo 43 Universitas Muhammadiyah Semarang 44 Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka 45 Politeknik Negeri Medan 46 STIE Nasional Banjarmasin 47 STIE Mandala Jember 48 Universitas Muhammadiyah Purworejo 49 Universitas Negeri Semarang 50 Universitas Sarjana Taman Siswa Yogyakarta 110 PT dari 80 PT yang ditargetkan telah mengembangkan pendidikan berbasis entrepreneurship Target 20% sekolah (setara dengan 5,256 sekolah dari total 26,277 sekolah) jenjang SMP dan 40% sekolah (setara dengan 4,096 sekolah dari total 10,239 sekolah) jenjang SMA menerapkan pembelajaran berbasis TIK. Sampai dengan saat ini, anggaran Jardiknas

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B08, B10, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				2010	<p>TARGET B06: 29% dari keseluruhan langkah-langkah implementasi penerapan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang terdiri dari penyediaan akses internet, penyusunan modul, pelatihan, implementasi dan monev dapat dilaksanakan. Dimana 20% (1870) sekolah telah terkoneksi Schoolnet</p> <p>TARGET B08: 59% dari keseluruhan langkah-langkah implementasi penerapan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang terdiri dari penyediaan akses internet, penyusunan modul, pelatihan, implementasi dan monev dapat dilaksanakan. Dimana 30% (2806) sekolah telah terkoneksi Schoolnet</p> <p>TARGET B10: 81% dari keseluruhan langkah-langkah implementasi penerapan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang terdiri dari penyediaan akses internet, penyusunan modul, pelatihan, implementasi dan monev dapat dilaksanakan. Dimana 50% (4676) sekolah telah terkoneksi Schoolnet</p> <p>TARGET B12: 100% dari keseluruhan langkah-langkah implementasi penerapan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan</p>	<p>B06: 105%</p> <p>B08: 100%</p> <p>B10: Capaian 101%</p> <p>B12: capaian 104%</p>	<p>masih diblokir DPR dan sedang dalam proses pencairan bintang. Surat Edaran 224/MK.02/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam APBN-P tahun 2010</p> <p>1. penyediaan akses internet melalui schoolnet sudah terkoneksi 1870 sekolah, dengan rincian 1.051 SMP dan 819 SMA (100%)</p> <p>2. penyusunan naskah modul pembelajaran berbasis TIK (100%)</p> <p>3. pelatihan untuk 313 guru selesai dan melebihi target (120%)</p> <p>4. disain dan instrumen monev selesai disusun (100%)</p> <p>1. Penyediaan akses internet melalui schoolnet sudah terkoneksi 2.806 sekolah (100%)</p> <p>2. Penyusunan modul (100%)</p> <p>3. pelatihan telah terlaksana (100%)</p> <p>4. Implementasi dan monev telah dilaksanakan di 12 propinsi (100%)</p> <p>1. Penyediaan akses internet melalui schoolnet sudah terkoneksi 4.825 sekolah (103%)</p> <p>2. Penyusunan modul (100%)</p> <p>3. pelatihan telah terlaksana kepada 2.282 guru (107%)</p> <p>4. Implementasi pada sekolah binaan melalui koordinasi, pembinaan dan pemberian server konten telah dilaksanakan kepada 29 sekolah (94%)</p> <p>5. monev telah dilaksanakan di 27 propinsi (100%)</p> <p>1. Penyedia akses internet melalui schoolnet sudah terkoneksi 9.352 sekolah (100%)</p> <p>2. Penyusunan modul (100%)</p> <p>3. Pelatihan telah</p>

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B08, B10, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Komunikasi (TIK), yang terdiri dari penyediaan akses internet, penyusunan modul, pelatihan, implementasi dan monev dapat dilaksanakan. Dimana 100% (9.352) sekolah telah terkoneksi Schoolnet		terlaksana kepada 2.500 guru (100%) 4. Implementasi pada sekolah binaan melalui koordinasi, pembinaan dan pemberian server konten telah dilaksanakan kepada 52 sekolah (149%) 5. Monev telah dilaksanakan di 31 propinsi pada 900 sekolah (100%)

D. CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI KEMDIKNAS TAHUN 2010

Agenda reformasi birokrasi yang dilaksanakan di lingkungan Kemdiknas, menekankan pada 3 [tiga] perubahan yaitu penguatan organisasi, pembenahan ketatalaksanaan dan penataan dan penguatan SDM bertujuan untuk merubah pola pikir, pola sikap dan pola tindak, setiap aparatur dalam bekerja diharapkan selalu pada pemberian layanan yang prima di bidang pendidikan. Sesuai dengan 7 [tujuh] agenda reformasi yang telah dilaksanakan Kemdiknas, berikut adalah hasil capaiannya:

1) Penguatan organisasi

- Tersusunnya organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional (Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010)
- Tersusunnya standar operasional prosedur sebanyak 167 sistem dan prosedur di lingkungan Ditjen PNFI
- Telah dilakukannya penanaman dan internalisasi tata nilai, kesadaran dan pemahaman baru tentang budaya kerja baru kepada semua pegawai
- Tersusunnya POS Pelayanan Keberatan Audit diharapkan hasil audit menjadi lebih berkualitas dan akuntabel.

2) Penataan dan penguatan SDM

- Tersusunnya hasil analisis dan evaluasi jabatan penghitungan beban kerja di lingkungan Ditjen PNFI;
- tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Inspektorat Jenderal Kemdiknas untuk pengembangan sumber daya manusia;
- Tersusunnya Kode Etik Auditor Inspektorat Jenderal Kemdiknas yang baru. Penyusunan ini bertujuan agar para auditor diharapkan lebih patuh dan taat mengimplementasikan kode etik saat bertugas, serta memudahkan Dewan Kode Etik Auditor Itjen Kemdiknas dalam memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kode etik oleh auditor.

3) Pembenahan tatalaksana dan pengembangan sistem

- Terbangunnya portal layanan prima pendidikan nasional (www.kemdiknas.go.id) dengan konten yang mengarah kearah yang dibutuhkan masyarakat
- Terbentuknya sistem untuk mengakses proses layanan informasi mengenai peraturan perundang-undangan bidang pendidikan nasional.

- Tersusunnya pedoman dan instrumen dalam system pengelolaan barang milik Negara
- Terbangun dan terlaksananya system informasi pengelolaan barang milik Negara
- Terbangunnya sistem aplikasi pelaporan keuangan
- Tersusunnya Prosedur Operasi Standar (POS) dalam bidang keuangan (POS pelaporan keuangan, POS PNBPN, pedoman penggunaan laporan manajemen SIMKeu Kemdiknas)
- Terbangunnya Helpdesk SIM Keuangan
- Tersusunnya 6 (enam) Standar Operasional Prosedur Audit, yaitu : 1) SOP Audit Kinerja; 2) SOP Audit Keuangan; 3) SOP Audit Tujuan Tertentu; 4) SPO Audit Pengadaan Barang dan Jasa; 5) SOP Audit Asset; dan 6) SOP Audit Kinerja Perguruan Tinggi.
- Tersusunnya POS Portal Layanan Masyarakat yang diharapkan dapat menjembatani hak dan tanggung jawab masyarakat sebagai pihak yang meminta data atau informasi.
- Tersusunnya SOP untuk seluruh tugas dan pekerjaan yang dilakukan pegawai kecuali pekerjaan yang sifatnya tidak rutin.
- Terbentuknya Sebuah *Warehouse* Data Pendidikan tinggi yaitu PDTP yang berbasis *IT* dan *user friendly*.
- Telah dikembangkannya Sistem Penjaminan Perguruan Tinggi (SPM-PT) melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) termasuk meningkatkan kinerja untuk memperoleh hasil yang baik dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

4) Layanan Satuan Pendidikan

- Terlaksananya proses layanan pemberian akreditasi sekolah yang lebih cepat dan lebih tepat.
- Tersusunnya pedoman sistem pengelolaan pemberian akreditasi sekolah;
- Tersusun dan beroperasinya sistem informasi pengelolaan pemberian akreditasi sekolah yang handal;
- Tersedianya kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan reformasi pemberian akreditasi sekolah.
- Terlaksananya proses layanan penyaluran hibah yang lebih cepat, lebih tepat, dan terbuka
- Tersedianya pedoman sistem pengelolaan penyaluran hibah;
- Tersedia dan beroperasinya sistem informasi pengelolaan penyaluran hibah yang handal;
- Tersedianya kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan reformasi penyaluran hibah.
- Terbangunnya data terkait daya tampung tiap jenjang pendidikan yang akurat, terintegrasi dan selalu termutakhirkan untuk perencanaan pembangunan pendidikan.
- Terlaksananya layanan perijinan menjadi lebih cepat,
- Pendataan PKBM semakin mudah di jangkau,
- Memudahkan para stakeholder untuk memperoleh informasi tentang pendidikan nonformal dan informal,
- Memudahkan lembaga pendidikan nonformal dalam memperoleh informasi tentang dana bantuan dari pemerintah.

- Terlaksananya Proses layanan perizinan program studi menjadi kombinasi *off* dan *online* dengan layanan yang lebih prima dan penjadualan yang lebih jelas sebagai perwujudan dari layanan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang lebih akuntabel dan berkualitas.

5) Layanan Peserta Didik

- Terbangunnya sistem layanan pemberian izin belajar WNI yang lebih cepat, lebih tepat, dan terbuka.
- Tersusunnya pedoman pemberian izin belajar siswa WNI.
- Tersusun dan beroperasinya sistem pemberian izin belajar siswa WNI yang handal.
- Tersusunnya kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan peningkatan sistem pemberian izin belajar siswa WNI
- Tersusunnya pedoman pemberian izin belajar siswa WNA.
- Tersusun dan beroperasinya sistem pemberian izin belajar siswa WNA yang handal.
- Tersusunnya kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan peningkatan sistem pemberian izin belajar siswa WNA.
- Terbangunnya sistem layanan penyaluran siswa WNI dari luar negeri ke sekolah nasional atau sekolah kerjasama lembaga asing yang lebih cepat, lebih tepat, dan terbuka.
- Tersusunnya pedoman pemberian rekomendasi penyaluran siswa WNI.
- Tersusun dan beroperasinya sistem pemberian rekomendasi penyaluran siswa WNI yang handal.
- Tersusunnya kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan peningkatan sistem pemberian rekomendasi penyaluran siswa WNI.
- Tersusunnya pedoman penilaian/ penyetaraan ijazah.
- Tersusun dan beroperasinya sistem penilaian/ penyetaraan ijazah yang handal.
- Tersusunnya kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan peningkatan sistem penilaian/ penyetaraan ijazah.
- Terlaksananya proses layanan penyetaraan ijazah luar negeri yang lebih cepat, lebih tepat, dan terbuka.

6) Layanan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

- Terbangunnya Infrastruktur jaringan untuk Biro Kepegawaian dan telah terhubung dengan Jardiknas;
- Telah terinstalnya dan siap dioperasikan Perangkat lunak aplikasi sistem di server Biro Kepegawaian
- Telah dapat diaksesnya Perangkat lunak berbais web dan terhubung ke Jardiknas.
- Tersusunnya pedoman pemberian NUPTK.
- Terbangun dan beroperasinya sistem pemberian NUPTK (aplikasi NUPTK).
- Tersusunnya kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan peningkatan sistem pemberian NUPTK.
- Terbangunnya sistem persertifikasian dosen secara online dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan perguruan tinggi yang lebih cepat, tepat, dan terbuka.

7) Layanan Substansi Pendidikan

- Terbangunnya sistem layanan pendidikan berbasis TIK.
- Terbangunnya aplikasi sistem layanan pendidikan berbasis TIK (e-administrasi dan e-pembelajaran/layanan substansi pendidikan)



- Terimplementasikannya sistem layanan pendidikan berbasis TIK pada seluruh satuan pendidikan dan satker di lingkungan Kemdiknas.
- Terbangunnya modul pembelajaran berbasis TIK (berbasis WEB) sehingga mudah diakses pengguna secara terbuka (pengguna dapat mengupload masukan dan menyempurnakan isi modul di internet).

E. CAPAIAN PROGRAM KERJA 100 HARI KEMDIKNAS

Sebagai upaya ikut menyukseskan program 100 hari pemerintah dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Kemdiknas dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional telah merumuskan program kerja 100 hari, yang meliputi delapan program, yaitu:

1. Penyediaan Internet secara massal di sekolah;
2. Penguatan kemampuan kepala dan pengawas sekolah;
3. Beasiswa PTN untuk siswa SMA/SMK/MA berprestasi dan kurang mampu;
4. Penyusunan Kebijakan Khusus bagi guru yang bertugas di daerah terdepan dan terpencil;
5. Penyusunan dan Penyempurnaan Renstra 2009-2014;
6. Pengembangan Budaya dan Karakter Bangsa;
7. Pengembangan Metodologi Belajar Mengajar;
8. Roadmap Sinergitas Lembaga Pendidikan (Depdiknas-Depag) dg Pengguna Lulusan Untuk Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan.

Sesuai dengan delapan program diatas, Kemdiknas telah berhasil mencapai target yang ditetapkan sesuai dengan batas waktu penyelesaian. Berikut capaian pelaksanaan program kerja 100 hari.

Tabel 3.19 Capaian Program 100 Hari Kemdiknas

No	Program	Sasaran	Batas penyelesaian	Capaian Desember 2009	Keterangan
----	---------	---------	--------------------	-----------------------	------------

No	Program	Sasaran	Batas penyelesaian	Capaian Desember 2009	Keterangan
1	Penyediaan Internet secara massal di sekolah	17.500 sekolah berinternet	Januari 2010	18.358 Sekolah berinternet	56% Sudah Dimonitoring
2	Penguatan kemampuan kepala dan pengawas sekolah	30.000 kepala/pengawas sekolah terlatih	Januari 2010	Tersedia data dan pemetaan sasaran program penguatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang dapat dilaksanakan pada tahun 2010	Tersedianya 140 judul dalam bentuk modul, materi diklat, bahan belajar mandiri dan bahan belajar fleksibel. Tersedia 1.291 orang trainer terdiri atas 499 master trainers bersertifikasi; 312 trainer dengan kompetensi tertentu dan khusus; 480 trainer nasional untuk lesson study
3	Beasiswa PTN untuk siswa SMA/SMK/MA berprestasi dan kurang mampu	20.000 orang	Januari 2010	Penentuan distribusi beasiswa dan MoU dengan PTN	Terlaksana 100%
4	Penyusunan Kebijakan Khusus bagi guru yang bertugas di daerah terdepan dan terpencil	Terbitnya Permendiknas	Januari 2010	Konsep Permendiknas tentang Guru yang bertugas di daerah terpencil selesai 13 Desember 2009	Permendiknas tentang Guru yang bertugas di daerah terpencil selesai 30 Januari 2010 dan siap diimplementasikan
5	Penyusunan dan Penyempurnaan Renstra 2009-2014	Dokumen Renstra ditetapkan	Desember 2009	Telah disusun dan disempurnakannya Renstra 2009-2014	Terlaksana 100%
6	Pengembangan Budaya dan Karakter Bangsa	Tersusunnya Bahan Ajar	Januari 2010	Persiapan Sarasehan	Pelaksanaan Sarasehan 14 Januari 2010; Bahan Ajar Pengembangan Budaya dan Karakter Bangsa Selesai 1 Februari 2010
7	Pengembangan Metodologi Belajar Mengajar	Bahan Pelatihan Tersusun	Januari 2010	Penyusunan Bahan Pelatihan Pengembangan Metodologi Pembelajaran selesai	Bahan Pelatihan Pengembangan Metodologi Pembelajaran selesai 1 Februari 2010
8	Roadmap Sinergitas Lembaga Pendidikan (Depdiknas-Depag) dg Pengguna Lulusan Untuk Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan	Terbentuknya Pusat Kewirausahaan	Januari 2010	Terbentuk Pusat Kewirausahaan di 72 PTN & 190 PTS dan Pembentukan Teaching Industry Retail di 99 SMK, Teaching Industry Manufacture di 135 SMK, Teaching Industry Pariwisata di 70 SMK, Teaching Industry Argo di 14 SMK, Teaching Industry Software dan Animasi di 7 SMK, Teaching Industry Broadcast, Pertelevisian dan Radio di 20 SMK	Pengembangan kewirausahaan di PTN terlaksana 90% dan di SMK 88,7%

Sesuai dengan tabel di atas, dapat disimpulkan, sampai dengan Desember 2009, Kemdiknas telah berhasil mencapai:

- Tiga dari delapan program sudah tercapai 100 Persen, bahkan untuk program Penyediaan Internet secara massal di sekolah persentase capaian telah melebihi 100%;
- Prosentase Capaian Sampai Desember 2009, 70 Persen Tercapai, dan optimistis sampai batas akhir akan tercapai 100 Persen;
- 18.358 sekolah telah tersambung internet dari target 17.500 sekolah.

F. PEMULIHAN PROSES PEMBELAJARAN DI DAERAH BENCANA DAN LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS

Selama tahun 2010 Kementerian Pendidikan Nasional telah melakukan berbagai langkah pemulihan proses pembelajaran di daerah-daerah yang terkena dampak bencana alam, seperti dampak bencana meletusnya Gunung Merapi di Yogyakarta, bencana tsunami di Mentawai dan bencana banjir bandang di Wasior serta keberlanjutan penanganan gempa di Sumatera Barat. Program pemulihan proses pembelajaran berupa tindakan awal melalui penanganan tanggap darurat untuk jangka pendek dan dilanjutkan dengan rehabilitasi/rekonstruksi bangunan sekolah.

Bentuk kegiatan tanggap darurat yang telah dilaksanakan meliputi pemberian makanan dan obat-obatan, tenda, pakaian/seragam sekolah, selimut, buku dan alat tulis sekolah, trauma konseling, berbagai bantuan untuk guru dan siswa, dan lain-lain. Sedangkan bentuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dilaksanakan meliputi rehabilitasi ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, dan rekonstruksi pembangunan unit sekolah baru. Kegiatan pemberian bantuan yang telah dilaksanakan di 3 [tiga] daerah yang terkena bencana tersebut adalah:

1. Penanganan dampak bencana Gunung Merapi, Yogyakarta

Kawasan merapi adalah bagian utara dari Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Kawasan ini merupakan sabuk kota yang menghubungkan Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan sampai dengan puncak Gunung Merapi. Sejak status Gunung Merapi berubah menjadi awas tanggal 25 Oktober 2010 dan semua penghuni wilayah dalam radius 10km dari puncak harus dievakuasi dan diungsikan ke wilayah aman. Status merapi mengalami puncaknya saat terjadi erupsi pertama pukul 17.02WIB tanggal 26 Oktober 2010. Meskipun masa tanggap darurat telah ditetapkan sampai tanggal 24 November 2010, sejumlah langkah baik dalam rangka tanggap darurat maupun rehabilitasi dan rekonstruksi sudah dilakukan. Kegiatan-kegiatan penanganan tersebut antara lain:

Kegiatan tanggap darurat

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kemdiknas selama masa tanggap darurat tanggal 11-15 November 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20 Kegiatan selama masa tanggap darurat 11-15 November 2010

NO	LOKASI	KEGIATAN
1	Youth Center	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan 3 papan tulis untuk pembelajaran anak PAUD dan TK - Memberikan saran pada relawan supaya mendatangkan guru yang sesuai jurusan SMK - Distribusi diterima oleh Irma dari UGM
2	Masjid Koirul Ummah	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan bantuan pakaian seragam - Memberikan trauma konseling - Membawa siswa TK, SD, SMP, SMA, SMK ke sekolah terdekat - Mendrop guru yang sesuai jurusan
3	Pos Ponpes Darul Hiro, Ngemplak	<ul style="list-style-type: none"> - Mendistribusikan 90 paket ATK, 20 buku gambar, 1 set spidol, 4 set permainan - Distribusi diterima oleh Farid Makruf sebagai bendahara
4	Pos SD model Wedomartani	<ul style="list-style-type: none"> - Mendistribusikan 85 paket ATK - Mencatat data siswa TK 3 anak, SD 85 anak, SMP 18 anak, SMA 5 anak, SMK 1 anak
5	Pos PP Al Muhdi	<ul style="list-style-type: none"> - Mendistribusikan 25 set ATK - Mendata siswa TK, SD, SMP, SMA, SMK

NO	LOKASI	KEGIATAN
6	Pos Desa Banyurejo	<ul style="list-style-type: none"> - Mendistribusikan ATK sebanyak 60 paket - Mendata siswa TK, SD,SMP, SMA, SMK semuanya berjumlah 59 anak; dan datanya masih menurut kelompok umur
7	Pos Gor SMP N 2 Tempel	<ul style="list-style-type: none"> - Mendistribusikan ATK sebanyak 60 paket dan buku gambar 20 eksemplar - Mendata jumlah siswa TK 20 anak, SD 28 anak, SMP 38 anak, SMA/SMK 7 anak
8	Pos SMA 2 Ngaglik, Sleman, tempat KBM SMAN 1, Cangkringan	<ul style="list-style-type: none"> - Mendistribusikan ATK sebanyak 170 paket, diterima kepala SMAN1, Cangkringan Drs. Shobariman - Trauma konseling kepada kelas XII IPA 1, XII IPS 2, dan XII IPA 2 - Supaya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk KBM segera dipenuhi kepala sekolah - UAN, ulangan semester supaya diundur khususnya DIY, mengingat keadaan belum optimal KBM
9	Stadion Magunharjo	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan bantuan berupa ATK 500 paket, plano 1 bendel, spidol warna 1 lusin, klip 1 lusin - Kegiatan belajar mengajar dan trauma healing telah dilakukan oleh posko relawan mahasiswa terpadu dengan membuat sekolah pintar Merapi. Dan juga dibantu pihak kepolisian dengan menurunkan polisi wanita sebagai tenaga fasilitator
10	Kecamatan Sentono	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian bantuan berupa: ATK sebanyak 50 set (50 buku tulis dan 50 buah ballpoint), beras sebanyak 20 kg, - KBM siswa TK/PAUD, SD, dan SMP telah dititipkan di sekolah-sekolah yang terdapat di sekitar pengungsian.
11	Kecamatan Nanggulan	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan data siswa meliputi TK/PAUD 14 anak, SD 26 anak, SMP 15 anak, SMA 15 anak dan SMP (autis) 1 anak - Menyerahkan bantuan berupa: ATK 60 set (60 buku tulis, 50 ballpoint, 100 pencil, 36 rautan, dan 60 block note), beras sebanyak 20 kg.
12	Kecamatan Kalibawang	<ul style="list-style-type: none"> - Mendata siswa meliputi TK/APUD dan SD 32 anak - Menyerahkan bantuan berupa 20kg beras - KBM siswa TK/PAUD, SD dan SMP telah dititipkan disekolah-sekolah yang ada di sekitar lokasi pengungsian
13	Posko UKDW	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian bantuan sebanyak 40 paket - Pendataan siswa yang meliputi TK/PAUD 10 anak, SD 28 anak, SMP 22 anak, SMA 9 anak.
14	Posko JEC	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian bantun berupa 132 paket ATK - Pendataan siswa yang meliputi TK/PAUD 33 anak, SD 93 anak, SMP 39 anak, SMA 15 anak dan SMK 10 anak - KBM telah berjalan baik disekolah-sekolah terdekat di lokasi pengungsian
15	Posko UKRIM	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan sebanyak 31 paket batal diberikan, karena seluruh pengungsi telah berpindah
16	Posko Gereja Kalasan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian bantuan berupa 69 paket ATK - Pendataan siswa yang meliputi TK/PAUD 9 anak, SD 21 anak, SMP 14 anak, SMA 6 anak dan SMK 10 anak - KBM telah berjalan baik disekolah-sekolah terdekat di lokasi pengungsian
17	Posko kecamatan kalasan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian bantuan berupa 40 paket - Pendataan siswa yang meliputi TK/PAUD 13 anak, SD 29 anak, SMP 13 anak, SMA 13 anak dan SMK 4 anak. - KBM telah berjalan baik disekolah-sekolah terdekat di lokasi pengungsian
18	Posko Balai Desa Tirtomartini	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian bantuan berupa 162 paket ATK - Pendataan siswa yang meliputi TK/PAUD 25 anak, SD 93 anak, SMP 51 anak, SMA 5 anak dan SMK 22 anak. - KBM telah berjalan baik disekolah-sekolah terdekat di lokasi pengungsian
19	Posko Balai Desa Taman Martani	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian bantuan berupa 300 paket ATK - Pendataan siswa yang meliputi TK/PAUD 10 anak, SD 70 anak, SMP 22 anak, SMA 9 anak dan SMK 22 anak. - KBM telah berjalan baik disekolah-sekolah terdekat di lokasi pengungsian - Terdapat 2 orang guru di lokasi pengungsian yaitu Hj Sriwanti, kepala sekolah SD Tawang harjo Pakem dan Bpk Waluyo dari SMPN Pakem
20	Kecamatan Berbah	<ul style="list-style-type: none"> - Tlogowono sebanyak 23 paket - Serut sebanyak 43 paket - Kalitirto sebanyak 50 paket - Jogotirto sebanyak 100 paket

a. Program rehabilitasi dan rekonstruksi

Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi adalah upaya yang dilakukan setelah selesainya tanggap darurat. Upaya tersebut bertujuan untuk mengembalikan kehidupan korban bencana kepada kehidupan normal. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut dapat dijelaskan di gambar 7.2 dibawah ini.

Tabel 3.21 Program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan	1. Pembangunan gedung sekolah 2. Pembangunan penyediaan sarana pendidikan seperti laboratorium dan perpustakaan
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan pendidikan	1. Komputer, buku, alat tulis kantor
3	Perbaikan administrasi sekolah	1. Pendataan ulang siswa dan guru 2. Perbaikan dan pembangunan sistem basis data sekolah
4	Perbaikan kurikulum sekolah	1. Memasukkan kurikulum tentang lingkungan dan wawasan kegunungapian
5	Pemulihan mental dan psikologi	1. Melakukan trauma konseling bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan 2. Membantu pemulangan pengungsi guru, siswa dan tenaga kependidikan
6	Peningkatan kapasitas dan pengetahuan dan bencana gunung api	1. Melakukan penyadaran kepada guru, siswa baik melalui brosur, pelatihan maupun dalam proses pembelajaran
7	Bantuan kepada guru dan tenaga kependidikan	1. Memberikan bantuan bagi guru yang menjadi korban merapi 2. Bantuan listrik bagi guru yang belum teraliri listrik PLN

2. Penanganan dampak bencana alam di Wasior, Papua Barat

Bencana alam berupa banjir bandang di Wasior Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat telah mengakibatkan kerusakan berbagai infrastruktur dan fasilitas pendidikan serta korban jiwa serta luka-luka bagi masyarakat termasuk PTK dan keluarga PTK. Untuk membantu mengurangi beban masyarakat akibat bencana tersebut khususnya di bidang pendidikan, Kemdiknas telah menyusun rencana aksi yang akan dilaksanakan. Berikut rencana aksi dalam penanganan tersebut.

Tabel 3.22 Rencana aksi penanganan bencana alam di Wasior

No	Rencana Aksi	Volume	Biaya		Penanggung Jawab	
			Satuan	Jumlah		
1	Alat permainan edukatif untuk PAUD	Tahap I	100 Paket	30,000,000	Ditjen PNFI	
		Tahap II	300 Paket			
2	Makanan Anak	200 anak/hari	1400 Paket	15,000,000		
3	Pengiriman tenaga Tim Pendamping Himpaudi	-	10 Orang	235,000,000		
4	Tenda Batalyon untuk kelas darurat	Kapasitas 20 Orang	10 Set	80,000,000		Ditjen MPDM
5	Seragam, Tas Sekolah dan Alat Tulis	-	1000 Set	75,000,000		
6	Bantuan renovasi gedung sekolah	<i>Note: Realisasi pada tahap rehabilitasi</i>	5 SD, 5 SMP, 4 SMA	2,200,000,000		
7	Bantuan Langsung Tunai kepada PTK	@ 5.000.000	5 Orang	100,000,000		Ditjen PMPTK
8	Pengiriman Tim Trauma Konseling	10 hari	5 Orang	100,000,000		

No	Rencana Aksi	Volume	Biaya		Penanggung Jawab
			Satuan	Jumlah	
9	Pengiriman Tim Advance	-	20 Paket	100,000,000	
10	Pengiriman alat penjernih air	Tahap I	40 Set	33,000,000	Ditjen Pendidikan Tinggi
		Tahap II	20 Set		
11	Pengiriman Tim Forensik Bangunan dari ITB dan UGM	-	4 Orang	80,000,000	
Total				3,048,000,000	

a. Penanganan Tanggap Darurat

Masa tanggap darurat pasca bencana alam banjir bandang di tetapkan oleh pemerintah pada tanggal 4 s/d 18 Oktober 2010, namun diperpanjang sampai dengan tanggal 2 November 2010. Selama penanganan masa tanggap darurat, Kemdiknas telah melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu.

Tabel 3.23 Tanggap darurat di Wasior

Rencana Aksi	Keterangan	
Mengirimkan 3 Orang Tim PAUD untuk melakukan kegiatan trauma konseling dan pendampingan anak-anak di daerah pengungsian di Kabupaten Manokwari	a. Mendirikan pos layanan trauma konseling untuk anak-anak korban bencana di Manokwari	
	b. Membagikan paket makanan anak dan APE di titik-titik pengungsian	
	c. Sejak tanggal 12 Oktober 2010 telah melakukan layanan trauma konseling anak di daerah pengungsian Manokwari	
	b. Melakukan identifikasi kebutuhan bantuan di daerah pengungsian berupa: baju anak-anak, alat permainan edukatif (APE), buku-buku cerita, buku tulis, susu ibu hamil dan makanan ringan.	
	Hari pertama kegiatan yang dilakukan adalah :	
	a. Melakukan kunjungan ke posko bencana Provinsi Papua Barat di Lantamal Manokwari, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pendataan, koordinasi dan laporan bantuan yang diberikan oleh Ditjen PNFI ke masyarakat korban bencana banjir Wasior	
	b. Menitipkan barang bantuan yang dibawa di posko Ditjen PNFI di SKB Manokwari	
	c. Melakukan koordinasi dengan Kabid PNFI Kab. Manokwari, SKB Manokwari, dan Himpaudi di SKB Manokwari untuk mengetahui dan merencanakan penanganan bantuan serta program yang dapat dilakukan di daerah pengungsian di Manokwari	
	d. Melakukan pendataan di posko pengungsian yang ada di Lapangan Kodim Manokwari dan BLK Kehutanan Manokwari	
	Hari kedua kegiatan yang dilakukan adalah :	
	a. Melakukan koordinasi dengan Kabid PNFI Provinsi Papua Barat untuk pendataan dan pemetaan bentuk bantuan yang diperlukan masyarakat pengungsi akibat bencana	
	b. Melakukan pendataan lanjutan atas kondisi dan permasalahan yang dihadapi pengungsi	
	c. Penjajagan posko layanan Kemdiknas maupun Ditjen PNFI sebagai tempat koordinasi maupun tempat informasi dan komunikasi layanan bencana bagi masyarakat di daerah pengungsian	

Rencana Aksi	Keterangan
	<p>d. Melakukan survey lembaga PNFI yang dapat dijadikan rujukan untuk menerima bantuan sosial yang ada di Setditjen PNFI khusus untuk masyarakat yang terkena bencana maupun masyarakat yang pasca terkena bencana di 2 lembaga yaitu SKB Manokwari dan PKBM Bunga Bhakti</p> <p>f. Melakukan rapat koordinasi dengan Kadis Pendidikan Provinsi Papua Barat dengan jajarannya untuk mengevaluasi dan perencanaan program bantuan pendidikan untuk masyarakat pengungsi akibat bencana Wasior. Dalam rapat tersebut Tim Ditjen PNFI menjelaskan tentang rencana kerja dan program bantuan untuk masyarakat di pos pengungsi serta mendiskusikan bantuan layanan pendidikan untuk siswa sekolah SD, SMP dan SMA yang ada di pos pengungsi.</p> <p style="text-align: center;">Hari Ketiga kegiatan yang dilakukan adalah :</p> <p>a. Melakukan koordinasi internal tim untuk merumuskan laporan dan usulan program yang dapat diberikan kepada masyarakat pengungsi yang ada di daerah pengungsian di Kabupaten Manokwari.</p> <p>b. Melakukan koordinasi dengan Kabid PNFI atas perkembangan dan rencana program untuk masyarakat di daerah pengungsian</p> <p>c. Melakukan pendataan lanjutan atas kondisi dan perkembangan masyarakat yang ada di daerah pengungsian</p> <p>d. Melakukan koordinasi dengan Himpaudi Provinsi Papua Barat dan Kab. Manokwari untuk penanganan layanan PAUD bagi anak-anak di pos pengungsian, serta koordinasi pemberian bantuan untuk anak-anak yang mengikuti program pembelajaran PAUD, serta penyerahan bantuan transportasi bagi tutor PAUD dari Dit PAUT yang jumlahnya ada 21 orang</p> <p>e. Melakukan survey lanjutan pada lembaga PNFI yang dimungkinkan dapat menerima bansos untuk layanan PNF di daerah bencana yaitu di PKBM Papua Mandiri, PKBM Bina Mandiri dan PKBM Yeras</p> <p style="text-align: center;">Hari Keempat kegiatan yang dilakukan adalah :</p> <p>a. Melakukan koordinasi Tim untuk evaluasi dan perencanaan kerja penanganan masyarakat yang terkena bencana di pos pengungsi</p> <p style="text-align: center;">Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini secara singkat dapat dinarasikan sebagai berikut:</p> <p>1. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan baik tingkat provinsi maupun kabupaten dapat dilaksanakan</p> <p>2. Layanan trauma konseling untuk anak-anak PAUD dapat dilaksanakan setiap hari pagi dan sore dimana tutor PAUD yang memberikan bimbingan adalah dari tutor PAUD di Kabupaten Manokwari</p> <p>3. Telah melakukan pelatihan singkat kepada tutor PAUD untuk teknik dan strategi penanganan trauma konseling kepada anak-anak PAUD di pos pengungsian</p> <p>4. Telah menyusun rencana kerja dan jadwal untuk layanan trauma konseling anak-anak PAUD bersama Himpaudi Provinsi Papua dan Kabupaten Manokwari</p>
	<p>5. Telah memberikan bantuan kepada masyarakat di daerah pengungsi khususnya untuk kebutuhan anak-anak usia PAUD, ibu hamil dan peralatan sekolah bagi anak-anak</p> <p>6. Mendapatkan kandidat lembaga PNFI yang dianggap relevan dan layak untuk mendapatkan bantuan sosial bagi daerah bencana yaitu SKB Manokwari, PKBM Papua Mandiri, dan PKBM Bunga Bhakti. Sedangkan PKBM Yeras dan PKBM Bina Mandiri kurang layak untuk mendapatkan bantuan sosial.</p> <p>7. Telah menghasilkan laporan lengkap pelaksanaan kegiatan selama bertugas di Papua Barat</p> <p style="text-align: center;">Catatan/Rekomendasi</p>

Rencana Aksi	Keterangan
Pengiriman Tim Trauma Konselling 5 orang	1. Didaerah bencana adalah daerah yang perlu penanganan khusus sehingga perlakuan tim yang dikirimkan juga membutuhkan kebijakan dan bantuan anggaran yang khusus, sebab situasi yang dihadapi juga berbeda dengan tugas yang normal.
	2. Tim yang dikirimkan harus mempunyai kemampuan untuk melakukan koordinasi, pemetaan dan analisis yang baik sehingga hasil yang dirumuskan untuk penanganan korban bencana maupun rumusan rencana kegiatan dan program lanjutan akan lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terkena bencana
	3. Penanganan korban bencana akan lebih efektif kalo kita mampu melakukan koordinasi dengan potensi lembaga mitra yang ada di daerah sehingga akan mendapatkan hasil yang optimal dan efisiensi yang cukup baik.
	Trauma Conselling
	1. Telah membuka posko trauma conselling di tiga posko yaitu posko kodim manokwari, posko kodim BLK manokwari dan posko SMP YPK Mieie Wasior
	2. Telah mendata jumlah siswa sasaran traumana conselling
	3. Telah melakukan trauma konseling, membagi tugas dengan lembaga conselling lainnya yang ikut bergabung di posko
	4. Memilih coordinator lapangan di setiap posko serta menetapkan pendidik yang akan mengajar trauma conselling selama tanggap darurat berlangsung
Pengiriman Tim Advance 5 Orang	Pendataan PTK (Formal dan Nonformal) Yaitu:
	1. Informasi Kondisi Guru Meninggal Dunia (3 orang guru dan beberapa keluarga guru)
	2. Informasi Kondisi Guru Luka Berat/Luka Ringan
	3. Informasi Kondisi Guru di Pengungsian
	4. Informasi Kondisi Rumah Guru
	Pendataan dan layanan proses pembelajaran bagi Siswa di Pengungsian
	1. Sudah dilakukan pendataan siswa SD,SMP.SMA/SMK asal kabupaten wasior bersama Posko Penanggulangan Bencana Banjir Bandang Wasior di Manokwari dan Wasior
	2. Bersama Sekretaris Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wondama, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, Kemendiknas serta Posko Penanggulangan Bencana Banjir Bandang Wasior di Manokwari telah menyepakati untuk bekerjasama membuka kelas sore atau kelas khusus (belajar pagi) di beberapa sekolah di manokwari. Soluai tersebut hingga sekarang belum ada kesepakatan karena masih kendala dalam hal pembagian peran untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana pendidikan bagi siswa korban bencana (seragam sekolah, buku tulis, alat tulis, tas sekolah, sepatu, buku pelajaran, honor guru).
	3. Penanganan trauma konseling di Pos pengungsian Kemdiknas telah membentuk 3 lokasi yakni Pos pengungsian Kodim di Manokwari jumlah anak usia 2-7 thn sebanyak 124 anak pos, pos pengungsian BLK Manokwari jumlah anak usia 2-7 thn sebanyak 75 anak dan Pos pengungsian di SMP YPK Meieie Wasior sebanyak 35 anak. Disetiap pos telah di koordinasikan dengan HIMPAUDI, IGTKI dan Ormas lain yang bergerak di bidang konseling, kecuali di Pos SMP YPK Meieie kami melatih guru relawan untuk bisa menjalankan kegiatannya. Untuk siswa SD, SMP, SMA / SMK setra yang ada di pengungsian Manokwari oleh Dinas Provinsi Papua Barat sudah memerintahkan agar setiap satuan pendidikan yang ada di Manokwari utk menerima anak-anakpengungsian untuk belajar (sifatnya titipan) sehingga tidak menjadi soal, yang mendesak saat ini seragam sekolah, buku tulis, alat tulis, buku pelajaran, tas dan sepatu, sedangkan yang masih di Wasior memang sangat dibutuhkan sekolah.

Rencana Aksi	Keterangan																															
<p>Mengirimkan 8 Orang Tim Forensik untuk mendata dan menganalisa, dengan membawa Pompa Air bersih</p>	<p>Pada lokasi yang ditinjau, kerusakan bangunan yang ditemukan dikelompokkan ke dalam 3 kategori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aman atau dapat langsung dipergunakan 2. Dapat dipergunakan dengan perbaikan terlebih dahulu 3. Tidak aman, harus dibongkar atau rata dengan tanah. 																															
	<p>Tipe kerusakan yang umum ditemukan dapat diurutkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terendam oleh lumpur (air, pasir dan tanah), 2. Hancurnya dinding dan kerusakan struktur bangunan yang diakibatkan oleh tumbukkan batang pohon dan batu 3. Hilangnya bangunan atau rata dengan tanah disebabkan derasnya aliran banjir. <p style="text-align: center;">Rekomendasi berdasarkan hasil penilaian Tim Forensik</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Nama Bangunan</th> <th style="text-align: left;">Penilaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SD YPK Bethania (Distrik Wasior)</td> <td>Dapat dipergunakan dengan perbaikan terlebih dahulu</td> </tr> <tr> <td>SD YPK Rado (Distrik Wasior)</td> <td>Hilang atau rata dengan tanah</td> </tr> <tr> <td>SD Negeri Sanduai (Distrik Wasior)</td> <td>Tiga (3) ruang kelas tidak aman Bang. perpustakaan tidak aman Rumah guru aman</td> </tr> <tr> <td>TK Bhayangkari (Distrik Wasior)</td> <td>Hilang atau rata dengan tanah</td> </tr> <tr> <td>SMA Negeri 1 Wondama* (Distrik Wasior)</td> <td>Empat (4) bangunan kelas tidak aman Tujuh (7) bangunan kelas dapat dipergunakan dengan perbaikan</td> </tr> <tr> <td>SMP Negeri Wasior (Distrik Wasior)</td> <td>Dapat dipergunakan dengan perbaikan terlebih dahulu</td> </tr> <tr> <td>SD Inpres Wasior (Distrik Wasior)</td> <td>Dapat dipergunakan dengan perbaikan terlebih dahulu</td> </tr> <tr> <td>SD YPK Sjen Jesus Bjeradja* (Distrik Wasior)</td> <td>Dapat dipergunakan dengan perbaikan terlebih dahulu</td> </tr> <tr> <td>SD Negeri Manggurai* TK Negeri Pembina Manggurai (Distrik Wasior)</td> <td>Aman dan dapat langsung digunakan</td> </tr> <tr> <td>SD YPK Wondamawi I (Distrik Wondiboi)</td> <td>Aman dan dapat langsung digunakan</td> </tr> <tr> <td>SD Negeri Wondamawi/Kaibi (Distrik Wondiboi)</td> <td>Aman dan dapat langsung digunakan</td> </tr> <tr> <td>SMP Negeri Rasiei (Distrik Rasiei)</td> <td>Aman dan dapat langsung digunakan</td> </tr> <tr> <td>SD YPK Rasiei (Distrik Rasiei)</td> <td>Aman dan dapat langsung digunakan</td> </tr> <tr> <td>SD YPK Wondiboi (Distrik Wondiboi)</td> <td>Aman dan dapat langsung digunakan</td> </tr> <tr> <td>SD YPK Mieii Aitumieri (Distrik Wasior)</td> <td>Aman dan dapat langsung digunakan</td> </tr> </tbody> </table>	Nama Bangunan	Penilaian	SD YPK Bethania (Distrik Wasior)	Dapat dipergunakan dengan perbaikan terlebih dahulu	SD YPK Rado (Distrik Wasior)	Hilang atau rata dengan tanah	SD Negeri Sanduai (Distrik Wasior)	Tiga (3) ruang kelas tidak aman Bang. perpustakaan tidak aman Rumah guru aman	TK Bhayangkari (Distrik Wasior)	Hilang atau rata dengan tanah	SMA Negeri 1 Wondama* (Distrik Wasior)	Empat (4) bangunan kelas tidak aman Tujuh (7) bangunan kelas dapat dipergunakan dengan perbaikan	SMP Negeri Wasior (Distrik Wasior)	Dapat dipergunakan dengan perbaikan terlebih dahulu	SD Inpres Wasior (Distrik Wasior)	Dapat dipergunakan dengan perbaikan terlebih dahulu	SD YPK Sjen Jesus Bjeradja* (Distrik Wasior)	Dapat dipergunakan dengan perbaikan terlebih dahulu	SD Negeri Manggurai* TK Negeri Pembina Manggurai (Distrik Wasior)	Aman dan dapat langsung digunakan	SD YPK Wondamawi I (Distrik Wondiboi)	Aman dan dapat langsung digunakan	SD Negeri Wondamawi/Kaibi (Distrik Wondiboi)	Aman dan dapat langsung digunakan	SMP Negeri Rasiei (Distrik Rasiei)	Aman dan dapat langsung digunakan	SD YPK Rasiei (Distrik Rasiei)	Aman dan dapat langsung digunakan	SD YPK Wondiboi (Distrik Wondiboi)	Aman dan dapat langsung digunakan	SD YPK Mieii Aitumieri (Distrik Wasior)
Nama Bangunan	Penilaian																															
SD YPK Bethania (Distrik Wasior)	Dapat dipergunakan dengan perbaikan terlebih dahulu																															
SD YPK Rado (Distrik Wasior)	Hilang atau rata dengan tanah																															
SD Negeri Sanduai (Distrik Wasior)	Tiga (3) ruang kelas tidak aman Bang. perpustakaan tidak aman Rumah guru aman																															
TK Bhayangkari (Distrik Wasior)	Hilang atau rata dengan tanah																															
SMA Negeri 1 Wondama* (Distrik Wasior)	Empat (4) bangunan kelas tidak aman Tujuh (7) bangunan kelas dapat dipergunakan dengan perbaikan																															
SMP Negeri Wasior (Distrik Wasior)	Dapat dipergunakan dengan perbaikan terlebih dahulu																															
SD Inpres Wasior (Distrik Wasior)	Dapat dipergunakan dengan perbaikan terlebih dahulu																															
SD YPK Sjen Jesus Bjeradja* (Distrik Wasior)	Dapat dipergunakan dengan perbaikan terlebih dahulu																															
SD Negeri Manggurai* TK Negeri Pembina Manggurai (Distrik Wasior)	Aman dan dapat langsung digunakan																															
SD YPK Wondamawi I (Distrik Wondiboi)	Aman dan dapat langsung digunakan																															
SD Negeri Wondamawi/Kaibi (Distrik Wondiboi)	Aman dan dapat langsung digunakan																															
SMP Negeri Rasiei (Distrik Rasiei)	Aman dan dapat langsung digunakan																															
SD YPK Rasiei (Distrik Rasiei)	Aman dan dapat langsung digunakan																															
SD YPK Wondiboi (Distrik Wondiboi)	Aman dan dapat langsung digunakan																															
SD YPK Mieii Aitumieri (Distrik Wasior)	Aman dan dapat langsung digunakan																															

Rencana Aksi	Keterangan
	Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama (Distrik Wasior) Bangunan baru: Tidak aman (harus dibangun baru) Bangunan lama: Dapat dipergunakan dengan perbaikan terlebih dahulu

b. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasca penanganan masa tanggap darurat akibat bencana alam tersebut akan dilanjutkan dengan fase Rehabilitasi dan Rekonstruksi sarana dan prasarana sektor pendidikan berupa rehabilitasi bangunan sekolah dan fasilitas pendidikan lainnya, termasuk sarana penunjang pendidikan di lembaga-lembaga yang rusak akibat bencana alam tersebut. Pada fase rekonstruksi akan di bangun kembali sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya setelah ada penetapan tata ruang oleh Kementerian Pekerjaan Umum, yang dimungkinkan adanya relokasi atau pemindahan lokasi Ibu Kota Kabupaten Teluk Wondama ke tempat lain.

Selain itu, sebagai bentuk kepedulian sosial atas bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Yogyakarta dan Kepulauan Mentawai, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi juga telah mengambil langkah langkah dalam penanganan Bencana Alam sebagai Berikut :

- a) Membentuk Tim Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam di Mentawai Propinsi Sumatera Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b) Menghimpun sumbangan dari seluruh Karyawan Ditjen Pendidikan Tinggi.

Menghimpun sumbangan dibagi dalam 2 periode yaitu Periode 1 : Jumlah sumbangan sebesar Rp 36.019.910,- dan telah disalurkan oleh Tim Tanggap Darurat Bencana Alam Ditjen Dikti pada tanggal 4 November 2010 langsung kepada yang berhak menerima di Yogyakarta sebesar Rp 14.019.910 dalam bentuk perlengkapan seperti pakaian dalam, peralatan mandi, kain sarung, makanan ringan dan susu yang diperuntukan untuk anak-anak korban bencana. Sedangkan untuk bantuan bencana alam di Kepulauan Mentawai telah disalurkan langsung berupa uang tunai sebesar Rp 22.000.000,-

Periode 2 : Jumlah sumbangan baru terkumpul sebesar Rp. 3.760.500. dana tersebut belum disalurkan karena pengumpulan sumbangan masih berjalan dan diharapkan dalam waktu dekat akan terkumpul sejumlah uang yang selanjutnya akan segera disalurkan oleh Tim Penangan Tanggap Darurat Bancana Alam Ditjen Dikti. (Terlampir perincian penggunann dana Bantuan Bencana Alam Gunung Merapi dan Mentawai)

Selanjutnya Dikti melaksanakan instruksi Wakil Menteri Pendidikan Nasional untuk menyisir dana-dana dari seluruh Unit Utama yang tidak akan terserap sampai dengan akhir Desember 2010, yang direncanakan dialokasikan untuk penanganan bencana alam di Yogyakarta dan Mentawai sebesar Rp 124,002.000.000, namun dana batal dilaksanakan dikarenakan untuk revisi sangat terbatas waktunya dan pengalokasian dana tersebut harus memperoleh persetujuan DPR terlebih dahulu.

3. Keberlanjutan Penanganan Pasca Gempa Sumatera Tahun 2009

Sebagaimana kita ketahui semua pada tanggal 30 September 2009 telah terjadi Gempa Bumi di Sumatera Barat. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tanggal 1 Oktober 2009

telah mengutus staf untuk langsung meninjau lokasi bencana selama 1 minggu kemudian diputuskan selama 3 bulan mengutus staf secara bergantian.

Setelah melihat kondisi lokasi terkena gempa maka diputuskan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi untuk pemberian dana subsidi dengan merevisi DIPA Tahun 2009 sebagai berikut :

Tabel 3.24 Revisi DIPA Tahun 2009 Untuk Pemberian Dana Subsidi Gempa Sumatera Barat

Pagu Awal	
1. Sekretariat Ditjen Dikti	Rp. 344.338.693.000,-
2. Direktorat P2M	Rp. 900.972.513.000,-
3. Direktorat Ketenagaan	Rp. 704.843.007.000,-
4. Direktorat Kelembagaan	Rp. 226.071.195.000,-
5. Direktorat Akademik	Rp. 331.000.152.000,-
Jumlah	Rp. 2.507.225.560.000,-
Pagu Setelah Revisi	
1. Sekretariat Ditjen Dikti	Rp. 333.195.093.000,-
2. Direktorat P2M	Rp. 771.443.513.000,-
3. Direktorat Ketenagaan	Rp. 700.643.007.000,-
4. Direktorat Kelembagaan	Rp. 216.071.195.000,-
5. Direktorat Akademik	Rp. 311.000.152.000,-
Jumlah	Rp. 2.332.352.960.000,-

Sehingga Jumlah dana yang akan di alokasikan sebesar Rp. 174.872.600.000,- (Seratus tujuh puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), dana ini akan digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di lingkungan Provinsi Sumatera Barat yang ditampung pada DIPA Satuan Kerja (189641) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun anggaran 2009 pada kegiatan (2561) Pengembangan Infrastruktur Perguruan Tinggi, sub kegiatan (0750) Bantuan Kepada Sekolah Republik Indonesia.

Selain untuk rehabilitasi dan rekontruksi digunakan untuk pemberian beasiswa bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di lingkungan Kopertis Wilayah X Padang bagi sebanyak 4000 (empat ribu) mahasiswa dengan bantuan beasiswa masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan dan diberikan selama 3 tiga bulan, terhitung dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2009 dengan jumlah total sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

Dalam keberlanjutan pasca gempa untuk wilayah Padang dan Yogyakarta pada tahun 2010 Dikti mengalokasikan untuk membangun infrastruktur beberapa perguruan tinggi yang memerlukan penyelesaian antara lain :

Tabel 3.25 Alokasi Pasca Gempa

Institusi	2009	2010
Universitas Andalas	Rp. 41.693.309.000,-	
Universitas Negeri Padang	Rp. 39.107.071.000,-	
STSI Padang Panjang	Rp. 7.921.818.000,-	
Politeknik Negeri Padang	Rp. 8.346.328.000,-	
Kopertis Wilayah X	Rp. 11.629.276.000,-	
Akademi Keperawatan Nan Tongga Lb.Akung	Rp. 23.460.000,-	
Politeknik Kesehatan Siteba Padang	Rp. 2.477.376.000,-	

Institusi	2009	2010
Sekolah Tinggi Bahasa Asing Prayoga	Rp. 8.399.973.000,-	
Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia (STIFI)	Rp. 140.000.000,-	
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Adabiah	Rp. 58.650.000,-	
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Andalas	Rp. 10.040.733.000,-	
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP	Rp. 5.165.100.000,-	
Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang	Rp. 1.884.131.000,-	
STIA Bina Nusantara Mandiri	Rp. 93.577.000,-	
STIKES Indonesia Padang	Rp. 501.457.000,-	
STIKES Mercu Bakti Jaya Padang	Rp. 109.863.000,-	
STIKES Ranah Minang	Rp. 2.958.000.000,-	
STKIP PGRI Sumatera Barat	Rp. 29.325.000,-	
STKIP YDB Lubuk Alung	Rp. 58.650.000,-	
STMIK Indonesia Padang	Rp. 503.250.000,-	
Universitas Bung Hatta	Rp. 3.060.000.000,-	
Universitas Ekasakti	Rp. 16.465.039.000,-	
Universitas Muh. Sumatera Barat	Rp. 875.409.000,-	
Universitas Putra Indonesia YPTK Padang	Rp. 5.797.234.000,-	
Universitas Taman Siswa Padang	Rp. 977.043.000,-	
STMIK Jayanusa	Rp. 250.000.000,-	
ISI Yogyakarta		Rp. 25.000.000.000
Universitas Andalas		Rp. 25.700.000.000
Universitas Negeri Padang		Rp. 22.470.000.000
Kopertis Wilayah X		Rp. 7.425.000.000
Politeknik Negeri Padang		Rp. 710.000.000





Bantuan Tanggap Darurat Kemendiknas di Wasior

7.



Layanan Pendidikan khusus

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengamanatkan pemberian pendidikan khusus dan layanan khusus bagi anak Indonesia di luar negeri, maupun di daerah terpencil atau terbelakang. Berdasarkan Pasal 32 UU Sisdiknas, selama tahun 2010 Kemdiknas telah memberikan layanan khusus diantaranya:

1. Telah ditetapkan 73 LAPAS/RUTAN (50 lembaga merupakan lanjutan pembelajaran tahun 2009 dan 23 lembaga yang baru melaksanakan tahun 2010) yang memberikan layanan pendidikan dasar melalui Pendidikan Kesetaraan sebanyak 3465 peserta didik. Layanan ini melebihi target dari 58 lembaga menjadi 73 (125,86%).
2. Telah ditetapkan 8 rumah singgah yang memberikan layanan pendidikan dasar melalui pendidikan kesetaraan kepada 269 peserta didik.
3. Telah ditetapkan 13 lembaga yang memberikan layanan pendidikan dasar kepada 997 anak TKI di Malaysia. Layanan pendidikan anak TKI ini juga melebihi target 9 lbg menjadi 13 lbg (144,4%).

Konsentrasi anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagian besar tinggal di Kabupaten Nunukan tersebar di 42 sekolah yang mendiami Pulau Nunukan dan Sebatik. Sebagian lagi mengikuti orang tua mereka di Negara Bagian Sabah, Malaysia sebanyak lebih 40.000 anak usia sekolah. Pelayanan pendidikan untuk anak TKI yang tinggal di wilayah NKRI diberikan melalui bantuan beasiswa kepada siswa SD, SMP, dan SMA. Pada tahun 2010 besaran dana bantuan sosial yang diterima adalah sebesar Rp 35.000,-/siswa SD per-bulan, Rp 35.000,-/siswa SMP per-bulan, dan Rp 45.000,-/siswa SMA per-bulan. Jumlah penerima beasiswa anak TKI tahun 2010 sebanyak 2.002 orang.

Sementara itu, pelayanan pendidikan anak TKI di Malaysia dilakukan melalui Sekolah Indoensia Kota Kinabalu (SIKK) sebagai *center point* yang membuka program pendidikan dasar dengan jumlah siswa tahun 2010 sebanyak 614 siswa. Selain sekolah regular, program SMP Terbuka juga telah dioperasikan pada tahun 2010 dengan sasaran sebanyak 7 lokasi. Untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di Sabah, pada tahun 2010 Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar mulai membangun 1 unit sekolah baru di Kota Kinabalu di atas lahan milik pemerintah RI seluas kurang lebih 1,6 Ha.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemdiknas Tahun 2010 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan rencana strategis 2010-2014 (visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis dan program) dan tugas pokok dan fungsi kepada semua elemen masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan nasional selama tahun 2010.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa unit kerja Kemdiknas yang terdiri atas 9 (sembilan) unit utama telah dapat merealisasikan program beserta target IKU Tahun 2010 untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2010-2014. Hal ini didukung fakta bahwa kinerja Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2010 telah berhasil merealisasikan IKU beserta target program yang merupakan penjabaran dari 5 (lima) misi Kemdiknas, yaitu: 1) Meningkatkan **Ketersediaan** Layanan Pendidikan; 2) Meningkatkan **Keterjangkauan** Layanan Pendidikan; 3) Meningkatkan **Kualitas/Mutu dan Relevansi** Layanan Pendidikan; 4) Meningkatkan **Kesetaraan** dalam Memperoleh Layanan Pendidikan; dan 5) Meningkatkan **Kepastian/Keterjaminan** Memperoleh Layanan Pendidikan.

Dalam kaitan dengan ketercapaian 5 (lima) misi tersebut, Kemdiknas telah melaksanakan program-program dititikberatkan pada penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan, penyediaan tenaga pendidikan yang berkompeten dan merata, penyediaan manajemen satuan pendidikan yang berkompeten, penyediaan sistem pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan, penyediaan data dan informasi serta akreditasi yang handal dan penataan struktur organisasi untuk menjamin terlaksananya layanan prima dalam bidang pendidikan.

Dari seluruh IKU yang digunakan dalam penetapan kinerja dan rencana kinerja, Kemdiknas telah berhasil mencapai target sebanyak 41 IKU, melebihi target sebanyak 49 IKU dan yang belum dapat mencapai targetnya sebanyak 41 IKU serta 7 IKU belum terukur. Dalam hal pencapaian target kinerja dalam kontrak kinerja antara Menteri dengan Presiden, Kemdiknas telah berhasil merealisasikan target yang ada dalam kontrak kinerja yang diperjanjikan. Selanjutnya dalam penanganan layanan pendidikan di daerah bencana, Kementerian Pendidikan Nasional telah menunjukkan keberhasilan melalui upaya rehabilitasi dan rekonstruksi gedung/kampus serta perumahan bagi guru/dosen, pemberian beasiswa, pengadaan bahan dan media pembelajaran.

Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun pertama ini, merupakan dasar berpijak yang kuat bagi Kementerian Pendidikan Nasional untuk dapat melaksanakan program-program yang telah dicanangkan pada tahun-tahun berikutnya, dan sekaligus menjadi barometer agar program-program pada masa mendatang akan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Apabila diperlukan, Kementerian Pendidikan Nasional akan mengambil langkah-langkah strategis baik berupa perubahan, penyesuaian dan pembaharuan dalam rangka menjamin perwujudan tekad dalam melakukan reformasi pendidikan untuk menjawab tantangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di era persaingan global.